

**IMPLEMENTASI *FINANCIAL INCLUSION STRATEGIC* DI ERA  
EKONOMI DIGITAL TERHADAP LITERASI KEUANGAN DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh

Nama : Muhammad Ilham  
NPM : 1505180037  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : MUHAMMAD ILHAM  
NPM : 1505180037  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI *FINANCIAL INCLUSION STRATEGIC* DI ERA EKONOMI DIGITAL TERHADAP LITERASI KEUANGAN DI INDONESIA

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Tim Penguji**

Penguji I

(SRI ENDANG RAHAYU, SE, M.Si)

Penguji II

(MURVIANA KOTO, SE, M.Si)

**Pembimbing**

(HASTINA FEBRIATY, SE, M.Si)

**Panitia Ujian**

**Ketua**

(H. JANURI, S.E., M.L., M.Si)

**Sekretaris**

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : MUHAMMAD ILHAM  
NPM : 1505180037  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI *FINANCIAL INCLUSION STRATEGIC* DI  
ERA EKONOMI DIGITAL TERHADAP LITERASI  
KEUANGAN DI INDONESIA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan  
Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

HASTINA FEBRIATY, S.E, M.Si

Diketahui/Disetujui

oleh :

Ketua Program Studi

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS



H. JANURI, S.E, M.M, M.Si

*Teruntuk Kedua Orangtua*

*Bapak dan (Almh) Mamak*

*Terimakasih*

*untuk limpahan cinta dan kasih sayang pada anakmu ini, maafkan aku karena di sisa hidup mamak belum bisa membanggakan. Maafkan aku yang selalu mengecewakan bapak, untuk mamak yang di sana yang sudah tidak merasakan sakit lagi, dan aku yakin bahagia di sana. Dan untuk bapak sehat selalu dan aku harap selalu dalam lindungan-Nya dalam melakukan segala aktifitas.*

*Maafkan aku yang selalu membantah perkataan bapak dan mamak, tidak mendengarkan nasehat yang kalian lontarkan. Aku elalu berdoa untuk kalian berdoa agar selalu dalam lindunganNya*

*Hargai apa yang kita pun*

*ya saat ini, sayangi dengan sepenuh hati apa yang ada di hadapan kita. Karena kita tidak tau kapan itu akan pergi meninggalkan kita*

## ABSTRAK

### **MUHAMMAD ILHAM. 1505180037. Implementasi *Financial Inclusion Strategic* Di Era Ekonomi Digital Terhadap Literasi Keuangan Di Indonesia**

Inklusi dan Literasi keuangan merupakan program yang beberapa tahun belakangan ini sedang digalakkan oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) demi mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan didukung digitaslisasi keuangan agar dapat menjangkau hingga pelosok Indonesia masyarakat hanya perlu melakukan transaksi dengan menggunakan telepon genggam dan Agen Laku Pandai. Tentu saja dengan dukungan infrastruktur layanan internet dan listrik yang telah tersedia dengan tersedianya layanan keuangan digital maka masyarakat tidak perlu lagi ke bank dengan begitu semua pelayanan beralih ke smartphone atau Agen Laku Pandai, dan fintech bank formal juga tidak perlu mendirikan kantor cabang (*branchless banking*) untuk melayani nasabah. Dalam penelitian ini model yang digunakan yaitu TKD yang dipengaruhi oleh FIN, PDB, IKE, PI berdasarkan estimasi diperoleh hasil  $R^2$  97.7% dari hasil  $R^2$  97.7% maka memiliki sisa et sebesar 2.3% yang ada pada *disturbance error term*. Dalam penelitian ini juga menggunakan analisis tipologi klassen, yaitu pemetaan dengan 3 variabel utama yaitu Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan PDRB Perkapita tipologi klassen digunakan untuk memetakan daerah mana yang unggul tingkat Literasi dan Inklusi Keuangannya Terhadap Pertumbuhan PDRB Perkapitanya.

***Kata Kunci:*** Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan, TKD, FIN, IKE, PDB, PI

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi nikmat tak terhingga kepada hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta Shalawat bernadakan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju ilmu pengetahuan.

Atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Financial Inclusion Startegic Di Era Ekonomi Digital Terhadap Literasi Keuangan Di Indonesia”**, yang diajukan untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi ini penulis persembahkan terkhusus untuk kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, Ayahanda Ngadirin dan Ibunda Alm. Siti Rohimah yang telah memberikan do'a, dukungan dan nasihat yang mendidik serta materil yang tidak ternilai. Semoga Allah SWT senantiasa memberi rahmat kepada mereka. Aamiin yarabbal'alamin.

Penulis menyadari bahwa isi yang ada dalam skripsi ini belum sempurna karena kurangnya kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam merangkai kata-kata menjadi suatu karya tulis yang lebih baik. Oleh karena itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima kritik dan saran untuk menyelesaikan ini riset ini.

Terwujudnya skripsi ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugasnya. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:



1. **ALLAH SWT** . yang telah memberikan penulis limpahan Rahmat serta Rezkinya yang luar biasa serta nikmat iman dan nikmat kesehatan kepada penulis. Dan atas izin-Nya yang memberikan kesempatan kepada penulis agar bias menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta bapak Ngadirin dan mamak Almh. Siti Rohimah yang telah memberikan kasih sayang, mendidik, memberikan dukungan dan do'a nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
3. Untuk adik-adik dan keluarga besar saya yang tercinta yang memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak H. Januri S.E., M.M., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, selaku Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan, yang telah banyak membantu dan membimbing saya selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Roswita Hafni M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Ibu Hastina Febriaty M.Si selaku dosen pembimbing saya yang memberikan bimbingan, arahan dan kritiknya kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
9. Dosen dosen yang telah mengajarkan penulis dari smester awal hingga semester akhir terkhusus dosen Prodi Ekonomi pembangunan
10. Sahabat-sahabat 'sayur kol' Sucay, Uden, Ical, Mira, Dila, Cici dan juga temen seperjuangan Kelas B Ekonomi Pembangunan siang mulai dari awal perkuliahan

hingga saat ini, dan semoga seterusnya dapat memberikan semangat yang positif. Juga teman yang banyak meluangkan waktu bersama untuk menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan terutama untuk skripsi.

11. Teman SMA yang selalu memberikan support walaupun berjauhan Yurinda Icak, Dedek dan Cristi Munthe semoga kedepannya dapat terus membantu dan memberikan semangat satu sama lain.

Penulis mengharapkan semoga skripsi penelitian ini memberikan manfaat dan berguna bagi para pembaca secara umum dan menjadi pembelajaran bagi peneliti selanjutnya serta penulis sendiri. Akhir kata penulis haturkan terimakasih

**Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Medan, Maret 2019

Penulis,

Muhammad Ilham



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	13
1.3 Batasan dan Rumusan Masalah .....	14
1.4 Tujuan Penelitian .....	15
1.5 Manfaat Penelitian .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>17</b>
<b>2.1 Uraian Teori .....</b>	<b>17</b>
2.1.1 Uang dan Lembaga Keuangan .....	17
2.1.2 Keuangan .....	31
2.1.3 Literasi Keuangan .....	33
2.1.4 Inklusi Keuangan .....	39
2.1.5 Sistem Pembayaran .....	47
2.2 Penelitian Terdahulu .....	61
2.3 Kerangka Pemikiran .....	63
2.4 Hipotesis .....	65
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>66</b>
3.1 Pendekatan Penulisan .....	66
3.2 Definisi Operasional .....	66
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	67
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	68
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	68
3.6 Model Estimasi.....	68
3.7 Metode Estimasi .....	69

3.8 Prosedur Analisis .....	70
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>79</b>
<b>4.1 Perkembangan Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank .....</b>	<b>79</b>
4.1.1 Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral.....	79
4.1.2 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	82
4.1.3 Inklusi Keuangan .....	90
4.1.4 Indikator Penggunaan Layanan Keuangan .....	95
4.1.5 Literasi Keuangan.....	96
4.1.6 Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Untuk meningkatkan .....	101
4.1.7 Transaksi Keuangan Secara Digital .....	104
<b>4.2 Analisa Model Ekonometrika .....</b>	<b>110</b>
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	110
4.2.2 Analisis Hasil Regresi .....	111
4.2.3 Penafsiran .....	113
4.2.3.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	113
4.2.3.2 Korelasi (R) .....	114
4.2.4 Interpretasi Hasil.....	114
4.2.5 Uji Statistik.....	116
4.2.5 Uji Asumsi Klasik .....	116
<b>4.3 Analisis Tipologi Klassen .....</b>	<b>117</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>124</b>
5.1 Kesimpulan .....	124
5.2 Saran .....	125

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	perkembangan Status dan Fungsi Pokok Bank Indonesia ..... 27
Tabel 2.2	Sasaran Keuangan Inklusif ..... 45
Tabel 2.3	Perbedaan Pengguna Teregeistrasi dan Tidak Teregistrasi ..... 43
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu ..... 61
Tabel 3.1	Definisi Operasional ..... 66
Tabel 3.2	Matriks Tipologi Klassen ..... 78
Tabel 4.1	Data Transaksi Keuangan Digital ..... 109
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif Model ..... 110
Tabel 4.3	Regresi Linier Berganda Model Sebelum dan Sesudah Interpolasi ..... 111
Tabel 4.6	Tipologi Daerah Berdasarkan Literasi dan PDRB tahun 2016 ..... 119
Tabel 4.7	Tipologi Daerah Berdasarkan Inklusi Keuangan, PDRB Tahun 2016 ..... 122

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat penetrasi layanan perbankan yang rendah dibanding negara berkembang lainnya. Pemerintah Indonesia menempatkan isu ini ke dalam posisi yang penting dan menyadari kurangnya akses akan jasa keuangan sebagai sebuah hambatan dalam pembangunan Indonesia. Akses terhadap jasa keuangan formal hanya tersedia bagi setengah penduduk Indonesia. Bandingkan saja dengan beberapa negara ASEAN lainnya seperti Singapura yang indeks inklusi keuangannya mencapai 98%, Malaysia 85%, Thailand 82% dan Indonesia menempati urutan keempat dengan 49%, dibawahnya ada Filipina dengan 34% Vietnam 31% dan terakhir Cambodia 22%.

Tidak hanya itu, Indonesia juga tertinggal dalam hal Literasi keuangan dengan hanya mencakup 32% dari total penduduk, sedangkan Malaysia dan Singapura masing-masing mencapai 36% dan 59% disusul dengan Thailand 27%, Filipina 25%, Vietnam 24% dan Cambodia 18%. (*World Bank, 2017*)

Berkaca pada negara-negara tetangga seharusnya tingkat literasi dan inklusi keuangan bisa lebih ditingkatkan dengan berbagai dukungan dari berbagai lembaga keuangan. Dengan meningkatnya inklusi keuangan dan literasi perbankan Indonesia diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam perkembangannya, upaya dalam peningkatan inklusi keuangan tidak hanya sebatas pengembangan produk dan layanan jasa keuangan, tetapi juga meliputi empat elemen inklusi keuangan lainnya yaitu; perluasan akses keuangan,

ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan, penggunaan produk layanan jasa keuangan, serta peningkatan kualitas baik kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan itu sendiri. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur dan mengawasi industri keuangan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dalam berinteraksi dengan industri jasa keuangan. Dalam melindungi kepentingan terdapat aspek literasi dan inklusi keuangan yang memerlukan strategi tersendiri dalam implementasinya.

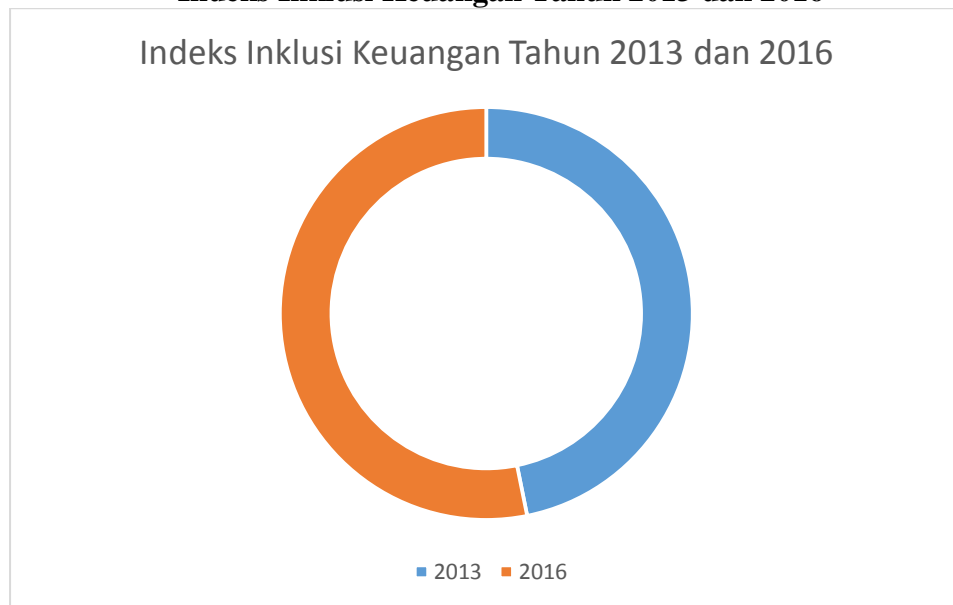
Samma (2009) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai proses yang memastikan kemudahan akses, ketersediaan dan penggunaan sistem keuangan formal oleh masyarakat sebagai anggota ekonomi. *Consulative Group to Assist the Poor* (CGAP,2016) menjelaskan inklusi keuangan sebagai akses yang dimiliki oleh rumah tangga dan bisnis terhadap penggunaan produk dan layanan jasa keuangan secara efektif. Produk dan layanan jasa keuangan tersebut harus tersedia secara berkelanjutan dan teregulasi dengan baik. *World Bank* (2016) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun usahanya dalam hal ini transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi yang digunakan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan. Sementara itu, kualitas juga dapat diartikan sebagai pilihan yang tersedia bagi konsumen terhadap produk dan layanan jasa keuangan (*World Bank*, 2015)

Akses adalah infrastruktur yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan agar masyarakat dapat menjangkau baik lembaga, produk, dan layanan jasa

keuangan lainnya. Akses ke lembaga keuangan yang dibutuhkan seluruh golongan masyarakat agar setiap orang mampu memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan. Bukan hanya penggunaan produk dan layanan jasa keuangan yang menjadi fokus, akan tetapi bagaimana jasa keuangan yang digunakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil survei nasional literasi keuangan indonesia yang dilakukan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) mengalami peningkatan sebesar 9,1% menjadi 67,9% tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2013.

**Gambar 1.1**  
**Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2013 dan 2016**



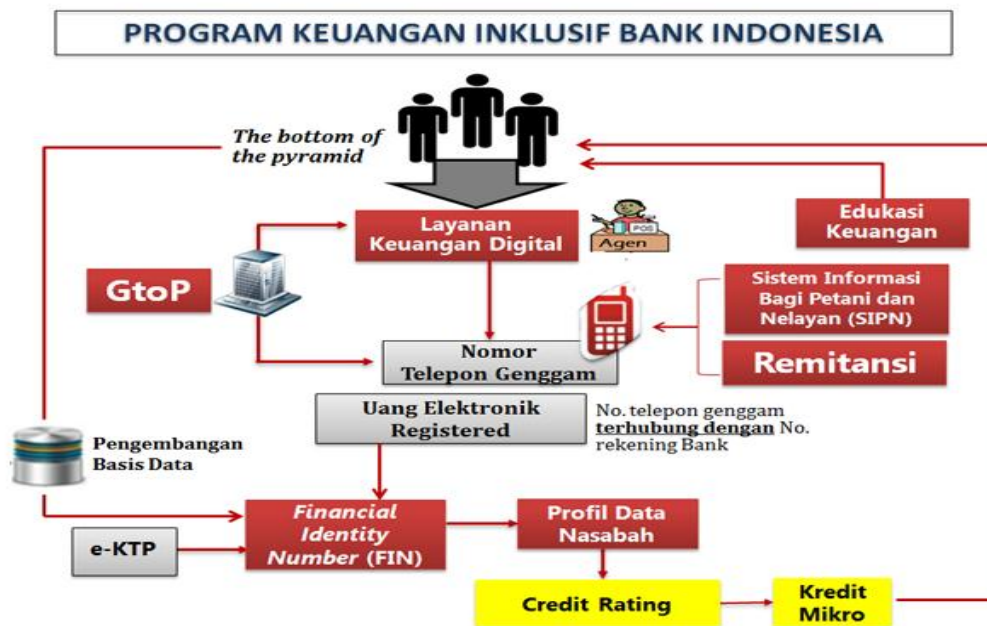
*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2016*

Dalam peningkatan inklusifitas keuangan di indonesia Beragam kegiatan edukasi dan program inklusi keuangan secara berkelanjutan dilaksanakan oleh OJK bersama industri jasa keuangan. Edukasi keuangan dilakukakn dalam berbagai bentuk seperti edukasi komunitas, *training of trainer*, *outreach program*, kuliah umum, edukasi bahari, iklan layanan masyrakat, *edu expo*, bioskop

keliling, wayangan dan siMOLEK dengan target edukasi yaitu perempuan/ ibu rumahtangga, UMKM, petani/nelayan, TKI/CTKI, pelajar/mahasiswa, professional, karyawan dan pensiunan.

Sedangkan, pelaksanaan program inklusi keuangan dilaksanakan program perluasan akses keuangan, seperti Laku Pandai, Jaring dan Laku Mikro, maupun melalui pengembangan produk mikro, seperti tabungan SimPel, asuransi mikro, reksadana mikro yuk nabung saham dan nabung emas. Salah satu program inklusi keuangan yang sedang digalakkan di era millennial ini adalah digitalisasi keuangan menggunakan aplikasi dari smartphone, dan agen-agen perbankan di pedesaan yang tidak terjangkau dengan cabang perbankan nasional.

**Gambar 1.2**  
**Program Keuangan Inklusif Bank Indonesia**



*Sumber: Bank Indonesia*

Literasi keuangan adalah mencakup kemampuan untuk membedakan pilihan keuangan, membahas keuangan dan masalah keuangan tanpa ketidaknyamanan, merencanakan masa depan, termasuk peristiwa ekonomi secara umum. Literasi



keuangan membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Inklusi keuangan menurut OJK adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bila sektor swasta dan pemerintah melakukan transaksi keuangan secara digital (bukan tunai), mereka dapat berperan penting dalam mendorong peningkatan kepemilikan rekening secara cepat dan meningkatkan inklusi keuangan.

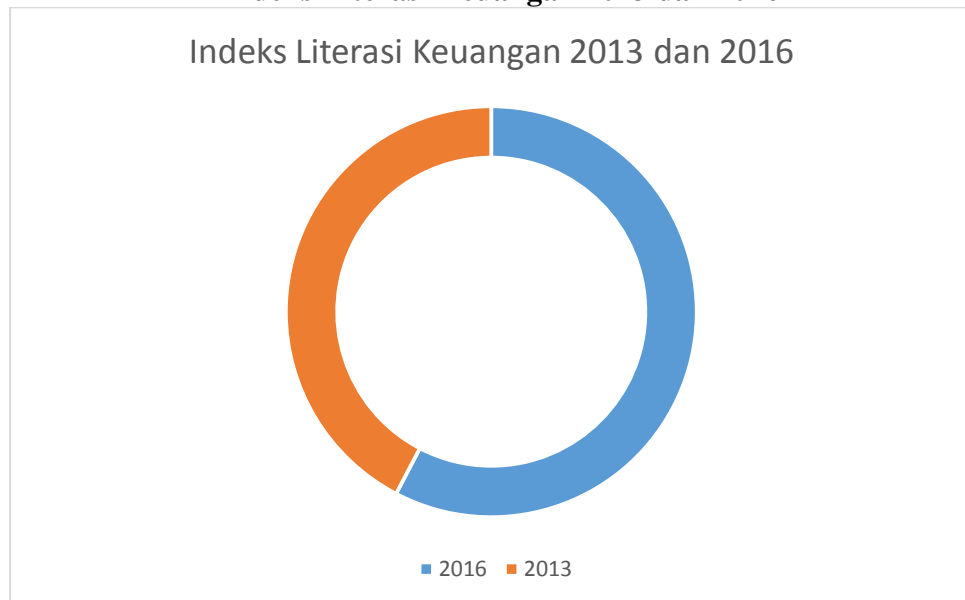
*Organisation for Economic Co-operation and Development* OECD (2016) mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan berikut keterampilan, motivasi, serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya tersebut dalam rangka membuat keputusan keuangan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan individu dan masyarakat, dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi. Remund (2010) menyatakan bahwa literasi keuangan merupakan pengukuran terhadap pemahaman seseorang mengenai konsep keuangan, dan memiliki kemampuan dan keyakinan untuk mengatur keuangan pribadi melalui pengambilan keputusan jangka pendek yang tepat, perencanaan keuangan jangka panjang serta memperhatikan kejadian dan kondisi ekonomi. Huston (2010) mengatakan literasi keuangan meliputi kesadaran dan pengetahuan akan instrumen keuangan dan aplikasinya di dalam bisnis dan perhitungan.

Pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh seseorang tersebut kemudian berkembang menjadi keterampilan keuangan, dimana keterampilan keuangan itu sendiri didefinisikan sebagai kemampuan dalam menerapkan pengetahuan

keuangan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari (Palameta et.al, 2016). Keterampilan keuangan memungkinkan seseorang untuk dapat dapat mengambil keputusan yang rasional dan efektif terkait dengan keuangan dan sumber ekonominya (Kunihara, 2013).

Berdasarkan survei nasional literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK memberikan gambaran indeks literasi keuangan yang ada di indonesia. indeks literasi keuangan masyarakat indonesia mengalami peningkatan dari 21,9% di tahun 2013 menjadi 29,7% di tahun 2016.

**Gambar 1.3**  
**Indeks Literasi Keuangan 2013 dan 2016**



*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2016*

Melalui inisiatif program peningkatan literasi keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menunjukkan rendahnya tingkat angka melek keuangan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2013 bahwa tingkat literasi keuangan penduduk indonesia dibagi menjadi empat bagian, yaitu :

- 1) *Well Literate*

Yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk jasa keuangan,

2) *Sufficient Literate*

Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat, dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan,

3) *Less Literate*

Hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan, dan

4) *Not Literate*

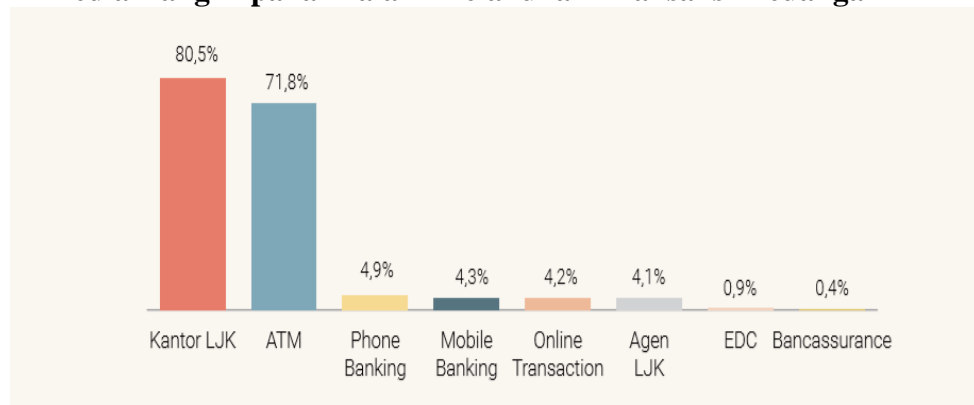
Tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Tujuan Pemerintah melalui OJK saat ini adalah menjadikan masyarakat Indonesia *well literate* yaitu memiliki pengetahuan yang cukup tentang lembaga keuangan dan layanannya. Karena sebelum menggunakan layanan jasa lembaga keuangan masyarakat harus mengetahui lebih dahulu apa itu Lembaga Keuangan dan Produk-produknya (Literasi keuangan) agar mempermudah masyarakat dalam mengelola keuangan pribadinya. Selain itu, menurut studi yang dilakukan oleh *World Bank* (2014) menunjukkan bahwa adanya korelasi positif antara literasi keuangan dengan perluasan akses keuangan. Sama halnya dengan studi yang dilakukan oleh *OECD* (2013) yang menyatakan bahwa mengkombinasikan

edukasi keuangan dengan ketersediaan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan formal dapat mendorong peningkatan inklusi keuangan. Selanjutnya dijelaskan oleh AFI (2016) bahwa program literasi keuangan merupakan investasi dalam mencapai inklusi keuangan masyarakat.

Dari pembahasan ini masyarakat dalam melakukan transaksi produk dan layanan jasa keuangan memiliki berbagai alternatif media yang dipilih dan dipakai. Media yang dapat dipilih adalah kantor lembaga jasa keuangan, ATM, *Internet Banking*, agen lembaga jasa keuangan, dan lainnya.

**Gambar 1.4**  
**Media Yang Dipakai Dalam Melakukan Transaksi Keuangan**

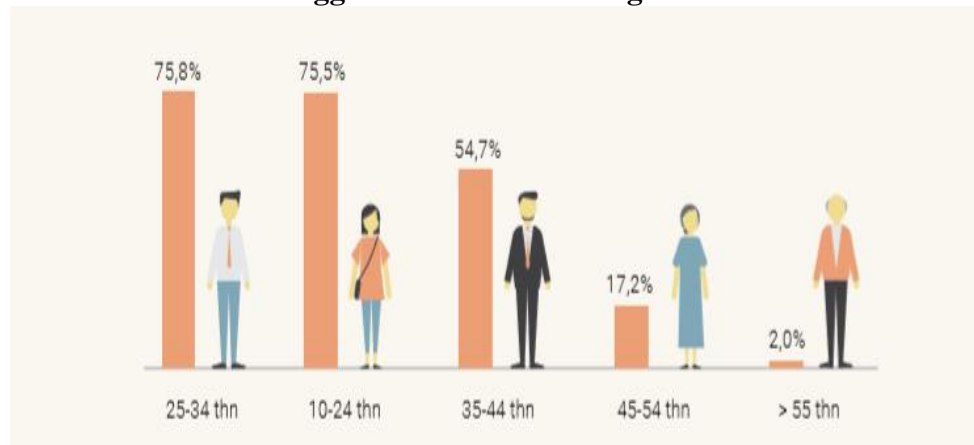


*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2016*

Rendahnya pemanfaatan media online untuk transaksi digital sangat disayangkan, menurut data APJII jumlah pengguna jasa internet di Indonesia sudah mencapai 132,7 juta orang dengan 65% pengguna internet berada di pulau Jawa (APJII, 2016). Melihat potensi pengguna internet yang cukup besar ini sebaiknya masyarakat lebih banyak menggunakan transaksi Keuangan Digital sebagai alat pembayaran. Penyebab kurang berkembangnya penggunaan pembayaran Keuangan Digital disebabkan infrastruktur jaringan khususnya di luar pulau Jawa yang sangat kurang. Diharapkan para penyedia infrastruktur dapat

mendukung program digitalisasi perbankan ini. Pengguna internet dilihat dari segi umur.

**Gambar 1.5**  
**Pengguna Internet Dari Segi Umur**

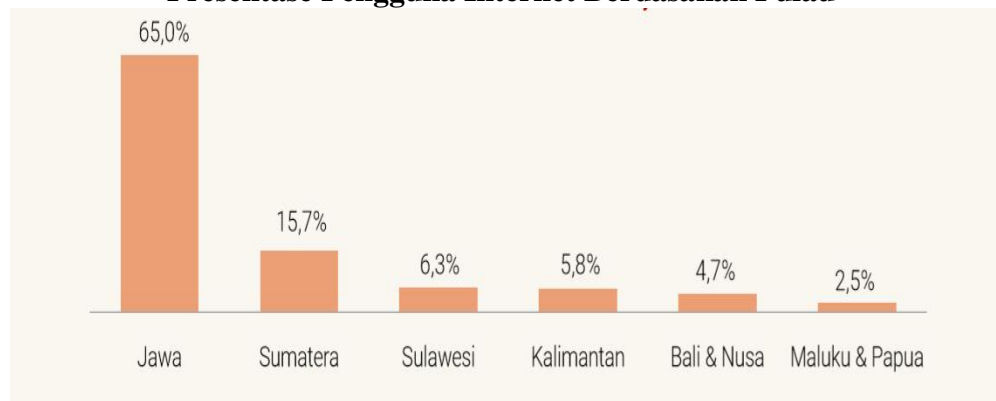


Sumber: APJII, 2016

Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan/atau keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik, namun dengan menggunakan sarana teknologi antara lain mobile based maupun web based dan jasa pihak ketiga (agen) dengan target layanan masyarakat unbanked dan underbanked. Layanan keuangan digital sekarang ini dikenal dengan nama *Financial Technology (Fintech)* atau *Electronic Money (E-money)*, berupa dompet elektronik (*E-Wallet*) yang aksesnya hanya menggunakan smartphone atau agen-agen perbankan yang bekerjasama. Perkembangan pengguna smartphone di Indonesia yang sangat besar diharapkan dapat memacu pertumbuhan layanan serta inklusi keuangan, Pertumbuhan layanan keuangan digital memungkinkan untuk berkembang pesat dikarenakan pertumbuhan pengguna smartphone yang meningkat setiap harinya. Pembayaran digital juga

sejatinya tidak hanya memudahkan masyarakat dalam hal pembayaran, tetapi juga membantu mendorong perekonomian Indonesia dengan meningkatkan inklusi keuangan melaluinya.

**Gambar 1.6**  
**Presentase Pengguna Internet Berdasarkan Pulau**



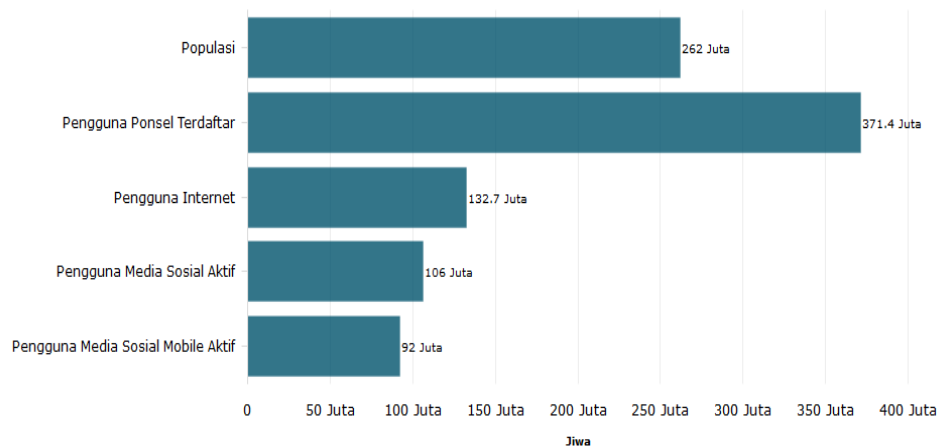
*Sumber: APJII, 2016*

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengguna internet ada di pulau Jawa, disusul dengan pengguna internet di Sumatera dan yang paling rendah ada di timur Indonesia dengan sedikitnya fasilitas yang disediakan oleh operator jaringan.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.05/2014 tentang sistem penerimaan negara secara elektronik dan memanfaatkan teknologi informasi. Elektronifikasi transaksi merupakan suatu upaya mengubah transaksi masyarakat yang semula dilakukan secara manual menjadi elektronik, dari metode pembayaran secara tunai menjadi non tunai, dengan perilaku transaksi keuangan yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi inklusif. Penerapan kebijakan pembayaran digital (*Digital Payment*) guna terciptanya *cashless society*, diperlukan dukungan dari berbagai pihak.

Semakin banyaknya masyarakat yang memiliki dan menggunakan smartphone, maka mereka secara mudah dapat mengunduh aplikasi transaksi keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan sehingga memudahkan dan mempercepat transaksi yang dilakukan. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah siap menghadapi era digitalisasi layanan keuangan.

**Gambar 1.7**  
**Pengguna Ponsel dan Penetrasi Media Sosial Tahun 2017**



*Sumber: Bank Indonesia, 2017*

. Perkembangan teknologi informasi membawa banyak perubahan dan pergeseran. Kesuksesan bisnis saat seperti *E-commerce* yang menggunakan layanan internet serta pembayaran digital untuk transaksinya. Transformasi mendesak dunia perbankan adalah digitalisasi layanan. Digitalisasi tidak hanya sekedar bertujuan memindahkan transaksi manual menjadi otomatis. Digitalisasi perbankan memiliki arti yang lebih luas terutama untuk memenuhi kebutuhan konsep bisnis, menyediakan layanan terkini guna menguatkan *customer*



*transaction behavior*. Munculnya perusahaan-perusahaan keuangan berbasis *fintech* membuat inklusi keuangan dan literasi keuangan menjadi lancar, karena *Fintech* memiliki teknologi dan inovasi yang menjangkau nasabah yang tidak dapat mengakses sistem perbankan.

*Asian Development Bank* (2016) menyatakan bahwa layanan keuangan digital pada umumnya mengacu pada ketersediaan teknologi untuk memberikan layanan keuangan dari penyedia jasa keuangan kepada cakupan konsumen yang luas, termasuk uang elektronik, *mobile money*, *card payments*, transfer biaya dalam bentuk elektronik. Selain itu, layanan keuangan digital juga dapat dimanfaatkan untuk layanan keuangan kredit dan asuransi. AFI (2016) juga menjelaskan bahwa layanan tersebut merupakan layanan keuangan yang dapat diakses secara digital dimana masyarakat tidak perlu menggunakan uang tunai dalam melakukan pembayaran maupun bertransaksi keuangan secara tradisional seperti mendatangi kantor bank.

Bank Indonesia mendefinisikan *Fintech* as “ *A phenomenon of fusion between technology and financial features that transform business models and a weak barrier to entry which lead to raises unregulated players to run the service as well as regulated financial-financial institution*”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Fintech*, *e-money* dan layanan digital keuangan sebenarnya memberikan pengaruh positif dalam kehadirannya bagi perekonomian secara makro. *Fintech* bisa menjangkau masyarakat hingga ke pelosok yang belum terjangkau oleh perbankan. Sedangkan perbankan sendiri tidak dapat menjangkau *fintech* karena terbentur regulasi. Ini mencerminkan masih terbukanya peluang pasar untuk perkembangan *fintech* bagi pengusaha-

pengusaha non perbankan. Dengan teknologi yang dimiliki *Fintech*, *e-money* serta digitalisasi perbankan kesemuanya dapat menjangkau masyarakat di pelosok pedesaan yang unbanked atau underbanked karena layanan tersebut tidak memerlukan antar cabang (*Branchless Banking*).

Dengan demikian masyarakat dengan mudah melakukan transaksi keuangan dengan mudah, sederhana, dan cepat. Dengan hanya mendatangi agen-agen *branchless banking* di daerah tempat tinggal mereka. Stereotip masyarakat bahwa menabung di bank adalah hal yang merepotkan, belum lagi tagihan perawatan buku tabungan per bulan yang mahal membuat masyarakat berfikir bahwa perbankan merugikan mereka dengan biaya yang sangat tinggi. Seua layanan keuangan digital ini memerlukan dukungan infrastruktur jaringan , regulator dan lembaga keuangan maupun pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya digitalisasi keuangan ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadarannya menabung di bank dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang telah menggunakannya. Serta mewujudkan masyarakat indonesia yang sadar inklusi keuangan dan *Well literate* dalam hal literasi keuangan. Harapan yang disampaikan penulis adalah semoga inovasi ini dapat memberikan layanan jasa keuangan kepada seluruh masyarakat indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti ***“Implementasi Financial Inclusion Strategic di Era Ekonomi Digital Terhadap Literasi Keuangan di Idonesia”***

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, maka didapat beberapa masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan lembaga keuangan bank dan non-bank
2. Susahnya akses ke lembaga keuangan bagi masyarakat pedesaan, serta pelayanan di lembaga keuangan yang kurang memadai.
3. Masih kurangnya dukungan infrastruktur jaringan untuk menyelenggarakan sistem keuangan digital bagi masyarakat pedesaan dan mewujudkan masyarakat yang *cashless society*.
4. Mahalnya biaya perawatan buku rekening yang dikenakan ke nasabah perbulan atau cenderung *Overcharging* yang membuat masyarakat pedesaan enggan menabung.
5. Kurangnya sosialisasi terhadap sistem pembayaran digital untuk masyarakat yang belum tercakup perbankan formal.

### **1.3. Batasan Masalah**

Ada banyak masalah yang bisa diangkat dari penelitian ini, namun penulis perlu membatasi masalah yang lebih terperinci dan jelas agar pemecahannya terarah. Jadi penelitian ini dibatasi pada masalah pemahaman tentang literasi keuangan masyarakat indonesia dan kesadaran dalam meningkatkan inklusi keuangan serta perkembangan layanan keuangan digital untuk mencakup .masyarakat pelosok dan pedesaan agar memudahkan akses keuangan masyarakat. Variabel yang dibatasi berupa Transaksi Keuangan Digital, PDRB-per kapita, Jumlah Pengguna Internet, *Fintech*, Infrastruktur Keuangan Digital dan tingkat literasi keuangan masyarakat daerah.

### **1.3.1 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah dan batasan masalah di atas dapat dikemukakan rumusan masalah berikut.

1. Bagaimana strategi OJK dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, khususnya masyarakat pedesaan?
2. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan dengan tingkat digitalisasi keuangan masyarakat?
3. Bagaimana tingkat penyebaran akses keuangan perbankan dan non bank se-Provinsi di Indonesia?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Melakukan analisis deskriptif kebijakan pemerintah dan OJK dalam meningkatkan keuangan inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia.
2. Melakukan estimasi pengaruh inklusi keuangan dengan tingkat digitalisasi keuangan masyarakat.
3. Melakukan analisis tipologi kelas dengan melihat tingkat penyebaran akses lembaga keuangan bank dan non bank masyarakat.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Manfaat akademik:**

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya layanan perbankan dan keuangan digital. Serta dampaknya bagi masyarakat
- b. Bagi Mahasiswa, melatih mahasiswa untuk dapat menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis, dan sistematis. Serta sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang terkait.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan literatur untuk penelitian yang akan datang.

**2. Manfaat Non akademik:**

- a. Sebagai bahan masukan dalam penetapan kebijakan pemerintah.
- b. Penelitian ini bertujuan sebagai penambahan pengetahuan bagi masyarakat.

## **BAB II**

### **Landasan Teori**

#### **2.1 Uraian Teori**

##### **2.1.1 Uang dan Lembaga Keuangan**

Dari sudut pandang ekonom, uang (*money*) merupakan stok aset-aset yang digunakan untuk transaksi. Uang adalah sesuatu yang diterima/dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi. Karena itu uang dapat berbentuk apa saja, tetapi tidak berarti segala sesuatu itu adalah uang. Sebagai alat transaksi; tetapi tidak semua kertas adalah uang, bukan karena harga kertasnya yang sangat murah, melainkan karena tidak diterima/dipercaya oleh masyarakat umum sebagai alat pembayaran. Kita pernah mendengar pada zaman dahulu ada uang logam yang terbuat dari emas. Uang dinar (emas) di Timur Tengah pada masa lampau merupakan uang yang tinggi nilainya. Di zaman modern ini, walaupun harga emas tetap masih tinggi, uang logam emas tidak lagi digunakan sebagai alat transaksi, karena kedudukannya telah digantikan oleh bentuk-bentuk uang yang lain.

##### 1) Uang Fiat (Fiat Money atau Token Money)

Uang fiat (*fiat money* atau *token money*) adalah komoditas yang diterima sebagai uang, namun nilai nominalnya jauh lebih besar dari nilai komoditas itu sendiri (nilai intrinsiknya atau *intrinsic value*-nya). Contoh paling mudah adalah uang kertas Rp100.000,00 yang anda terima. Nilai nominal uang kertas tersebut adalah jauh lebih tinggi dari nilai kertasnya. Tetapi mengapa masyarakat menerima bahwa selembar kertas yang nilainya tidak seberapa tersebut dapat digunakan untuk berbelanja senilai Rp100.000,00? Karena

pemerintah telah menetapkannya berdasarkan keputusan resmi, sehingga masyarakat mejadi percaya.

## 2) Uang Komoditas (Commodity money)

Uang komoditas (*commodity mone*) adalah uang yang nilainya sebesar nilai

komoditas itu sendiri. Contohnya, pada masa lalu nilai sekeping uang perunggu adalah lebih kecil dari nilai satu keeping uang perak nilainya lebih kecil dari nilai satu keing uang perak, tetapi satu keeping uang perak nilainya lebih kecil dari satu keeping uang emas, sebab nilai perunggu lebih murah dari perak, sedangkan nilai perak lebih murah dari emas.

## 3) Uang Hampir Likuid Sempurna ( Near Money)

Salah satu syarat suatu aset untuk dapat digunakan sebagai uang adalah likuiditasnya. Uang fiat dan uang komoditas adalah uang yang likuid sempurna, sehingga untuk dapat digunakan tidak perlu ditukarkan atau dicairkan terlebih dahulu. Selain kedua jenis uang tersebut ada juga aset finansial yang berfungsi sebagai uang namun untuk menggunakannya harus ditukarkan atau dicairkan terlebih dahulu. Misalnya, uang dalam bentuk cek (*demand deposit*) dapat diterima sebagai alat pembayaran. Namun tidak semua pelaku kegiatan ekonomi mau menerimanya. Bukan karena tidak dipercaya, tetapi bi;a ingin digunakan harus ditukarkan ke dalam bentuk uang kertas atau uang logam. Karena itu walaupun dapat digunakan sebagai uang, cek bukanlah substitusi sempurna bagi bagi uang kertas/logam. (Manurung & Rahardja, 2007)



### 2.1.1.1 Fungsi Uang

Uang memiliki empat fungsi penting yaitu sebagai satuan hitung (*Unit of account*), alat transaksi/pembayaran (*medium of change*), penyimpanan nilai (*store of value*), dan standar pembayaran di masa mendatang (*standard of deferred payment*).

#### 1) Satuan Hitung (*Unit of account*)

Yang dimaksud uang sebagai satuan hitung (*Unit of account*) adalah uang dapat memberikan harga suatu komoditas berdasarkan satu ukuran umum, sehingga syarat terpenuhinya *double coincidence of wants* (kehendak ganda yang selaras) tidak diperlukan lagi. Misalnya, jika harga sepotong celana jeans adalah Rp. 200.000 dan sepasang sepatu kulit yang bergaya *trendy* adalah Rp. 250.000, maka bila dina ingin membeli keduanya, dia harus menyiapkan uang sebesar Rp. 450.000. seandainya Dini memiliki lima ekor kambing yang harga seekornya adalah Rp. 100.000, dia tidak perlu membawa dua ekor ke toko celana dan dua setengah ekor ke toko sepatu. Yang Dini lakukan adalah menjual kelima kambingnya sehingga memperoleh Rp. 500.000, kemudian Rp. 200.000 dipakai untuk membeli celana jeans, Rp. Digunakan untuk membeli barang yang lain.

#### 2) Alat Transaksi (*Medium Of Change*)

Uang juga berfungsi sebagai alat transaksi (*medium of change*). Telah dikatakan, untuk dapat berfungsi sebagai alat tukar, uang harus diterima/mendapat jaminan kepercayaan. Dalam perekonomian modern ini, jaminan kepercayaan itu diberikan oleh pemerintah berdasarkan

undang-undang atau keputusan yang berkekuatan hukum. Dengan fungsinya sebagai alat transaksi, uang amat mempermudah dan mempercepat kegiatan pertukaran dalam perekonomian modern.

3) Penyimpan Nilai (*Store of Value*)

Fungsi uang sebagai penyimpan nilai (*store of value*) dikaitkan dengan kemampuan uang menyimpan hasil transaksi atau pemberian yang meningkatkan daya beli, sehingga semua transaksi tidak perlu dihabiskan saat itu juga. Misalnya Maya adalah peternak ayam. Bulan lalu maya menjual 1.000 ekor ayamnya dengan nilai Rp20 juta. Karena uang memiliki fungsi penyimpan nilai, Maya dapat menyimpan uang hasil penjualan ayamnya untuk digunakan dimasa yang akan datang.

4) Standar Pembayaran di Masa Mendatang (*Standard of Deffered Payment*)

Banyak sekali kegiatan ekonomi yang balas jasanya tidak diberikan saat itu juga. Para Pegawai umumnya setelah bekerja sebulan penuh baru mendapat gaji. Contoh lain adalah transaksi utang-piutang mungkin baru dapat diselesaikan tuntas dalam tempo belasan tahun. Pembayaran untuk masa mendatang tersebut dimungkinkan karena uang memiliki fungsi standar pembayaran di masa mendatang (*standar of deferred payment*). Dengan fungsi tersebut berapa balas jasa atau pembayaran di masa mendatang menjadi lebih mudah dihitung, karena diukur dengan daya beli (*purchasing power*), disbanding bila diukur dengan nilai komoditas tertentu.

### 2.1.1.2 Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dan menyalurkan dana, dengan motif mendapatkan keuntungan. Porsi terbesar asetnya merupakan aset finansial. Fungsi utama lembaga keuangan adalah sebagai perantara pihak-pihak yang membutuhkan uang modal (pemakai dana) dengan pihak-pihak yang memiliki (pemilik dana).

**Gambar 2.1**  
**Circular Flow Peranan Lembaga Keuangan**



Jika uang dapat dianalogikan sebagai darah yang dibutuhkan untuk kehidupan ekonomi, maka lembaga keuangan adalah jantungnya. Sebab melalui lembaga keuanganlah uang yang ada dalam perekonomian dihimpun dan dialirkan ke sector-sektor kegiatan yang membutuhkan. Tanpa adanya lembaga keuangan, tidak mungkin mengharapkan alokasi sumber daya keuangan yang efisien, karena pasar uang modal tidak dapat bekerja efisien, dari penjelasan di atas, lembaga

keuangan mempunyai fungsi dan peranan penting untuk meningkatkan efisiensi pasar uang modal. Lewat upaya lembaga-lembaga keuangan, kekuatan penawaran dan permintaan uang dipertemukan.

Yang dipertukarkan/dialihkan dalam pasar uang modal adalah hak penggunaan uang. Penawaran uang-modal berasal dari individu dana tau institusi yang bersedia menunda penggunaan uangnya. Misalnya anda menerima gaji sebesar Rp. 3 Juta per bulan. Dari sejumlah itu yang digunakan untuk kebutuhan hidup sampai mendapat gaji bulan berikutnya adalah Rp2 Juta. Sisanya sebesar Rp1 Juta sebenarnya dapat anda habiskan sekehendak hati. Pada saat berbelanja, anda menggunakan hak penggunaan yang. Jika tidak dipakai untuk konsumsi anda, anda dapat mengalihkannya ke pihak lain untuk sementara waktu, misalnya dalam bentuk tabungan berjangka atau saham. Untuk kesediaan mengalihkan hak penggunaan uang tersebut, anda memperoleh kompensasi berupa pendapatan bunga untuk tabungan atau dividen untuk saham. Jika pengalihan hak penggunaan uang tersebut kurang dari satu tahun, masuk dalam kategori pasar uang. Tetapi jika lebih dari setahun, masuk kategori pasar modal.

Uang yang anda simpan akan disalurkan oleh lembaga keuangan ke pihak-pihak yang membutuhkan (sisi permintaan), seperti perusahaan, pemerintah, dan individu. Mereka menggunakannya untuk kegiatan investasi, produksi, atau konsumsi. Bila mereka membutuhkan uang tersebut dalam tempo kurang dari setahun, mereka mencarinya di pasar uang. Bila lebih dari setahun mereka mencarinya di pasar modal.

Maka yang menjembatani antara sisi penawaran dan permintaan inilah yang disebut sebagai lembaga keuangan. Motivasi usaha mereka adalah untuk

memperoleh keuntungan. Besarnya keuntungan yang diperoleh adalah selisih antara biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghimpun dana dari pemilik dengan pendapatan yang diperoleh dari para pengguna dana.

Lembaga keuangan yang dalam menjalankan fungsi intermediasinya diizinkan menghimpun dan menyalurkan dana-dana dalam bentuk tabungan disebut lembaga keuangan depositori (*depository financial institution*). Lembaga yang masuk dalam kategori ini adalah perbankan. Sedangkan lembaga keuangan yang dalam menjalankan usahanya tidak diizinkan menghimpun dana dalam bentuk tabungan disebut lembaga keuangan nondepositori (*nondepository financial institution*), yang disebut juga sebagai lembaga keuangan bukan bank (LKBB).

#### 2.1.1.2.1 Lembaga Keuangan Perbankan (*Banking Financial Institution*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7/1992 (sebagaimana diubah dengan UU No. 10/1998) tentang perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Selanjutnya undang-undang tersebut mengklasifikasikan bank menjadi dua kelompok, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

##### 1) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha bank umum antara lain adalah:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b) Memberikan kredit
- c) Menbitkan surat pengakuan utang
- d) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya; dan
- e) Kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Kegiatan usaha yang tidak boleh dilakukan oleh bank umum adalah:

- a) Melakukan penyertaan modal, kecuali dalam hal tertentu seperti yang diatur dalam undang-undang
- b) Melakukan usaha perasuransian; dan
- c) Melakukan usaha lain seperti yang diatur undang-undang

## 2) Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi BPR adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dana tau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Kegiatan-kegiatan usaha yang diperbolehkan dilakukan oleh BPR menurut undang-undang adalah:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
- b) Memberikan kredit

- c) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil dan
- d) Menempatkan dananya dalam SBI, deposito dana tau tabungan pada bank lain

Kegiatan usaha yang tidak diperkenankan dilakukan oleh BPR di antaranya adalah:

- a) Menerima simpanan dalam bentuk giro
- b) Melakukan penyertaan modal
- c) Melakukan usaha perasuransian dan
- d) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha tersebut di atas

#### 2.1.1.2.2 Bank Sentral (*Central Bank*)

Fungsi utama paling mendasar dari sebuah bank sentral suatu negara adalah mengatur jumlah uang beredar dalam perekonomian (*to manage nations money supply*). Tetapi dalam praktiknya, bank sentral menjalankan banyak fungsi mulai dari penanganan penyelesaian Giro (*clearing and collecting check*) sampai kepada pemberian izin, pembinaan, dan pengawasan perbankan.

Bertambah besarnya fungsi-fungsi bank sentral memang sulit dihindari, karena dunia nyata tidaklah seideal yang dibayangkan. Aspek politis dan historis sangat mewarnai dan memengaruhi perkembangan perbankan di setiap negara. Bahkan di negara-negara kapitalis yang mengandalkan mekanisme pasar, perluasan fungsi bank sentral tak terhindari. Secara umum ada beberapa fungsi utama bank sentral dalam dunia nyata:

- 1) Agen Fiskal pemerintah (*Fiscal agent of government*)

Dimana bank sentral berfungsi sebagai penasihat dan, memberi bantuan untuk mengelola berbagai masalah/transaksi keuangan pemerintah. Misalnya

memberi pinjaman kepada pemerintah dan menyimpan aset-aset finansial milik pemerintah.

2) Banknya bank (*Banker of bank*)

Bank sentral memberi bantuan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Fungsi ini juga dikenal sebagai *lender of the last resort*.

3) Menentukan Kebijakan Moneter (*Monetary Policy Market*)

Dalam hal ini terutama adalah pengendalian jumlah uang beredar sebagai bagian dari kebijakan ekonomi yang bertujuan mengarahkan kondisi makroekonomi ke arah yang lebih baik dan diinginkan.

4) Pengawasan, evaluasi, dan pembinaan perbankan (*supervision, examination, and regulation of members bank*)

Salah satu alasan yang mendasari pentingnya fungsi ini adalah karena ketidaksempurnaan pasar (industri perbankan). Hal ini akan menimbulkan eksternalitas yang merugikan (*diseconomies externalities*). Melalui fungsi ini bank sentral akan meminimumkan eksternalitas merugikan dan memaksimalkan eksternalitas menguntungkan dari industri perbankan.

5) Penanganan Transaksi Giro (*The clearing and collection of checks*)

Dengan fungsi ini bank sentral mengefisienkan kegiatan-kegiatan transaksi yang menggunakan alat pembayaran giro, sebab transaksi tersebut terjadi dalam jumlah yang besar, antarbank, antarwilayah, dan antarnegara. Tanpa bantuan bank sentral, bank-bank secara individu tidak dapat menyelesaikan transaksi-transaksi tersebut.

6) Riset-riset Ekonomi (*Economic Research*)



Riset-riset ekonomi yang dilakukan bank sentral terutama adalah yang berkaitan dengan masalah-masalah dan perkembangan sector moneter. Riset-riset ini dibutuhkan sebagai masukan dalam penentuan kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan moneter.

Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Negara Republik Indonesia didirikan pada tahun 1953 dengan mengubah status De Javasche Bank N.V. (yang dinasionalisasi di tahun 1951) menjadi bank sentral Indonesia. Dasar hukum pedirian BI adalah Undang-Undang Nomor 11/1953.

Sama halnya dengan bank sentral di negara-negara lainnya, BI mengalami perubahan kedudukan dan fungsi pokoknya, yang merupakan konsekuensi dari perkembangan sejarah, politik dan ekonomi di Indonesia. Dilihat dari perubahan undang-undangnya, sejak 1953 BI telah mengalami dua kali perubahan kedudukan dan fungsi pokok. Perubahan pertama dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13/1968, sedangkan perubahan kedua berdasarkan Undang-Undang Nomor 23/1999. Perubahan-perubahan tersebut diringkas dalam tabel berikut

**Tabel 2.1**

**Perkembangan status dan fungsi pokok Bank Indonesia, berdasarkan Undang-Undang tentang Bank Sentral**

	UU No. 11/1953	UU No. 13/1968	UU No. 23/1999
Kepemimpinan	- Dewan Moneter - Dewan Direksi - Dewan Penasihat	- Dewan Direksi	- Dewan Gubernur
Status dan Tugas-tugas utama	- Bank Sentral - Mengatur Peredaran uang - Pemegang Kas Negara	- Bank Sentral - Mengatur Peredaran uang - Memegang kas negara - Mengelola devisa	- Bank Sentral - Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter - Mengatur dan

		negara	menjaga kelancaran system pembayaran mengatur dan mengawasi bank
Hubungan Keuangan Dengan Pemerintah	Dapat memberikan uang muka (kredit) kepada pemerintah, maksimum 30% dari penghasilan selama 1 tahun anggaran.	Dapat memberikan uang muka (kredit) sesuai dengan kebutuhan pemerintah dengan mengenakan bunga 3% per tahun	- Dilarang memberikan kredit kepada pemerintah - Bank Indonesia membagi sisa surplus usahanya kepada pemerintah, setelah dipotong 30% dengan tujuan, 10% cadangan umum dengan ketentuan setelah dipotong terlebih dahulu kewajiban pemerintah kepada bank Indonesia

Tabel di atas menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tetap memandang fungsi utama bank sentral adalah sama seperti bank sentral di negara lainnya, terutama fungsi pengaturan peredaran uang. Yang berbeda dari undang-undang tersebut dalam aspek kepemimpinan dan hubungan dengan pemerintah. Dalam UU No. 23/1999, aspek penting yang dikedepankan adalah independensi bank sentral, dalam arti bank sentral harus bebas dari campur tangan pemerintah. Wujud independensi itu terlihat dalam dua hal, yaitu: 1) aspek kepemimpinan dan kewenangan BI, 2) hubungan keuangan dengan pemerintah.

#### 1) Kepemimpinan dan Kewenangan Bank Indonesia

Berdasarkan UU No. 23/1999 (Pasal 41), gubernur dan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia diusulkan dan diangkat oleh aPresiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan ketentuan ini Presiden tidak lagi mempunyai kemampuan intervensi terhadap kepemimpinan dan kewenangan BI.

## 2) Hubungan Keuangan Dengan Pemerintah

Berdasarkan UU No. 23/1999, Bank Indonesia tidak diizinkan lagi memberikan pinjaman kepada pemerintah demi menjaga independensinya (Pasal 56). Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan undang-undang sebelumnya dimana BI boleh memberikan pinjaman kepada pemerintah. Pasal 62 UU No. 23/1999 menyatakan bahwa BI wajib membagi hasil kegiatan usahanya kepada pemerintah berdasarkan pembagian yang ditetapkan.

### 2.1.1.2.3 Lembaga Keuangan Bukan Perbankan (*Non Banking Financial Institution*)

Sebagai lembaga keuangan yang tidak diizinkan menghimpun dana dalam bentuk tabungan, maka kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan LKBB adalah mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membiayai kegiatan investasi dana tau konsumsi individu perusahaan. Beberapa LKBB yang umumnya terdapat di dalam suatu perekonomian adalah perusahaan asuransi, lembaga dana pensiun, perusahaan investasi, perusahaan pembiayaan, dan pegadaian.

#### 1) Perusahaan Asuransi

Produk jasa yang ditawarkan perusahaan asuransi adalah perlindungan finansial untuk menghadapi berbagai hal yang kurang menguntungkan, misalnya kecelakaan, sakit keras bahkan kematian. Perusahaan asuransi merupakan

sumber dana jangka panjang yang amat potensial bagi sector swasta. Sebab uang yang dipegang perusahaan asuransi sangat besar, sedangkan kewajibannya baru jatuh tempo dalam jangka waktu yang sangat panjang.

## 2) Lembaga Dana Pensiun

Lembaga ini menawarkan jasa berupa persiapan dana pensiun. Bagi pegawai perusahaan swasta, jasa dana pension dapat memberikan ketenangan dan jaminan hari tua, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Lembaga dana pension juga merupakan sumber dana potensial bagi dunia usaha. Sebab, sama seperti perusahaan asuransi, kewajiban dana pensiun baru jatuh tempo dalam jangka waktu yang sangat panjang, sehingga menjadi sumber dana jangka panjang.

## 3) Perusahaan Investasi

Produk yang ditawarkan perusahaan investasi adalah diversifikasi (*Diversification*). Yang dimaksud dengan diversifikasi adalah peningkatan kemampuan memabeli atau memiliki berbagai jenis atau tipe aset finansial.

## 4) Perusahaan Pembiayaan

LKBB umumnya mengumpulkan dana dari individu/organisasi dalam jumlah-jumlah kecil, kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman berskala besar. Tetapi lembaga pembiayaan melakukan hal yang sebaliknya, karena meminjam dalam bentuk pinjaman skala besar, kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kecil-kecil kepada individu atau unit usaha kecil.

Di Indonesia berdasarakan Keppres No. 61/1988, kegiatan-kegiatan usaha yang masuk dalam lingkup perusahaan pembiayaan adalah: sewa guna (*leasing*),

modal ventura (*capital venture*), anjak piutang (*factoring*). Pembiayaan konsumen (*consumer finance*), kartu kredit (*credit card*), dan perdagangan surat-surat berharga (*securities company*). Dalam perkembangan selanjutnya, di tahun 1989 bidang usaha penjualan surat berharga dikeluarkan dari lingkup perusahaan pembiayaan. Tahun 1995, bidang usaha modal ventura menyusul dikeluarkan dari ruang lingkup perusahaan pembiayaan.

#### 5) Pegadaian

Pegadaian merupakan lembaga perkredian berdasarkan hukum gadai. Lembaga ini awalnya berkembang di Italia yang kemudian menyebar ke wilayah-wilayah Eropa lainnya. Praktik pegadaian di Indonesia di rintis oleh orang Belanda melalui VOC.

Lembaga pegadaian pada prinsipnya memberi bantuan keuangan dengan jaminan aset peminjaman, yang diserahkan kepada lembaga pegadaian. Aset tersebut akan dikembalikan bila peminjam telah melunasi utang beserta bunganya. Besarnya pinjaman yang dapat diberikan sekitar 80-80% dari nilai perkiraan (nilai taksir) aset yang digadaikan. Peminjam dapat melunasi utangnya setiap saat, tanpa harus menunggu jatuh tempo.

Karena prosedur peminjamannya sangat sederhana, mudah dan cepat, pegadaian di Indonesia termasuk sumber dana yang banyak diminati masyarakat, terutama masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. (Manurung & Rahardja, 2007)

### **2.1.2 Keuangan**

Pada literatur *Finance the Basic*, dijelaskan bahwa keuangan adalah suatu pembelajaran mengenai konsep, pengaplikasian, dan sistem yang dapat mempengaruhi kekayaan seorang individu, perusahaan bahkan negara, baik dalam waktu jangka pendek ataupun jangka panjang. Keuangan juga mengidentifikasi motivasi atau tujuan dari suatu tindakan serta penentuan pengambilan keputusan.

Transaksi keuangan bukan hanya ketika melakukan simpanan pada bank saja transaksi keuangan juga terjadi ketika melakukan transaksi dengan pasar saham, melakukan pembelian secara kredit, melakukan pinjaman uang kepada bank atau menerbitkan surat utang, ataupun ketika suatu negara menerbitkan surat utang.

Melakukan transaksi keuangan tentu harus mengenal resiko yang ada pada transaksi tersebut. Resiko perlu untuk dikelola karena dalam pengambilan keputusan keuangan ada banyak ketidakpastian yang perlu dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Pelaku transaksi keuangan harus mengenal resiko-resiko atau segala ketidakpastian yang ada untuk bisa mengoptimalkan keuntungan yang bisa didapatkan. Ketika ada resiko yang terlalu besar, maka ada kemungkinan transaksi keuangan gagal atau menimbulkan kerugian. Tetapi ketika mengambil resiko yang terlalu sedikit juga mengurangi peluang untuk menciptakan keuntungan yang lebih banyak. Maka dari itu, resiko harus dikelola dengan baik agar bisa memberikan keuntungan optimal ketika melakukan transaksi keuangan.

Literasi keuangan meliputi beberapa pengetahuan umum yaitu, pengetahuan umum tentang keuangan. Menurut S.P Wagland dan S. Taylor (2009) pengetahuan tentang keuangan mencakup pengetahuan keuangan pribadi, yakni bagaimana mengatur pendapatan dan pengeluaran, serta memahami konsep dasar keuangan tersebut mencakup perhitungan tingkat bunga sederhana, bunga majemuk, pengaruh inflasi, *opportunity cost*, nilai waktu uang, likuiditas suatu aset, dan lain-lain.

Tabungan dan Pinjaman menurut Garman dan Fogue (2010), tabungan adalah akumulasi dana berlebih yang diperoleh dengan sengaja mengonsumsi lebih sedikit dari pendapatan. Dalam pemilihan tabungan, ada enam faktor yang perlu dipertimbangkan (Kapoor et.al, 2010) yaitu, (1) Tingkat pengembalian (presentase kenaikan tabungan), (2) inflasi (perlu dipertimbangkan dengan tingkat pengembalian karena dapat mengurangi daya beli), (3) pertimbangan pajak, (4) likuiditas, (5) keamanan, (6) pembatasan-pembatasan dan *fee*.

Asuransi menurut Mehr dan Cammack (1980) asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit eksposur (*exposure*) dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan. Kemudian, kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul oleh mereka yang tergabung (rantai tanggung)

Investasi menurut Garman dan Fogue (2010) investasi adalah menyimpan atau menempatkan uang agar bisa bekerja sehingga dapat menghasilkan uang yang lebih banyak. Cara yang sering digunakan seseorang dalam berinvestasi yakni dengan meletakkan uang ke dalam surat berharga termasuk saham, obligasi dan reksadana, atau dengan membeli real estate

### 2.1.3 Literasi Keuangan

*Organisation for Economic Co-operation and Development* atau OECD (2016) mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan resiko keuangan, berikut keterampilan, motivasi, serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya tersebut dalam rangka membuat keputusan keuangan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan (*financial well being*) individu dan masyarakat, dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi. Remund (2010) menyatakan bahwa literasi keuangan, dan memiliki kemampuan dan keyakinan untuk mengatur keuangan pribadi melalui pengambilan keputusan jangka pendek yang tepat, perencanaan keuangan jangka panjang, serta memperhatikan kejadian dan kondisi ekonomi. Huston (2010) mengatakan literasi keuangan meliputi kesadaran dan pengetahuan akan instrumen keuangan dan aplikasinya di dalam bisnis dan kehidupannya.

Carpena et. al (2011) menyatakan ada 3(tiga) dimensi dari literasi keuangan yaitu (1) keterampilan menghitung (2) pemahaman tentang keuangan dasar, dan (3) sikap terhadap keputusan keuangan. Sedangkan Willis (2008) menyatakan bahwa pengetahuan dalam konteks literasi keuangan meliputi pengetahuan, edukasi, dan informasi mengenai keuangan dan sumbernya, perbankan, deposito, kredit, asuransi dan pajak.

OECD (2006) menjelaskan bahwa tanpa memiliki literasi keuangan yang memadai, individu tidak dapat memilih produk tabungan ataupun investasi yang sesuai untuk dirinya dan beresiko terkena risiko *fraud*. Peneliti World Bank, Xu dan Zia (2012) menemukan bahwa di negara maju, literasi keuangan berkorelasi



dengan perencanaan masa pensiun dan berasosiasi terhadap kebiasaan investasi yang lebih canggih.

Pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh seseorang tersebut kemudian berkembang menjadi keterampilan keuangan, dimana keterampilan keuangan itu sendiri didefinisikan sebagai kemampuan dalam menerapkan pengetahuan keuangan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari (Palameta et.al, 2016). Keterampilan keuangan memungkinkan seseorang untuk dapat mengambil keputusan yang rasional dan efektif terkait dengan keuangan dan sumber ekonominya (Kurihara, 2013). Berbagai studi menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki peran yang strategis untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan individu. Modigliani dan Brumberg (1954) serta Friedman (1957) dalam Lusardi & Mitchell (2007) menjelaskan bahwa konsumen diposisikan untuk mengatur simpanan dan pengeluaran secara optimal agar memberikan manfaat sepanjang masa hidupnya. Kesimpulan dari studi lain yang dilakukan oleh

Lusardi & Mitchell (2007) mengindikasikan bahwa rumah tangga yang memiliki literasi keuangan rendah cenderung tidak merencanakan masa pensiunnya dan memiliki aset yang rendah. Sedangkan Adams dan Rau (2011) menegaskan bahwa literasi keuangan mempunyai peran utama dalam persiapan masa pensiun. Riset menunjukkan bahwa pemahaman prinsip-prinsip dasar menabung, seperti *compound interest* mempunyai pengaruh langsung pada persiapan keuangan di hari tua. Boom et.al (2011) juga mengemukakan bahwa individu yang memiliki literasi keuangan lebih siap dalam melakukan perencanaan keuangan pribadinya. Dalam penelitian lain, Carpena et.al (2011) menemukan bahwa edukasi keuangan

mempengaruhi kesadaran dan sikap seseorang terhadap produk keuangan dan penggunaan berbagai instrumen perencanaan keuangan yang tersedia.

Literasi keuangan dalam dunia keuangan merupakan konsep yang baru, meskipun sejarah telah menunjukkan bahwa literasi keuangan sudah dimulai sejak tahun 1787 pada saat John Adam menulis surat yang ditujukan kepada Thomas Jefferson mengenai perlunya literasi keuangan. Sampai saat ini banyak pengertian mengenai literasi keuangan mulai dari kesadaran dan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan keuangan dalam praktiknya konsep ini sering tumpang tindih.

“Financial Literacy adalah pengambilan keputusan individu yang menggunakan kombinasi dari beberapa keterampilan, sumber daya, dan pengetahuan kontekstual untuk mengolah informasi dan membuat keputusan berdasarkan dengan resiko keuangan dari keputusan tersebut”.

Pengetahuan keuangan dapat digunakan untuk alat dalam pengambilan keputusan keuangan. Selain pengetahuan keterampilan dan sumber daya juga mempengaruhi keputusan, seorang individu harus memiliki keterampilan dalam membaca, menganalisis serta mengatur keuangan mereka agar lebih baik. Keterampilan keuangan setiap orang tentunya berbeda-beda tergantung bagaimana mereka memaksimalkan keterampilan yang dimiliki dan sumber daya yang ada. sumber daya keuangan harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar tidak kekurangan dan hidup akan sejahtera.

Literasi keuangan adalah mencakup kemampuan untuk membedakan pilihan keuangan, membahas uang dan masalah keuangan tanpa ketidaknyamanan, merencanakan masa depan, dan menanggapi kompeten untuk peristiwa kehidupan yang mempengaruhi keputusan keuangan sehari-hari,

termasuk peristiwa di ekonomi secara umum. Literasi keuangan terjadi manakala seorang individu memiliki sekumpulan keahlian dan kemampuan yang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Literasi keuangan membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Semakin meningkatnya kompleksitas ekonomi, kebutuhan individu dan produk keuangan, individu harus memiliki literasi keuangan untuk mengatur keuangan pribadinya.

Sedangkan tujuan pembangunan Literasi keuangan untuk jangka panjang adalah

1. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate*.
2. Meningkatkan jumlah pengguna produk Jasa Keuangan.

Namun demikian, menurut OJK, tujuan Literasi keuangan tersebut tidak dapat tercapai dengan optimal apabila faktor-faktor eksternal lainnya tidak mendukung. Faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi keberhasilan literasi keuangan tersebut antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Pendapatan Per kapita
3. Distribusi Pendapatan
4. Tingkat Kemiskinan Masyarakat
5. Tingkat Pendidikan Masyarakat
6. Komposisi Penduduk Yang Berusia Produktif, dan
7. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan sebagai pengetahuan keuangan, dengan tujuan mencapai kesejahteraan. Hal ini dapat dimaknai bahwa persiapan perlu dilakukan untuk menyongsong globalisasi, dan lebih spesifiknya yaitu globalisasi dalam bidang keuangan. Hilgert, Holgart juga menyatakan bahwa diperlukan pengetahuan tentang bagaimana mengelola keuangan serta bagaimana teknik berinvestasi menjadi hal yang tidak dapat diabaikan lagi seperti waktu-waktu sebelumnya. Pengetahuan keuangan yang kurang tinggi, dan hal ini dapat menyebabkan tidak terarah dengan tepat pada saat membuat keputusan keuangan setiap hari. Luasardi dan mitchell mendefinisikan melek keuangan sebagai pengetahuan keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya. Sementara menurut RPOJK literasi dan inklusi keuangan, menerangkan bahwa literasi keuangan adalah pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), dan keterampilan (*skill*), yang mempengaruhi sikap (*attitude*), dan perilaku (*behaviour*), untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

#### 2.1.3.1 Klasifikasi dan Tingkat Literasi Keuangan

Pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

1. *Well Literate* (21,84%), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

2. *Sufficient Literate* (75,69%), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
3. *Less Literate* (2,06%), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
4. *Not Literate* (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan, serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Literasi keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu:

1. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate*.
2. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

Agar masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi masyarakat, literasi keuangan memberikan manfaat yang besar, seperti:

- a. Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan, memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik.
- b. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas.

- c. Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan.

Literasi keuangan juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.

#### **2.1.4 Inklusi Keuangan**

*Consulative Group to Assist the Poor* (CGAP, 2016) menjelaskan inklusi keuangan sebagai akses yang dimiliki oleh rumah tangga dan bisnis terhadap penggunaan produk dan layanan jasa keuangan secara efektif. Produk dan layanan jasa keuangan tersebut harus tersedia secara berkelanjutan dan teregulasi dengan baik. *Center for Financial Inclusion* (CFI, 2016) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai akses terhadap produk keuangan yang sesuai termasuk, kredit, tabungan, asuransi dan pembayaran, tersedianya akses yang berkualitas. Termasuk kenyamanan, keterjangkauan, kesesuaian dan dengan memperhatikan perlindungan konsumen, serta ketersediaan tersebut diberikan kepada semua orang. Selanjutnya, masyarakat juga diharapkan mendapatkan informasi dan ammpu membuat keputusan pengelolaan keuangan yang baik. Dismping itu, CFI juga menyebutkan pentingnya keberagaman penyedia jasa dan pasar yang kompetitif dengan infrastruktur yang kuat serta kerangka regulasi yang jelas.

*World Bank* (2016) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun usahanya dalam hal initransaksi,

pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi yang digunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sementara, AFI (2010) menyebutkan bahwa kualitas merupakan kesesuaian produk dan layanan jasa keuangan dengan kebutuhan masyarakat yang dilihat diantaranya dari pengalaman konsumen. Selain itu kualitas juga dapat diartikan sebagai pilihan yang tersedia bagi konsumen, serta pemahaman konsumen terhadap produk dan layanan jasa keuangan (World Bank, 2015). Dari definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa unsur yang berperan dalam inklusi keuangan adalah akses, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan.

Akses adalah infrastruktur yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan agar masyarakat dapat menjangkau baik lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang bersifat formal Akses adalah infrastruktur yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan agar masyarakat dapat menjangkau baik lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan lainnya. Akses ke lembaga keuangan yang dibutuhkan seluruh golongan masyarakat agar setiap orang mampu memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan. Bukan hanya penggunaan produk dan layanan jasa keuangan yang menjadi fokus, akan tetapi bagaimana jasa keuangan yang digunakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.. Contoh perluasan akses keuangan antara lain:

1. Penambahan jaringan kantor
2. Penambahan jumlah agen
3. Penambahan jumlah ATM
4. Penambahan *point of acces* melalui layanan digital
5. Persiapan infrastruktur berbentuk fasilitas nir kantor (*branchless*)

6. Penambahan kerja sama dengan pihak lain
7. Pengembangan *delivery channel* atau saluran distribusi produk dan layanan jasa keuangan

Ketersediaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan yang dibutuhkan oleh seluruh golongan masyarakat agar setiap golongan tersebut mampu memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing. Dalam hal ini lembaga jasa keuangan perlu menyediakan produk dan layanan jasa keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan perlu disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masyarakat yang dapat dijangkau baik dari segi harga maupun aksesnya.

Penggunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan oleh masyarakat merupakan tujuan akhir dari inklusi keuangan sehingga diharapkan masyarakat bukan hanya menikmati produk dan layanan jasa keuangan yang digunakannya, melainkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kualitas merupakan kondisi dimana produk dan layanan jasa keuangan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan tersebut. Kualitas dalam hal ini, dapat diartikan pula penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat sehingga frekuensi penggunaannya relatif tinggi.

Untuk mewujudkan program-program yang diadakan oleh pemerintah ataupun pihak lainnya dalam rangka mengembangkan finansial inklusif, maka dibentuklah program Strategi Nasional Keuangan Inklusif sebagai pedoman program-program pengadaan finansial inklusif. SNKI memiliki 6 pilar finansial inklusif yang



dijadikan strategi untuk mensukseskan finansial inklusif, berikut adalah gambaran dari kerangka finansial inklusif yang diambil dari Bank Indonesia.

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Kerja Umum Keuangan Inklusif**



Kerangka kerja umum keuangan inklusif dibangun atas enam pilar sbb:

1. Edukasi Keuangan. Bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat luas tentang produk-produk dan jasa-jasa keuangan yang ada dalam pasar keuangan formal, aspek perlindungan konsumen dan pemahaman manajemen risiko. Ruang lingkup edukasi keuangan ini meliputi: a) pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan, b) pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan, c)
2. Fasilitas Keuangan Publik. Strategi pada pilar ini mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi: a) subsidi bantuan sosial, b) pemberdayaan masyarakat, c) pemberdayaan UMKM

3. Pemetaan Informasi Keuangan. Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terutama yang sebenarnya dikategorikan tidak layak untuk menjadi layak atau dari *unbankable* menjadi *bankable* oleh institusi keuangan formal, terutama kaum miskin produktif serta usaha mikro kecil. Inisiatif yang dilakukan di pilar ini meliputi: a) peningkatan kapasitas (melalui penyediaan pelatihan dan bantuan teknis, b) sistem jaminan alternatif (lebih sederhana namun tetap memperhatikan risiko terkait), c) penyediaan layanan kredit yang lebih sederhana, d) identifikasi nasabah potensial.
4. Kebijakan/Peraturan Yang Mendukung. Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia guna meningkatkan akses layanan jasa keuangan. Inisiatif untuk mendukung pilar ini antara lain meliputi: a) Kebijakan mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, b) Menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, c) mendorong perubahan ketentuan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian secara proporsional, d) menyusun peraturan mekanisme penyaluran dana bantuan melalui perbankan, e) Memperkuat landasan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan, f) Menyusun kajian yang berkaitan dengan keuangan inklusif untuk menentukan arah kebijakan secara berkelanjutan.
5. Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi. Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen

potensial di masyarakat dan memperluas jangkauan layanan jasa keuangan dengan memanfaatkan metode distribusi alternatif. Beberapa aspek pada pilar ini meliputi: a) Fasilitasi forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga keuangan dengan kelompok masyarakat produktif (layak dan *unbanked*) untuk mengatasi masalah informasi yang asimetris, b) peningkatan kerjasama antar lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha, c) eksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa dan saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian.

6. Perlindungan Konsumen. Bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan. Komponen yang berada pada pilar ini meliputi: a) transparansi produk, b) penanganan keluhan nasabah, c) mediasi, d) edukasi konsumen.

Keenam pilar tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam program-program yang telah disesuaikan dengan kategori penduduk yang dilaksanakan oleh bank Indonesia dan kementerian terkait. Beberapa contoh program yang tengah dilakukan adalah sbb:

**Tabel 2.2**  
**Sasaran Keuangan Inklusif**

Pilar dan Sasaran	Kelompok Pekerja Migran dan Kelompok Masyarakat di Daerah Terpencil			
	Sangat Miskin	Miskin Bekerja / Produktif	Hampir Miskin	Tidak Miskin
Edukasi Keuangan	Edukasi Keuangan kepada Masyarakat (pelajar, TKI, masyarakat umum)			
	Kampanye peningkatan budaya menabung			
	Financial Literacy Survey			
	Mini website khusus informasi dan edukasi konsumen			
Pemetaan Informasi Keuangan	Financial Identity Number			
	Credit Rating Agency untuk UMKM			
	Biro Informasi Kredit			
	Database UMKM			
Kebijakan/Peraturan Pendukung	Kebijakan Multilicensing			
	Kebijakan Start-up Credit			
	Kebijakan Layanan Keuangan Digital <sup>2</sup>			
	Kebijakan Asuransi Mikro			
Fasilitasi Intermediasi & Distribusi	TabunganKu			
	Sertifikasi Tanah			
	Mobile Financial Services, Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU)			
	Layanan Keuangan Digital <sup>2</sup>			
	Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD)			
	Start up credit			
Fasilitas Keuangan Publik	PKH Non-Tunai			
	APEX Bank			
	Program Linkage, kluster ekonomi, konsultan keuangan mitra bank, lending model, dan baseline economic survey			
	BSM Non-Tunai			
Perlindungan Konsumen	PNPM Dana Bergulir			
	KUR			
	Transparansi Produk			
	Unit khusus penanganan keluhan nasabah			
	Mediasi Perbankan			

#### 2.1.4.1 Indikator Keuangan Inklusif

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan keuangan inklusif diperlukan suatu ukuran kinerja. Dari beberapa referensi, indikator yang dapat dijadikan ukuran sebuah negara dalam mengembangkan keuangan inklusif adalah.

1. **Ketersediaan/akses.** Mengukur kemampuan pengguna jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga.
2. **Penggunaan.** Mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (a.l. keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan).
3. **Kualitas.** Mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan.
4. **Kesejahteraan.** Mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa.

Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, perbankan berperan besar untuk menjadi motor penggerak kegiatan keuangan inklusif mengingat perbankan

Indonesia memiliki *Share* kegiatan keuangan sampai dengan 80%. Namun demikian keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas bank Indonesia, namun juga pemerintah dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Keuangan inklusif ini merupakan strategi pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Melalui strategi nasional keuangan inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur.

Visi keuangan inklusif dapat dijabarkan dalam beberapa tujuan berikut:

1. Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Keuangan inklusif adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih luas, yaitu penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta bagian dari strategi untuk mencapai stabilitas sistem keuangan.
2. Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep keuangan inklusif harus dapat memenuhi semua kebutuhan yang berbeda dari segmen penduduk yang berbeda melalui serangkaian layanan holistik yang menyeluruh.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan. Hambatan utama dalam keuangan inklusif adalah tingkat pengetahuan keuangan yang rendah. Pengetahuan ini penting agar masyarakat merasa lebih aman berinteraksi dengan lembaga keuangan.

4. Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Hambatan bagi orang miskin untuk mengakses layanan keuangan umumnya berupa masalah geografis dan kendala administrasi. Menyelesaikan permasalahan tersebut akan menjadi terobosan mendasar dalam menyederhanakan akses ke jasa keuangan.
5. Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non bank. Pemerintah harus menjamin tidak hanya pemerdayaan kantor cabang, tetapi juga peraturan yang memungkinkan perluasan layanan keuangan formal. Oleh karena itu, sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro (LKM), dan lembaga keuangan bukan bank menjadi penting khususnya dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan.
6. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan layanan keuangan. Teknologi dapat mengurangi biaya transaksi dan memperluas sistem keuangan formal melampaui sekedar layanan tabungan dan kredit. Namun, pedoman dan peraturan yang jelas perlu diterapkan untuk menyeimbangkan perluasan jangkauan dan risikonya.

#### **2.1.5 Sistem Pembayaran**

Sistem pembayaran menurut Bank Indonesia merupakan sistem yang berkaitan dengan transaksi antar dua pihak dimana terdapat pertukaran atau pemindahan sejumlah nilai uang terhadap masing-masing pihak. Dimana terdapat pihak sebagai penerima dan pemberi uang yang ditukar misal antar barang ataupun dalam bentuk jasa.

Alat yang digunakan untuk menukar atau pemindah nilai uang tersebut juga sangat beragam, mulai dari alat pembayaran yang sederhana seperti uang sampai pada sistem yang kompleks dan canggih bahkan juga melibatkan berbagai lembaga.

#### 2.1.5.1 Definisi Sistem Pembayaran

Dalam undang-undang No. 23 tahun 1999 BI pasal 1 dijelaskan bahwa “system pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran harus dapat menjamin terlaksananya perpindahan uang masyarakat secara efisien dan aman sehingga dapat menjamin kenyamanan dalam melakukan setiap transaksi yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Jadi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral pada dasarnya memiliki kewajiban mengatur dan mengawasi sistem pembayaran yang berlangsung dalam kegiatan ekonomi masyarakat dengan mewujudkan sistem yang diinginkan oleh pelaku kegiatan ekonomi”

Tingkat paling dasar sistem pembayaran adalah suatu cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai (*value*) antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Media-media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya.

Menurut Muttaqin dalam Purusitawati (2000), sistem pembayaran adalah suatu sistem yang terdiri atas sekumpulan ketentuan yang di dalamnya terkandung hukum, standar, prosedur, dan mekanisme teknis operasional pembayaran yang

dipergunakan dalam melakukan pertukaran suatu nilai uang antara dua pihak dalam suatu wilayah negara maupun secara internasional dengan memakai instrumen pembayaran yang diterima dan disepakati sebagai alat pembayaran. Dalam pengertian ini tercakup pengertian mengenai kelembagaan/organisasi yang terkait dalam mekanisme pembayaran seperti bank, lembaga kliring, atau lembaga perantara pembayaran lainnya serta bank sentral.

Menurut undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran. Wewenang Bank Indonesia dalam penetapan penggunaan alat pembayaran bertujuan untuk mencapai keamanan dan efisiensi bagi penggunaannya.

Sistem pembayaran terdiri atas unsur berikut:

1. Politik/kebijaksanaan yang dianut, bersifat normatif, menerangkan mengenai tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat dicapai/diperoleh dari sistem pembayaran.
2. Lembaga/organisasi yang terkait dalam sistem pembayaran
3. Sistem hukum yang berlaku
4. Alat-alat pembayaran yang lazim dan dinyatakan sah untuk dipergunakan.

#### 2.1.5.2 Sejarah Uang Dan Evolusi Sistem Pembayaran

Dahulu transaksi ekonomi masih belum secanggih saat ini, awalnya transaksi dilakukan dengan cara tukar menukar barang atau barter sesuai dengan barang kebutuhan yang mereka butuhkan, namun lama kelamaan sistem tukar menukar barang atau barter ini dianggap susah dan sulit untuk menemukan seseorang yang bisa diajak tukar menukar barang yang di milikinya dan yang sesuai dengan



keinginan mereka, serta kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya.

Kesulitan yang dirasakan mendorong manusia untuk mulai memikirkan menggunakan benda-benda tertentu yang dapat digunakan sebagai alat tukar menukar. Benda-benda yang ditetapkan untuk alat pertukaran yaitu benda-benda yang diterima oleh umum, benda-benda yang dipilih bernilai tinggi (susah diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik), atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Setelah itu seiring banyaknya kebutuhan manusia yang harus diselesaikan dengan cara yang dianggap mudah beralihlah masyarakat ke tahap selanjutnya yaitu uang barang. Pada tahap ini apabila ada benda-benda yang dianggap sesuai dengan kebutuhan maka terjadilah proses penukaran barang tersebut.

Selanjutnya tahap uang logam, dimana logam digunakan sebagai alat pembayaran karena dirasa tahan lama, tidak mudah rusak serta memiliki nilai yang tinggi, dan tidak mengurangi nilainya walaupun dipecahkan. Bahan-bahan yang digunakan telah memenuhi syarat-syarat diantaranya emas dan perak. Stealah lama mengadopsi sistem pembayaran ini dan peningkatan sistem tukar menukar semakin tinggi, sedangkan jumlah logam mulia berkurang. Dari permasalahan itu muncullah uang fiat pada masyarakat (uang kepercayaan). Menurut Muttaqin dan Miskhin (2011) uang fiat merupakan uang kertas yang diumumkan oleh pemerintah sebagai alat transaksi pengganti emas dan perak.

Menurut Litsfield dan Montes (2014) “transaksi pembayaran dengan menggunakan cara barter, emas, perak, maupun dengan uang fiat merupakan

pembayaran yang dilakukan secara tunai. Sistem pembayaran ini merupakan sistem pembayaran yang paling sederhana, dan paling banyak digunakan dalam perekonomian, terutama di negara-negara berkembang. Sebab, dalam sistem pembayaran tunai dana dapat dengan mudah ditransferkan secara instan tanpa adanya biaya lain seperti waktu, transaksi, dan sebagainya”.

Sehingga terciptalah uang kertas. Benjamin Franklin (AS) disebut sebagai bapak uang kertas, karena beliau lah yang pertama kali mencetak dollar dari bahan kertas yang dulu berfungsi untuk membiayai perang kemerdekaan Amerika Serikat. Disinilah dapat dilihat fungsi asli uang yaitu sebagai:

- Sebagai alat tukar (*Medium of change*)
- Sebagai Satuan Hitung (*unit of account*)
- Sebagai penyimpan nilai (*store of value*)

Untuk menjaga kualitas uang (uang kartal, uang fiat) yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan. Kebijakan yang diambil tersebut adalah pengeluaran dan pengedaran uang emisi baru, serta melakukan *public education* mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah (Bank Indonesia, 2006). Beberapa standar fisik keaslian uang kartal (fiat) untuk menjaga dari penyalahgunaan dan pemalsuan diantaranya adalah ukuran, bahan, warna kertas yang unik, denominasi uang, serta pengaman (tinta khusus, *watermark*, benang pengaman, gambar tembus pandang, *mocrotext*, dll).

Setelah penggunaan uang fiat semakin meluas dalam masyarakat, bukan berarti perkembangan ini telah berhenti. Penggunaan uang kertas untuk melakukan transaksi ini juga menyimpan berbagai biaya, dari kemanan, biaya transportasi, hingga biaya transaksi (yaitu pengenaan tarif dalam transaksi). Dilain

sisi, uang fiat hanya bisa digunakan sebagai alat transaksi sepanjang adanya kepercayaan kepada lembaga yang berwenang mengeluarkannya dan pencetakannya sudah dalam tahap sukar untuk dipalsukan (Miskhin, 2001).

Perkembangan sistem pembayaran ini kemudian dilanjutkan dengan menggunakan cek. Seperti halnya fiat, alat pembayaran ini kemudian dilanjutkan dengan menggunakan cek. Seperti halnya fiat cek juga membutuhkan biaya dan hanya dapat dicairkan dalam waktu tertentu. Dalam sistem pembayaran non tunai menggunakan cek, jumlah nominal dana yang ditransaksikan nama pihak pembayar dan penerima pembayaran harus ditulis secara spesifik. Tidak seperti sistem pembayaran tunai, dalam penggunaan cek terjadi dua proses, yaitu aliran cek secara fisik, serta transfer dana yang digunakan dalam transaksi tersebut.

Menurut Muttaqin dalam Pursuwati (2000) menyebutkan “berdasarkan hambatan biaya tersebut maka evolusi ini berlanjut hingga dikembangkannya sistem pembayaran yang berdasarkan elektronik. Perkembangan ini ditunjang pula dengan kemajuan teknologi komputer yang sedemikian cepat. Perkembangan alat-alat pembayaran tersebut mengarah dari pengelolaan terormatisasi”

Ketidak praktisan dan ketidaknyamanan pembayaran menggunakan uang fiat, serta adanya biaya transportasi untuk melangsungkan transaksi antar pembayar (*payer*) dan penerima pembayaran (*payee*) dapat diatasi dengan munculnya sistem pembayaran elektronis. Pada sistem ini, transaksi yang terjadi antar bank dapat berlangsung tanpa ada biaya pemrosesan seperti pada alat pembayaran berdasarkan kertas atau uang fiat.

Listfield dan Montes-Negret (1994) mengatakan sistem pembayaran elektronis memiliki efektifitas khususnya dalam transaksi yang bervolume tinggi dengan nilai

transaksi yang kecil, terutama dalam perekonomian yang sedang berkembang yang memiliki akses teknologi yang terbatas. Efektifitas dari sistem pembayaran elektronik, ditandai pula oleh adanya perubahan penandatanganan secara manual menjadi penandatanganan secara elektronik pada alat-alat pembayaran.

Pembayaran menggunakan kartu elektronik merupakan pembayaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi maupun jaringan komunikasi. Alat pembayaran elektronik yang ada di Indonesia saat ini antara lain kartu kredit dan kartu debit atau ATM. Pembayaran secara elektronik berkaitan langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya. Jadi tiap pembayaran yang dilakukan menggunakan pembayaran elektronik oleh nasabah, akan melalui proses otorisasi yang dibebankan dalam rekening nasabah/ pengguna terlebih dahulu.

Jadi secara garis besar sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. Perbedaan mendasar dari kedua jenis sistem pembayaran tersebut terletak pada instrumen yang digunakan. Pada sistem pembayaran tunai instrumen yang digunakan menggunakan uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam, sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik. Di Indonesia, instrumen pembayaran non tunai disediakan terutama oleh sistem perbankan. Instrumen yang disediakan terdiri dari instrumen yang berbasis warkat (Kertas), seperti cek, bilyet giro, nota debit, dan nota kredit, atau alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), seperti kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Sedangkan untuk sistem transfer tersedia sistem BI-RTGS dan sistem kliring Nasional (Bank Indonesia).

### 2.1.5.3 Sistem Pembayaran Non-Tunai

#### 1. Kartu Kredit

Menurut Ade dan Edia mendefinisikan kartu kredit (*credit card*) adalah alat pembayaran pengganti uang tunai dalam bentuk kartu yang dapat digunakan untuk transaksi pembelian barang dan jasa yang dapat dilakukan apabila pengguna tersebut mendapatkan tagihan dari penerbit kartu kredit yaitu bank sebagai penerbit atau bank lain yang bekerjasama dengan bank penerbit kredit tersebut.

Imam Prayogo dan Djoko (1995) mendefinisikan kartu kredit sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai yang berupa kartu dan dapat kita gunakan dimana saja dan untuk melakukan pembelian apa saja selama tempat tersebut menyediakan alat untuk transaksi menggunakan kartu kredit atau pihak yang bekerjasama dengan penerbit

#### 2. Kartu Debet

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012, yang dimaksud dengan kartu debit adalah kartu APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban pembayaran seperti transaksi belanja yang mana terdapat kewajiban pembayaran dan ditanggung oleh pemegang kartu dari simpanan atau tabungan pemegang kartu kepada bank atau lembaga yang berwenang.

Menurut Kasmir (2014), kartu debit adalah pembayaran dari nasabah dengan cara pendebitan di rekening saat sedang menggunakan kartu. Sedangkan menurut Arief (2016) mendefinisikan kartu debit adalah alat berbentuk kartu plastik yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan yang

dapat digunakan untuk transaksi belanja dengan mendebit uang atau saldo yang ada dalam kartu debit pengguna lalu mengkredit saldo rekening yang ada pada penjual sebesar jumlah nominal yang dihabiskan untuk belanja tersebut.

### 3. Charge Card

*Charge card* merupakan kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan untuk membeli barang maupun jasa di mana waktu pelunansannya berlaku setelah kartu telah berada di tangan pengguna dan pelunasannya dilakukan secara sekaligus (Sigit dan Totok, 2006)

Sedangkan menurut Hati (2009) mendefinisikan *charge card* sebagai kartu transaksi yang berlaku untuk pembelian semua jenis barang dan jasa dimana nasabah harus membayar kembali seluruh tagihannya dalam hitungan satu bulan kedepan dengan atau tanpa beban tambahan.

### 4. Cash Card

*Cash Card* juga bisa disebut kartu ATM yakni kartu yang diperoleh dari bank resmi pengelola keuangan yang berisi uang berupa tabungan atau rekening dan digunakan untuk transaksi pengambilan uang tunai melalui mesin ATM (*Automatic Teller Machine*) atau bank saja. Bisa juga diambil melalui *merchant* lain ketika transaksi pembelian di tempat yang mana bekerjasama atau menyediakan alat pembayaran dari bank yang sama. Adapun pengambilan di bank yang berbeda sebenarnya bisa saja, namun berdasar dengan perjanjian kerja sama dengan satu bank (Utama, 2009).

Menurut pengertian Pasaleori (2012) bahwa *cash card* sebagai kartu tunai yang sama rupanya dengan ATM yang dapat digunakan untuk penarikan

tunai dan dapat dilakukan di konter-konter bank maupun anjungan ATM. Dalam hal ini pemilik kartu ATM merupakan nasabah di bank dan memiliki rekening tabungan di bank.

#### 5. Electronic Money (E-money)

*Bank for International Settlement (BIS, 1996)* mendefinisikan *Electronic Money* (E-money) adalah produk *stored value* atau *prepared card* yang jumlah uang tersebut berada dalam kartu elektronik atau juga bisa disebut peralatan elektronik. Uang tersebut dapat diperoleh secara elektronik karena prosesnya melalui penyetoran sejumlah uang tunai ke bank lalu dari pihak bank memindahkan uang tersebut dengan sistem transfer dana atau uang secara elektronik ke pemiliknya. Setelah itu pemilik akan dapat melakukan transaksi jual beli dengan kartu tersebut. Dimana jumlah saldo di dalam kartu tersebut bisa berkurang maupun bertambah. Berkurang karena pemilik melakukan pembelian barang, lalu saldo tersebut bertambah jika pembeli melakukan *top up* atau isi ulang saldo.

Uni Eropa mendefinisikan *E-money* sebagai nilai keuangan yang didalamnya terdapat 2 pihak antar *claim* dan *issuer* dimana nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dan memiliki fungsi alternatif dalam pembayaran tunai atau kas. Jadi dapat disimpulkan, *E-money* adalah sebuah nilai uang yang disimpan secara elektronik yang memiliki fungsi menjadi substitusi dari pembayaran kas tunai. Ketika pembayaran kas atau tunai mengalami masalah atau terdapat kehambatan, maka transaksi *E-money* dapat menjadi solusi masalah tersebut (Shrier dkk, 2016).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 pasal 1A ayat 1, uang elektronik (*E-money*) dibedakan menjadi dua jenis, yakni uang elektronik yang

identitas penggunanya terdaftar atau diregistrasikan kepada penerbit atau bank dan identitas pengguna yang tidak terdaftar atau tidak teregistrasi di penerbit atau bank. Untuk membedakan keduanya, dapat dilihat dari fasilitas yang diberikan oleh penerbit yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**

**Perbedaan Pengguna Yang Teregistrasi dan Tidak Teregistrasi**

REGISTERED	UNREGISTERED
1. Registrasi pemegang 2. Pengisian Ulang (Top Up) 3. Pembayaran Transaksi 4. Pembayaran Tagihan 5. Transfer Dana 6. Tarik Tunai 7. Penyaluran Program Bantuan Pemerintah Kepada Masyarakat 8. Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia	1. Pengisian Ulang (Top Up) 2. Pembayaran Transaksi 3. Pembayaran Tagihan 4. Fasilitas Lain Berdasarkan Persetujuan Bank Indonesia

Penggunaan uang elektronik atau kartu (*E-money*) tanpa bunga dan tidak terjamin di lembaga penjamin simpanan (LPS) dan dapat dengan mudah dipindahtangankan. Pengisian ulang saldonya pun dapat dilakukan di berbagai tempat, misal dari pihak bank, ATM, mesin EDC, dan lain-lain.

2.1.5.4 Layanan Keuangan Digital

Menurut G20/OECD INFE (2017) dalam *G20/OECD INFE Report Ensuring Financial Education and Consumer Protection for All in The Digital Age* dan GPFi (2016) dalam *G20 High Level Principles fir Digital Financial Inclusion*, layanan keuangan digital didefinisikan sebagai kegiatan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital, termasuk di dalamnya uang elektronik, layanan keuangan *mobile*, layanan keuangan online, *i-teller*, dan bank nirkantor, nbaik



melalui lembaga perbankan maupun non-bank. Layanan keuangan digital meliputi beragam transaksi keuangan seperti deposito, pengambilan tabungan, mengirim dan menerima dana, serta produk dan layanan jasa keuangan lainnya seperti pembayaran, kredit, tabungan, pensiun, dan asuransi. Layanan tersebut juga dapat mencakup layanan non-transaksional, seperti melihat informasi keuangan pribadi melalui perangkat digital.

Penjelasan lebih lanjut dari *Asian Development Bank* (2016) yang menyatakan bahwa layanan keuangan digital pada umumnya mengacu pada ketersediaan teknologi untuk memberikan layanan keuangan dari penyedia jasa keuangan kepada cakupan konsumen yang luas, termasuk uang elektronik, *mobile money*, *card payments*, transfer biaya dalam bentuk elektronik. Selain itu, layanan keuangan digital juga dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan layanan keuangan kredit dan asuransi. AFI (2016) juga menjelaskan bahwa layanan tersebut merupakan layanan keuangan yang dapat diakses secara digital dimana masyarakat tidak perlu menggunakan uang tunai dalam bentuk pembayaran maupun bertransaksi keuangan secara tradisional seperti mendatangi kantor bank.

Bank Indonesia mendefinisikan *Fintech* as “ *A phenomenon of fusion between technology and financial features that transform business models and a weak barrier to entry which lead to raises unregulated players to run the service as well as regulated financial-financial institution*”

Layanan keuangan digital dianggap sebagai cara yang efektif untuk menyediakan peluang dalam mendorong inklusi keuangan dengan meringankan biaya transaksi keuangan tanpa harus menyediakan layanan keuangan tradisional dalam bentuk jaringan kantor. Dengan memanfaatkan teknologi digital dalam

memasarkan produk layanan jasa keuangan, karena tidak perlu mendirikan kantor cabang (*Branchless Banking*) tetapi hanya memanfaatkan smartphone. Juga biaya perawatan rekening yang murah.

Dalam implementasinya, pemanfaatan layanan keuangan digital oleh masyarakat perlu diimbangi oleh masyarakat perlu diimbangi dengan pemahaman terhadap fungsi, manfaat dan risiko layanan keuangan digital sehingga masyarakat memiliki kesadaran secara penuh terhadap layanan yang dimaksud. Pemahaman tersebut penting bagi konsumen untuk memitigasi risiko yang dapat ditimbulkan oleh layanan keuangan digital termasuk cara dan proses penyelesaian pengaduan. Selain itu dari sisi regulasi diperlukan regulasi yang mengatur aspek perlindungan konsumen terhadap pengguna layanan keuangan digital.

#### *1. Peer to Peer Lending*

Mengikuti perkembangan teknologi informasi, Indonesia pun telah menerapkan layanan keuangan digital yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses produk dan layanan jasa keuangan. Melihat potensi layanan keuangan digital tersebut, perusahaan *start-up* yang bergerak di bidang keuangan memanfaatkan peluang tersebut dengan memberikan layanan keuangan secara digital kepada masyarakat seperti *peer to peer lending (P2P Lending)*.

*P2P Lending* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (OJK, 2016).

Perusahaan yang bergerak di bidang *P2P Lending* ini berada pada posisi perantara secara digital melalui suatu platform tanpa melakukan penghimpunan

dana secara fisik yang mempertemukan orang yang memberikan dana atau menginvestasikan dana yang dimiliki (investor) dengan orang yang membutuhkan dana (peminjam). Peminjam bukan hanya perseorangan namun juga banyak berasal dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memerlukan pendanaan secara cepat untuk jangka pendek.

## 2. *Branchless Banking*

Selain *P2P Lending*, layanan keuangan digital lain yang telah tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia salah satunya adalah *branchless banking*. CGAP (2010) menjelaskan *Branchless Banking* sebagai penyampai/pengiriman layanan keuangan diluar dari jaringan kantor bank yang seringkali memanfaatkan agen dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam mengirimkan rincian transaksi. *Branchless banking* berpotensi untuk mengurangi biaya penyampaian/pengiriman dan meningkatkan kenyamanan konsumen .

*Branchless banking* menjadi terobosan penting bagi masyarakat di daerah pedalaman atau pedesaan yang belum mendapatkan layanan jasa keuangan melalui kehadiran fisik kantor bank. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan transaksi keuangan dengan mudah, sederhana dan cepat dengan mendatangi agen-agen *branchless banking* yang telah ditunjuk oleh bank di daerah tempat tinggal mereka. Bagi bank itu sendiri, diharapkan layanan melalui *branchless banking* dapat terus ditingkatkan di berbagai daerah yang secara ekonomi memerlukan biaya yang besar apabila mendirikan kantor bank secara fisik.

Berbagai bentuk layanan keuangan digital telah diupayakan penyelenggaraannya baik oleh regulator, lembaga jasa keuangan maupun pemangku kepentingan lainnya. Melalui layanan keuangan digital diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan hingga ke seluruh pelosok Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai pulau. Oleh karena itu diperlukan suatu inovasi untuk dapat memberikan pelayanan dalam hal layanan jasa keuangan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.4**

### Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Model Estimasi	Variabel	Hasil Penelitian
1	Bintan Badriatul Ummah, Nunung Nuryatno, Lukytawati Anggraeni (2015)  Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia	Deskriptif  Kuantitatif	$W_i =$ Bobot untuk dimensi $i$ , $0 \leq w_i \leq 1$  $A_i =$ nilai terkini dari peubah $i$  $m_i =$ nilai minimum (batas bawah) dari peubah $i$  $M_i =$ nilai maksimum	Hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki tingkat inklusi keuangan rendah. Juga tingkat inklusi

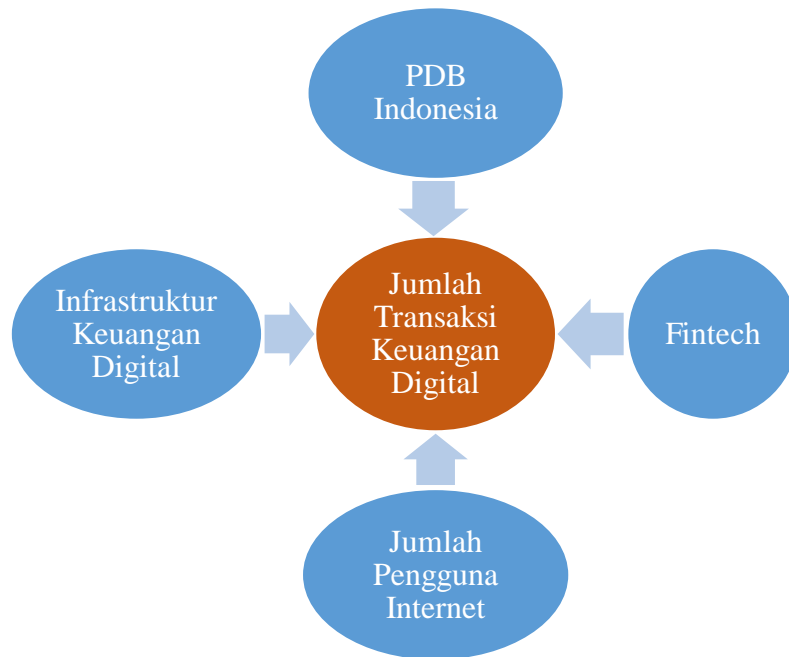
			(batas atas) dari peubah i	keuangan di indonesia dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan infrastruktur.
2	Pipit Buana Sari, Handriyani Dwilita (2017)  Prospek Financial Technology (FINTECH) di Sumatera Utara  Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Kemiskinan	Deskriptif	Kemungkinan perkembangan financial technology jika dilihat dari sisi literasi keuangan, inklusi keuangan dan kemiskinan	Pemanfaatan digital technologies di sumatera utara cukup baik dan indeks literasi keuangan berada pada posisi yang baik serta faktor kemiskinan juga baik
3	I Made Sanjaya, Nursechafia (2016)	Analisis Regresi	Indeks inklusi keuangan  Inklusifitas	Indonesia masuk ke dalam

	Inklusi Keuangan Dan Pertumbuhan Inklusif: Analisis Antar Provinsi Di Indonesia		pertumbuhan	kategori medium selama periode pengamatan. Secara umum, inklusi keuangan indonesia dipengaruhi oleh dimensi aksesibilitas
--	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 2.3 Kerangka Pemikiran

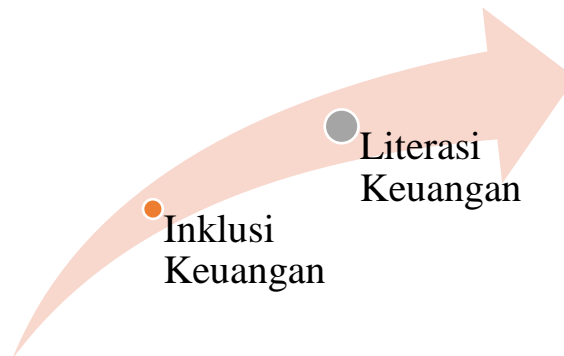
Secara umum, terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan di indonesia. Beberapa indikator yang dianggap mempengaruhi tingkat literasi masyarakat indonesia, yaitu: (1) Inklusi keuangan/ akses terhadap layanan perbankan, (2) Infrastruktur layanan keuangan, khususnya keuangan elektronik, (3) Jumlah penyelenggara layanan jasa keuangan digital, (4) Startegi pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Keempat variabel tersebut akan mempengaruhi tingkat literasi keuangan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi indonesia. Kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Penelitian**



Dalam model ini, variabel Jumlah Transaksi Digital, Jumlah Fintech, Jumlah Infrastruktur Keuangan Digital, merupakan variabel bebas yang mempengaruhi terhadap perkembangan inklusi keuangan masyarakat, dimana Inklusi Keuangan merupakan variabel terikat.

**Gambar 2.4**  
**Bagan Konseptual Model**



Dalam model ini, variabel inklusi keuangan apakah mempengaruhi tingkat literasi keuangan masyarakat. Dengan meningkatnya akses keuangan berpengaruh positif ke pengetahuan masyarakat tentang layanan keuangan dan perbankan.

#### **2.4 Hipotesis**

Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu, maka didapat hipotesa sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan antara transaksi digital keuangan dengan, PDRB perkapita, jumlah penyelenggara Fintech, jumlah infrastruktur keuangan digital dan jumlah pengguna internet terhadap inklusi keuangan.
2. Terdapat pengaruh antara inklusi keuangan dengan tingkat literasi keuangan masyarakat. Dilihat dari analisis tipologi klassen dengan melihat penyebaran akses keuangan masyarakat terhadap lembaga keuangan bank dan non bank.



## BAB III METODE PENELITIAN

Metode penulisan adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi empiris guna memecahkan masalah dan menguji hipotesis dari sebuah penelitian.

### 3.1 Pendekatan Penulisan

Penulisan ini merupakan sebuah mini riset kuantitatif, yang dimana bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis hubungan antar variabel yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah. Melakukan analisis deskriptif kebijakan inklusi keuangan oleh pemerintah untuk menjangkau masyarakat. Data yang disajikan adalah *time series* yaitu data waktu yang dihimpun pada tahun yang berbeda secara bersama. Data yang akan diteliti mengenai PDRB per kapita, Infrastruktur Keuangan Elektronik (IKE), *Fintech* (FIN), Pengguna Internet (PI) dan Perkembangan Transaksi Keuangan Digital (TKD). Serta menyajikan data literasi keuangan untuk melakukan pemetaan Literasi Keuangan per-Provinsi di Indonesia.

### 3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel yang diamati adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Definisi Operasional**

Variabel	Definisi Operasional	Sumber Data
Transaksi Keuangan Digital (TKD)	Jumlah Transaksi Keuangan Digital (dalam Jutaan Rupiah)	Bank Indonesia <a href="http://www.bi.go.id">www.bi.go.id</a>

Produk Domestik Regional perkapita (PDB)	Produk Domestik Regional Bruto (dalam triliun)	Badan Pusat Statistik <a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>
Fintech ( <i>Financial Technology</i> ) (FIN)	Jumlah Perusahaan Penyelenggara Fintech di Indonesia	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) <a href="http://www.ojk.go.id">www.ojk.go.id</a>
Pengguna Internet (PI)	Jumlah pengguna internet Berdasarkan wilayah (dalam juta orang)	Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) <a href="http://www.apjii.or.id">www.apjii.or.id</a>
Infrastruktur Keuangan Elektronik (IKE)	Jumlah Infrastruktur Keuangan Elektronik yang Tersedia (dalam Ribuan Unit)	Bank Indonesia <a href="http://www.bi.go.id">www.bi.go.id</a>
Literasi Keuangan	Indeks Literasi Keuangan Masyarakat (dalam %)	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) <a href="http://www.ojk.go.id">www.ojk.go.id</a>

### **3.3 Tempat dan Waktu Penelitian**

#### a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melihat data seluruh transaksi keuangan dan infrastruktur keuangan elektronik di Indonesia, yang disediakan oleh Bank Indonesia dan OJK.

#### b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan selama 3 bulan yaitu November 2018 sampai Januari 2019

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan Bentuk : Data Kuantitatif
2. Berdasarkan Waktu : Data Time Series
3. Berdasarkan Sumber Data : Data Sekunder

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data secara sekunder melalui website resmi Bank Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

### **3.6 Model Estimasi**

Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda. Maka model ekonometrika yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



$$\beta_1 + \beta_2 =$$

Parameter dari setiap variabel

$$\varepsilon_t =$$

*Error term*

### 3.7 Metode Estimasi

Metode estimasi pada model ini adalah untuk mengestimasi semua variabel yang diamati menggunakan data runtut waktu (*time series*) dalam kurun waktu 5 tahun (dari tahun 2010 sampai 2016). Analisis trend dalam kurun waktu tersebut dapat dianalisis menggunakan asumsi OLS (*Ordinary Least Square*) dalam bentuk model regresi linier berganda serta menggunakan Eviews10 dan Software SPSS untuk melihat penyebaran layanan perbankan dan non bank yang disajikan lebih sederhana dan mudah dimengerti.

Asumsi utama yang mendasari model regresi dengan menggunakan metode OLS adalah sebagai berikut:

1.  $\varepsilon = 0$ ; nilai rata-rata *disturbance term* adalah nol.
2.  $Var = \sigma$ ; varians dari *disturbance term* adalah bersifat konstan (homokedasitas)
3.  $Cov = 0$ ; tidak ada korelasi baik antara *disturbance term* maupun antara *disturbance term* dan variabel bebas
4.  $U_i \sim N(0, \sigma)$ ; *disturbance term* terdistribusi secara normal dengan rata-rata nol dan varians konstan (Ariefianto, 2012)

### 3.8 Prosedur Analisis

Karena penelitian ini bersifat *time series* dari tahun 2013 sampai tahun 2017 untuk model estimasi pertama menggunakan analisis regresi linier (OLS) dan data literasi keuangan untuk model kedua dengan analisis Tipologi *Klassen*.

#### 3.8.1 Analisis Deskriptif Perkembangan Transaksi Keuangan Digital (TKD) dan *Fintech* (FIN) Terhadap Inklusi Keuangan Di Indonesia.

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan untuk memudahkan membaca dalam menafsirkan hasil penelitian.

Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan Jumlah Transaksi Keuangan Digital (TKD) khususnya terhadap akses keuangan di indonesia pada tahun 2013-2017, dan juga untuk mengetahui perkembangan literasi keuangan di indonesia.

#### 3.8.2 Penaksiran

##### a. Korelasi (R)

Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya suatu hubungan linier antara variabel FIN dan IKE terhadap TKD. Koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf  $r$  dimana bervariasi antara -1 sampai +1. Nilai  $r$  mendekati -1 atau +1 menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel-variabel tersebut nilai  $r$  yang mendekati 0 mengindikasikan lemahnya hubungan antara variabel-variabel tersebut. Sedangkan tanda + (positif) dan - (negatif) memberikan informasi mengenai arah dari hubungan antara variabel-variabel tersebut. Jika bernilai + (positif) maka variabel-variabel tersebut memiliki

hubungan yang searah, dalam arti lain peningkatan FIN dan IKE akan bersamaan dengan peningkatan TKD begitu uga sebaliknya. Jika bernilai – (negatif) artinya korelasi antara variabel-variabel tersebut bersifat berlawanan.

b. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Ukuran *Goodness of Fit* mencerminkan seberapa besar variasi dari *regressand* (Y) dapat diterangkan oleh *regressor* (X). Nilai dari *Godness of Fit* adalah antara 0 dan 1(  $0 \leq 1$  ). Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Nachrowi dan Usman, 2002).

Sedangkan menurut Gujarati (2006) koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar presentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam presentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi ( $R^2$ ) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data,  $R^2$  menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif digunakan *corrected* atau *adjusted  $R^2$*  yang dirumuskan (Gujarati, 2006):

$$Adjusted R^2 = 1 - R^2 - \left(\frac{-1}{n-k}\right) \dots \dots \dots (3-2)$$

Dimana:  $R^2$   
:  
 koefisien determinan  
:  
 $n$   
 jumlah sampel :

k :  
jumlah variabel independen

### 3.8.3 Pengujian (*test diagnostic*)

#### a. Uji Statistik t atau Uji Parsial

Uji t Statistik dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh FIN dan IKE secara individual terhadap TKD. Dengan menganggap variabel bebas lainnya adalah konstan. Dalam hal ini pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

##### 1. Perumusan Hipotesa:

- FIN

$H_0 : \beta_1 = 0$  (FIN tidak berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap TKD)

$H_a : \beta_2 \neq 0$  (FIN berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap TKD)

- IKE

$H_0 : \beta_1 = 0$  (IKE tidak berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap TKD)

$H_a : \beta_2 \neq 0$  (IKE berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap TKD)

##### 2. Uji Statistik t

Koefisien regresi dapat diketahui dengan cara menghitung nilai t dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{\alpha_i}{se \alpha_j} \dots\dots\dots (3-3)$$



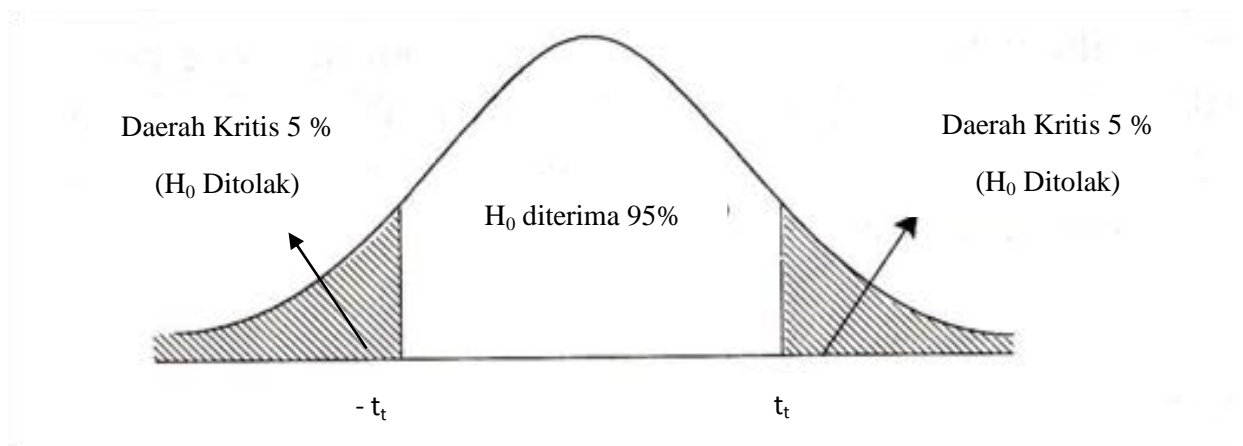
Dimana:  $\alpha_i$  :  
 koefisien regresi :  
 se :  
 standar error :  
 i :  
 :1,2,3.....n :  
 j :1,2

dibandingkan dengan  $t_{tabel} : \pm t (\alpha/2, n-1)$

### 3. Kriteria Uji

Terima  $H_0$  jika  $-t_{tabel} < t_{hitung} < +t_{tabel}$ , hal lain tolak  $H_0$ .

Distribusi kurva normal t



Atau dalam olahan software, dikatakan signifikan jika nilai  $sig < \alpha = 10\%$

### 4. Kesimpulan:

Memberikan kesimpulan sesuai dengan kriteria uji.

#### b. Uji F statistik atau Uji simultan

Uji F dilakukan untuk mengetahui pada model 1 apakah FIN dan IKE secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi TKD.

#### 1. Perumusan Hipotesa:

$H_0$  (FIN dan IKE tidak berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap TKD)  
 $\beta_1, \beta_2 = 0$

$H_a$  (FIN dan TKE berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap TKD)  
 $\beta_1, \beta_2 \neq 0$

## 2. Uji Statistik F

$$F = \frac{R^2/k-1}{(1-R^2)/(n-k)} \dots\dots\dots(3-4)$$

Dimana:  $k$   
:  
jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

$n$   
:  
jumlah observasi

Dibanding dengan  $F_{tabel} = F(\alpha, n-k-1)$

## 3. Kriteria Uji

Terima  $H_0$  jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , hal lain tolak  $H_0$ .

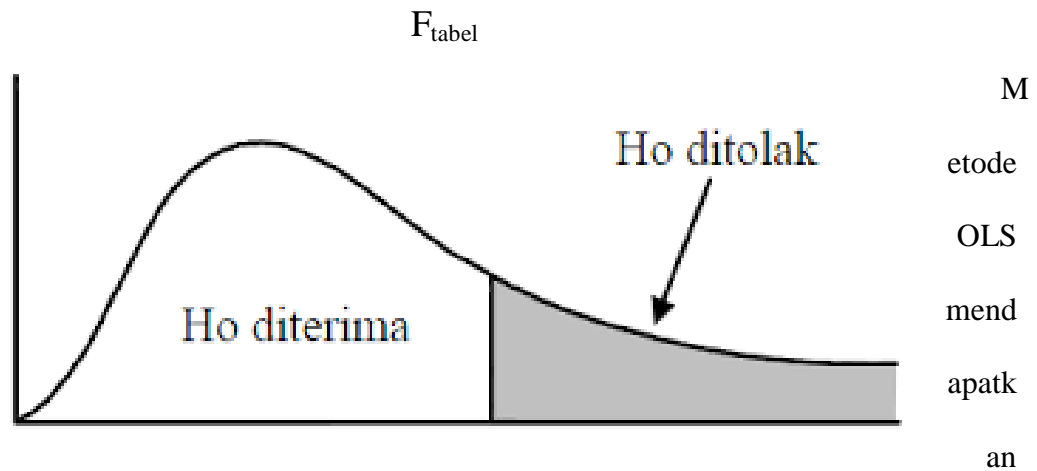
Atau dalam distribusi kurva F

Atau dalam olahan software, dikatakan signifikan jika nilai  $sig < \alpha = 10\%$

## 4. Kesimpulan:

Memberikan kesimpulan apakah Tolak  $H_0$  atau terima  $H_0$

c. Uji Asumsi Klasik



nilai estimator yang diharapkan dapat memenuhi sifat estimator OLS yang BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dengan cara meminimumkan kuadrat simpangan setiap observasi dalam sampel. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga asumsi dalam metode estimasi OLS yang harus dipenuhi dalam pengujian berdasarkan kriteria ekonometrika, yaitu:

1. Tidak ada masalah hubungan antar variabel independen dalam regresi berganda yang digunakan (tidak multikolinieritas).
2. Varian variabel yang konstan (tidak heterokedastisitas), dan
3. Tidak ada hubungan variabel gangguan antara satu observasi dengan observasi berikutnya (tidak ada autokorelasi)

d. Multikolinieritas

Multikolinieritas berhubungan dengan situasi dimana ada hubungan linier baik yang pasti atau mendekati pasti antara variabel independen (Gujarati, 2003). Masalah multikolinieritas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain. Selain mengurangi kemampuan untuk menjelaskan dan

memprediksi, multikolinieritas juga menyebabkan kesalahan baku koefisien (uji t) menjadi indikator yang tidak dipercaya.

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linier dalam model persamaan regresi yang digunakan. Apabila terjadi multikolinieritas, akibatnya variabel penaksiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak efisien.

Dalam penelitian ini uji multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan *auxilliary regression* untuk mendeteksi adanya multikolinieritas. Kriterianya adalah jika R<sup>2</sup> regresi persamaan utama lebih dari R<sup>2</sup> regresi *auxilliary* maka di dalam model tidak terjadi multikolinieritas. *Model auxilliary regression* adalah:

$$F_t = \frac{R^2.X1,X2,X3,\dots,Xk / (k-2)}{1-R^2.X1,X2,X3,\dots,Xk / (N-K+1)} \dots\dots\dots (3-5)$$

e. Heterokedstisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana varians dari setiap gangguan tidak konstan. Dampak adanya hal tersebut adalah tidak efisiennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri tetap konsisten dan tidak bias serta akan mengakibatkan hasil uji t dan uji F dapat menjadi tidak “*reliable*” atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat digunakan uji White. Secara manual uji ini dilakukan dengan menggunakan regresi kuadrat dengan variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Nilai R<sup>2</sup> yang didapat digunakan untuk menghitung  $x^2$ , dimana  $x^2 = n \cdot R^2$  (Gujarati, 2003). Dimana pengujiannya adalah jika nilai probability *Observation R-Squared* lebih besar dari taraf nyata 5 persen. Maka hipotesis alternatif adanya heterokedastisitas dalam model ditolak.

#### f. Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pada periode lainnya, dengan kata lain variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, menggunakan lag pada model, memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2003).

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji Durbin Watson atau Durbin Watson Test. Dimana apabila  $d_l$  dan  $d_u$  adalah batas bawah dan batas atas, statistik menjelaskan apabila nilai Durbin Watson berada pada  $2 < DW < 4-d_u$  maka dapat dinyatakan tidak terdapat autokorelasi atau *no-autocorrelation* (Arifianto, 2012).

### 3.8.2 Analisis Tipologi Klassen

Tipologi *Klassen* yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor, sub sektor, usaha, atau komoditi prioritas atau unggulan suatu daerah. Dalam hal ini analisis Tipologi *Klassen* digunakan untuk melihat perbandingan tingkat literasi keuangan antar provinsi di Indonesia. Tipologi *Klassen* juga merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur ekonomi suatu daerah. Alata analisis Tipologi *Klassen* berbentuk matriks yang mengklasifikasikan daerah mana saja yang maju dan terbelakang

**Tabel 3.2**  
**Matriks Tipologi Klassen**

<p><b>Kuadran II</b> Daerah dengan tingkat keuangan yang maju tapi tertekan</p>	<p><b>Kuadran I</b> Daerah dengan tingkat keuangan yang maju dan tumbuh dengan pesat</p>
<p><b>Kuadran III</b> Daerah relatif tertinggal</p>	<p><b>Kuadran IV</b> Daerah yang tingkat keuangannya potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat</p>

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Perkembangan Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank**

##### **4.1.1 Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral**

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas ekonomi keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab bank indonesia.

Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang.

Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut *inflation targeting framework*.

Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan lapangan kerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (*law enforcement*) harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II.

Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem-sistem pembayaran, maka akan timbul risiko



potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (*contagion risk*) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat *real time* atau dikenal dengan nama sistem RTGS (*Real Time Gross Settlement*) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.

Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara *macroprudential*, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator *macroprudential* untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meedam gangguan dalam sektor keuangan.

Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan melalui fungsi Bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR). Fungsi LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang

menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi norma, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.

#### **4.1.2 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Sebagai turunan dari bank Indonesia, OJK mengambil sebagian tugas bank Indonesia yang dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga, Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari kementerian keuangan dan Bapepam –LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro Pada 2015.

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi OJK adalah:

1. Mewujudkan tersekanggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Ojk juga berfungsi untuk menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan Pasal 6 UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

- a. Terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi:
  - Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
  - Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produksi hibridasi dan aktivitas di bidang jasa;
  - Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur, pengujian kredit (*credit testing*) dan standar akuntansi bank;

- Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.
- b. Terkait pengaturan lembaga jasa keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:
- Menetapkan keputusan dan peraturan OJK;
  - Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
  - Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
  - Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa keuangan;
  - Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola statuer pada lembaga jasa keuangan
  - Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
  - Menetapkan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.
- c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:
- Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
  - Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif
  - Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku,

dana tau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam pertauran perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu
- Melakukan penunjukan pengelola statute
- Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan
- Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usah, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Nilai-nilai yang ada dalam Otoritas Jasa keuangan:

a. Integritas

Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

b. Professionalisme

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

c. Sinergi

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat industry keuangan.

d. Inklusif

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industry keuangan.

e. Visioner

Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (*Forward Looking*) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (*Out of The Box Thinking*)

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas jasa keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang –undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum
4. Asas Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

5. Asas Professionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Asas Integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dan
7. Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam rangka pencapaian visi dan misinya OJK memiliki delapan strategi utama yaitu:

1. Mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi dan menghilangkan duplikasi serta pengaturan yang terpisah-pisah melalui harmonisasi kebijakan. Dengan demikian akan diperoleh nilai tambah berupa peningkatan efisiensi dan konsistensi kebijakan pengurangan biaya terhadap industri masyarakat. Integrasi akan mengacu pada arsitektur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang mensinergikan berbagai *master plan* yang telah disusun sebelumnya di Bank Indonesia dan Bapepam-LK.
2. Meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan. Strategi ini ditempuh melalui adopsi kerangka peraturan yang lebih baik dan disesuaikan dengan kompleksitas, ukuran, integrasi dan konglomerasi sektor keuangan. Selain itu juga akan dikembangkan metode pengawasan



termutakhir dan bersifat holistik bagi seluruh sektor keuangan, termasuk penyempurnaan metode penilaian risiko dan deteksi dini permasalahan di lembaga keuangan.

3. Memperkuat ketahanan dan kinerja sistem keuangan. Strategi ini ditempuh dengan memberikan fokus pada penguatan likuiditas dan permodalan bagi seluruh lembaga keuangan, sehingga lebih tangguh dalam menghadapi risiko baik dalam masa normal maupun krisis.
4. Mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan. Selain mengatur dan mengawasi industri keuangan secara individual, OJK juga menganalisis dan memantau potensi risiko sistemik di masing-masing individual lembaga keuangan. Kewenangan untuk melakukan pengawasan secara integrasi akan memberikan ruang bagi OJK untuk memantau secara lebih dalam berbagai kemungkinan risiko dan mengambil langkah-langkah mitigasinya, terutama risiko yang terjadi di konglomerasi keuangan.
5. Meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan. Budaya tata kelola dan manajemen risiko yang baik harus menjadi jiwa dalam kegiatan di sektor keuangan. Untuk itu OJK akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dan manajemen risiko yang setara di seluruh lembaga jasa keuangan. Tidak kalah pentingnya adalah pengembangan budaya integritas yang menuntut kepemimpinan yang kuat dan berkarakter. Untuk itu ke depan OJK akan memberikan bobot lebih pada penilaian aspek ini dalam proses *fit and proper test* pengurus lembaga keuangan.

6. Membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif. Strategi ini diperlukan untuk mengefektifkan dan memperkuat bentuk-bentuk perlindungan konsumen yang selama ini masih tersebar, sehingga bersama-sama dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi akan mewujudkan level *playing field* yang sama antar lembaga jasa keuangan dengan konsumen keuangan.
7. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. Strategi ini diperlukan untuk menjawab kebutuhan akan *capacity building* bagi pengawas.
8. Meningkatkan tata kelola internal dan *quality insurance*. Untuk keperluan ini, OJK akan menerapkan standar kualitas yang konsisten di seluruh level organisasi, menyelaraskan antara tujuan OJK dengan kebutuhan pemangku kepentingan antara lain membuka dialog dengan industri secara berkala, dan memastikan pengambilan keputusan yang tepat sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu tugas OJK adalah peningkatan Inklusifitas dan literasi keuangan masyarakat Indonesia. demi mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera. Dalam hal ini pemerintah melakukan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan usaha meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia.

#### **4.1.3 Inklusi Keuangan**

Akses adalah infrastruktur yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan agar masyarakat dapat menjangkau baik lembaga, produk dan layanan jasa keuangan

yang bersifat formal Akses adalah infrastruktur yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan agar masyarakat dapat menjangkau baik lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan lainnya. Akses ke lembaga keuangan yang dibutuhkan seluruh golongan masyarakat agar setiap orang mampu memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan. Bukan hanya penggunaan produk dan layanan jasa keuangan yang menjadi fokus, akan tetapi bagaimana jasa keuangan yang digunakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.. Contoh perluasan akses keuangan antara lain:

1. Penambahan jaringan kantor
2. Penambahan jumlah agen
3. Penambahan jumlah ATM
4. Penambahan *point of acces* melalui layanan digital
5. Persiapan infrastruktur berbentuk fasilitas nir kantor (*branchless*)
6. Penambahan kerja sama dengan pihak lain.
7. Pengembangan *delivery channel* atau saluran distribusi produk dan layanan jasa keuangan

*Consulative Group to Assist the Poor (CGAP, 2016)* menjelaskan inklusi keuangan sebagai akses yang dimiliki oleh rumah tangga dan bisnis terhadap penggunaan produk dan layanan jasa keuangan secara efektif. Produk dan layanan jasa keuangan tersebut harus tersedia secara berkelanjutan dan teregulasi dengan baik. *Center for Financial Inclusion (CFI, 2016)* mendefinisikan inklusi keuangan sebagai akses terhadap produk keuangan yang sesuai termasuk, kredit, tabungan, asuransi dan pembayaran, tersedianya akses yang berkualitas. Termasuk kenyamanan, keterjangkauan, kesesuaian dan dengan memperhatikan

perlindungan konsumen, serta ketersediaan tersebut diberikan kepada semua orang. Selanjutnya, masyarakat juga diharapkan mendapatkan informasi dan ammpu membuat keputusan pengelolaan keuangan yang baik. Dismping itu, CFI juga menyebutkan pentingnya keberagaman penyedia jasa dan pasar yang kompetitif dengan infrastruktur yang kuat serta kerangka regulasi yang jelas.

*World Bank* (2016) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun usahanya dalam hal initransaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi yang digunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sementara, AFI (2010) menyebutkan bahwa kualitas merupakan kesesuaian produk dan layanan jasa keuangan dengan kebutuhan masyarakat yang dilihat diantaranya dari pengalaman konsumen. Selain itu kualitas juga dapat diartikan sebagai pilihan yang tersedia bagi konsumen, serta pemahaman konsumen terhadap produk dan layanan jasa keuangan (World Bank, 2015). Dari definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa unsur yang berperan dalam inklusi keuangan adalah akses, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan.

Ketersediaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan yang dibutuhkan oleh seluruh golongan masyarakat agar setiap golongan tersebut mampu memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing. Dalam hal ini lembaga jasa keuangan perlu menyediakan produk dan layanan jasa keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan perlu disesuaikan dengan karakter dan

kebutuhan masyarakat yang dapat dijangkau baik dari segi harga maupun aksesnya.

Penggunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan oleh masyarakat merupakan tujuan akhir dari inklusi keuangan sehingga diharapkan masyarakat bukan hanya menikmati produk dan layanan jasa keuangan yang digunakannya, melainkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

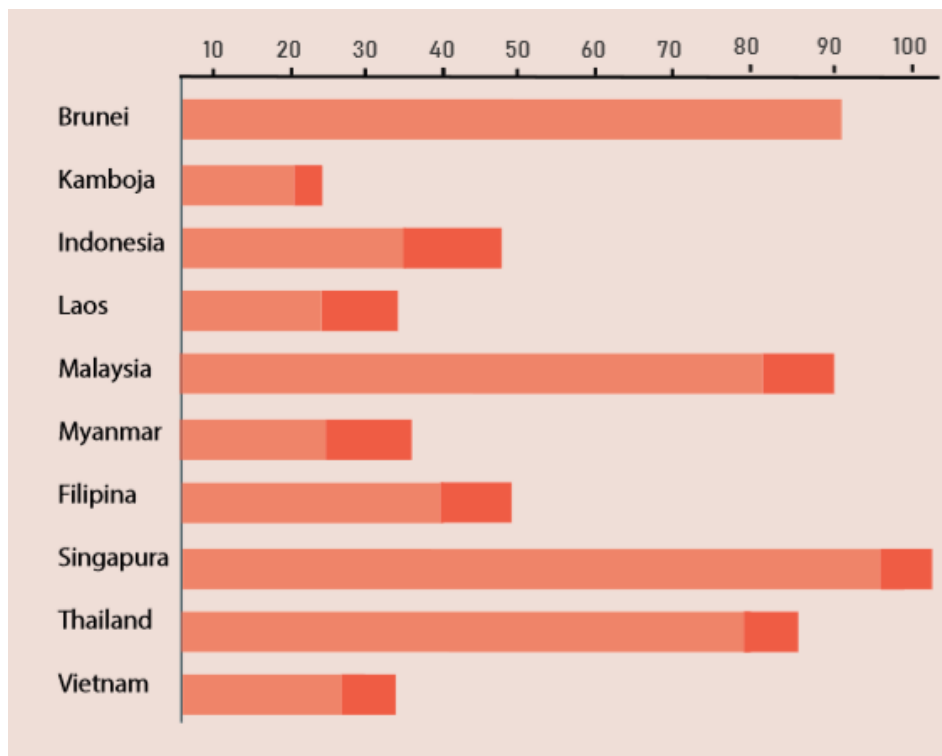
Kualitas merupakan kondisi dimana produk dan layanan jasa keuangan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan tersebut. Kualitas dalam hal ini, dapat diartikan pula penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat sehingga frekuensi penggunaannya relatif tinggi.

Pekerjaan rumah bagi Dewan Nasional Keuangan Inklusif dalam mencapai target inklusi keuangan sebagaimana tercantum dalam Perpres No 82/2016 belum selesai. Untuk mencapai target 75% Inklusi keuangan pada tahun 2019, maka Indonesia perlu menambah 54.388.751 penduduk dewasa memiliki rekening di lembaga keuangan formal.

Berdasarkan hasil survei *Global Findex 2017*, sebanyak 48.9% penduduk dewasa di Indonesia memiliki rekening simpanan di lembaga keuangan formal (bank umum, BPR, koperasi, lembaga keuangan mikro, uang elektronik terdaftar). Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 12.8% dibandingkan hasil survei 2014, yaitu 36.1%. Artinya, pertumbuhan rekeningng simpanan per tahun mencapai kurang lebih 4.2%. Dalam perbandingan global, pertumbuhan kepemilikan rekening simpanan di Indonesia adalah tertinggi di antara negara-

negara di kawasan asia timur dan pasifik. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia menempati peringkat ke-4 dalam hal kepemilikan rekening simpanan.

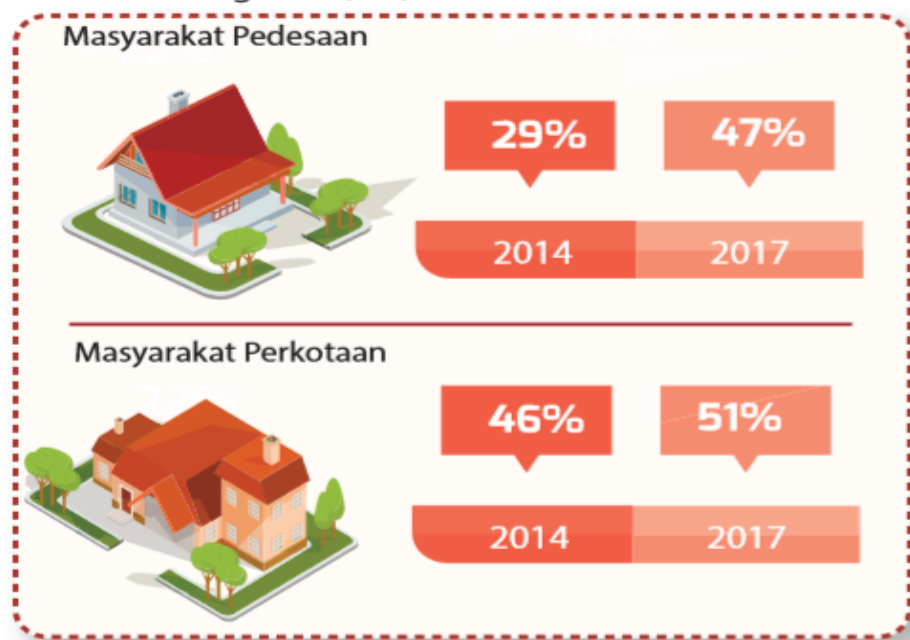
**Gambar 4.1**  
**Inklusi Keuangan di Kawasan Asia Pasifik**



Inklusi keuangan sebesar 48.9% setara dengan 95.414.559 penduduk dewasa. Untuk mencapai target 75% pada tahun 2019, maka diperlukan tambahan sebesar 52.664.391 penduduk dewasa yang memiliki rekening simpanan di lembaga keuangan formal.

Kepemilikan rekening simpanan penduduk di pedesaan meningkat sangat tajam. Pada tahun 2014 hanya 28% penduduk dewasa di pedesaan yang memiliki rekening simpanan di lembaga keuangan formal. Pada tahun 2017, presentase meningkat menjadi 47%. Artinya, peningkatan kepemilikan rekening simpanan di pedesaan mencapai 15%. Peningkatan ini lebih besar dibandingkan dengan

dengan peningkatan di antara negara-negara asia timur dan Pasifik (2%) dan peningkatan secara global (8%).



**Gambar 4.2**

### **Kesenjangan Inklusi Keuangan Masyarakat Desa Dengan Kota**

Kesenjangan kepemilikan rekening simpanan di pedesaan dan perkotaan di Indonesia pada tahun 2017 tidak terlalu besar, yaitu 4%. Tingkat kesenjangan ini setara dengan rerata negara-negara Asia Timur dan Pasifik. Tingkat kesenjangan ini menurun drastic dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 17%



**Gambar 4.3**

**Lima Alasan Utama Yang Menyebabkan Penduduk Tidak Memiliki Rekening Simpanan di Lembaga Keuangan Formal**

**4.1.4 Indikator Penggunaan Layanan Keuangan**

Indonesia mengalami kemajuan signifikan dalam penyediaan akses layanan keuangan bagi masyarakat pada tahun 2017. Lembaga keuangan formal lebih banyak menggunakan peran agen daripada infrastruktur permanen (kantor bank dan ATM) dalam meningkatkan akses terhadap layanan keuangan. Hingga 31 Desember 2017, capaian-capaian dalam peningkatan akses antara lain:

- Sebanyak 740.121 agen laku pandai atau meningkat 168% dibandingkan capaian pada 31 Desember 2016
- Sebanyak 204.960 agen layanan keuangan digital atau meningkat 80% dibandingkan capaian pada 31 Desember 2016,



- Sebanyak 30.256 kantor layanan bank atau meningkat 1% dibandingkan capaian pada 31 Desember 2016.

Sebagaimana dimensi akses, Indonesia juga mengalami kemajuan signifikan dalam penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat pada tahun 2017. Capaian-capaian dalam dimensi penggunaan antara lain:

- Sebanyak 299.839.004 rekening di perbankan atau meningkat 50% dibandingkan tahun 2016,
- Sebanyak 13.645.396 Basic Savings Account atau meningkat 269% dibandingkan tahun 2016,
- Sebanyak 1.456.653 uang elektronik terdaftar di agen LKD atau meningkat 17% dibandingkan tahun 2016,
- Sebanyak 42.507.275 kredit perbankan atau meningkat 2% dibandingkan tahun 2016,
- Sebanyak 14.027.067 kredit UMKM atau meningkat 3% dibandingkan tahun 2016.

#### **4.1.5 Literasi Keuangan**

Carpena et. al (2011) menyatakan ada 3(tiga) dimensi dari literasi keuangan yaitu (1) keterampilan menghitung (2) pemahaman tentang keuangan dasar, dan (3) sikap terhadap keputusan keuangan. Sedangkan Willis (2008) menyatakan bahwa pengetahuan dalam konteks literasi keuangan meliputi pengetahuan, edukasi, dan informasi mengenai keuangan dan sumbernya, perbankan, deposito, kredit, asuransi dan pajak.

Pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh seseorang tersebut kemudian berkembang menjadi keterampilan keuangan, dimana keterampilan keuangan itu sendiri didefinisikan sebagai kemampuan dalam menerapkan pengetahuan keuangan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari (Palameta et.al, 2016). Keterampilan keuangan memungkinkan seseorang untuk dapat mengambil keputusan yang rasional dan efektif terkait dengan keuangan dan sumber ekonominya (Kurihara, 2013). Berbagai studi menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki peran yang strategis untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan individu. Modigliani dan Brumberg (1954) serta Friedman (1957) dalam Lusardi & Mitchell (2007) menjelaskan bahwa konsumen diposisikan untuk mengatur simpanan dan pengeluaran secara optimal agar memberikan manfaat sepanjang masa hidupnya. Kesimpulan dari studi lain yang dilakukan oleh Lusardi & Mitchell (2007) mengindikasikan bahwa rumah tangga yang memiliki literasi keuangan rendah cenderung tidak merencanakan masa pensiunnya dan memiliki aset yang rendah. Sedangkan Adams dan Rau (2011) menegaskan bahwa literasi keuangan mempunyai peran utama dalam persiapan masa pensiun. Riset menunjukkan bahwa pemahaman prinsip-prinsip dasar menabung, seperti *compound interest* mempunyai pengaruh langsung pada persiapan keuangan di hari tua. Boom et.al (2011) juga mengemukakan bahwa individu yang memiliki literasi keuangan lebih siap dalam melakukan perencanaan keuangan pribadinya. Dalam penelitian lain, Carpena et.al (2011) menemukan bahwa edukasi keuangan mempengaruhi kesadaran dan sikap seseorang terhadap produk keuangan dan penggunaan berbagai instrumen perencanaan keuangan yang tersedia.

*Organisation for Economic Co-operation and Development* atau *OECD* (2016) mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan resiko keuangan, berikut keterampilan, motivasi, serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya tersebut dalam rangka membuat keputusan keuangan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan (*financial well being*) individu dan masyarakat, dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi. Remund (2010) menyatakan bahwa literasi keuangan, dan memiliki kemampuan dan keyakinan untuk mengatur keuangan pribadi melalui pengambilan keputusan jangka pendek yang tepat, perencanaan keuangan jangka panjang, serta memperhatikan kejadian dan kondisi ekonomi. Huston (2010) mengatakan literasi keuangan meliputi kesadaran dan pengetahuan akan instrumen keuangan dan aplikasinya di dalam bisnis dan kehidupannya.

OECD (2006) menjelaskan bahwa tanpa memiliki literasi keuangan yang memadai, individu tidak dapat memilih produk tabungan ataupun investasi yang sesuai untuk dirinya dan beresiko terkena risiko *fraud*. Peneliti World Bank, Xu dan Zia (2012) menemukan bahwa di negara maju, literasi keuangan berkorelasi dengan perencanaan masa pensiun dan berasosiasi terhadap kebiasaan investasi yang lebih canggih.

Literasi keuangan dalam dunia keuangan merupakan konsep yang baru, meskipun sejarah telah menunjukkan bahwa literasi keuangan sudah dimulai sejak tahun 1787 pada saat John Adam menulis surat yang ditujukan kepada Thomas Jefferson mengenai perlunya literasi keuangan. Sampai saat ini banyak pengertian mengenai literasi keuangan mulai dari kesadaran dan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan keuangan dalam praktiknya konsep ini sering tumpang tindih.

“Financial Literacy adalah pengambilan keputusan individu yang menggunakan kombinasi dari beberapa keterampilan, sumber daya, dan pengetahuan kontekstual untuk mengolah informasi dan membuat keputusan berdasarkan dengan resiko keuangan dari keputusan tersebut”.

Pengetahuan keuangan dapat digunakan untuk alat dalam pengambilan keputusan keuangan. Selain pengetahuan keterampilan dan sumber daya juga mempengaruhi keputusan, seorang individu harus memiliki keterampilan dalam membaca, menganalisis serta mengatur keuangan mereka agar lebih baik. Keterampilan keuangan setiap orang tentunya berbeda-beda tergantung bagaimana mereka memaksimalkan keterampilan yang dimiliki dan sumber daya yang ada. sumber daya keuangan harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar tidak kekurangan dan hidup akan sejahtera.

Literasi keuangan adalah mencakup kemampuan untuk membedakan pilihan keuangan, membahas uang dan masalah keuangan tanpa ketidaknyamanan, merencanakan masa depan, dan menanggapi kompeten untuk peristiwa kehidupan yang mempengaruhi keputusan keuangan sehari-hari, termasuk peristiwa di ekonomi secara umum. Literasi keuangan terjadi manakala seorang individu memiliki sekumpulan keahlian dan kemampuan yang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Literasi keuangan membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Semakin meningkatnya kompleksitas ekonomi, kebutuhan individu dan produk keuangan, individu harus memiliki literasi keuangan untuk mengatur keuangan pribadinya.

Sedangkan tujuan pembangunan Literasi keuangan untuk jangka panjang adalah

1. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate*.
2. Meningkatkan jumlah pengguna produk Jasa Keuangan.

Namun demikian, menurut OJK, tujuan Literasi keuangan tersebut tidak dapat tercapai dengan optimal apabila faktor-faktor eksternal lainnya tidak mendukung. Faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi keberhasilan literasi keuangan tersebut antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Pendapatan Per kapita
3. Distribusi Pendapatan
4. Tingkat Kemiskinan Masyarakat
5. Tingkat Pendidikan Masyarakat
6. Komposisi Penduduk Yang Berusia Produktif, dan
7. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan sebagai pengetahuan keuangan, dengan tujuan mencapai kesejahteraan. Hal ini dapat dimaknai bahwa persiapan perlu dilakukan untuk menyongsong globalisasi, dan lebih spesifiknya yaitu globalisasi dalam bidang keuangan. Hilgert, Holgart juga menyatakan bahwa diperlukan pengetahuan tentang bagaimana mengelola keuangan serta bagaimana teknik berinvestasi menjadi hal yang tidak dapat diabaikan lagi seperti waktu-waktu sebelumnya. Pengetahuan keuangan yang kurang tinggi, dan hal ini dapat menyebabkan tidak terarah dengan tepat pada saat membuat keputusan keuangan

setiap hari. Luasardi dan mitchell mendefinisikan melek keuangan sebagai pengetahuan keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya. Sementara menurut RPOJK literasi dan inklusi keuangan, menerangkan bahwa literasi keuangan adalah pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), dan keterampilan (*skill*), yang mempengaruhi sikap (*attitude*), dan perilaku (*behaviour*), untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

#### **4.1.6 Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Untuk Meningkatkan Keuangan Inklusif Di Indonesia**

Secara umum, tingkat inklusi keuangan Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup berarti dalam konteks perbandingan secara global. Kepemilikan rekening di lembaga jasa keuangan formal di Indonesia berdasarkan survei *Global Findex* 2017 sebesar 48,9% atau meningkat sebesar 12,8% dari tahun 2014. Peningkatan kepemilikan rekening di Indonesia adalah tertinggi di antara negara-negara di kawasan asia timur dan pasifik. Kepemilikan rekening di antara perempuan dewasa lebih tinggi sebesar 5% daripada laki-laki dewasa sedangkan secara global kepemilikan rekening laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

Pekerjaan rumah bagi Dewan Nasional Keuangan Inklusif dalam mencapai target inklusi keuangan sebagaimana tercantum dalam Perpres No 82/2016 belum selesai. Untuk mencapai target 75% inklusi keuangan pada tahun 2019, maka Indonesia perlu menambah 54.388.751 penduduk dewasa memiliki rekening di lembaga keuangan formal.

Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah menerbitkan strategi untuk meningkatkan Inklusi keuangan masyarakat

**1. Peraturan presiden no 82/2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif**

Pada 1 september 2016, Presiden Joko Widodo menetapkan strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang menjadi visi dan pedoman strategis bagi kementerian/Lembaga dalam meningkatkan akses bagi masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Perpres ini juga memuat pembentukan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang bertugas untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan SNKI, menguraikan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah SNKI. Komitmen terhadap SNKI dipertegas oleh keputusan Presiden Joko Widodo untuk menjadi ketua DNKI.

**2. Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian No 93/2017 tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif**

Sebagai tindak lanjut Perpres No 82/2016, kementerian coordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan Kepmenko No 93/2017 tentang pembentukan tujuh kelompok kerja (Pokja) dan Sekretariat yang bertugas membantu Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Kepmenko ini mengatur tentang susunan keanggotaan Pokja dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari tiap Pokja.

**3. Peraturan menteri Koordinator Perekonomian No 6/2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Dewan Nasional Keuangan Inklusif**

Permenko No 6/2017 mengatur tentang:

- 1) Forum rapat Dewan Nasional, rapat koordinasi keuangan inklusif, rapat koordinasi antara Pokja, rapat Pokja, dan rapat Sekretariat.
- 2) Laporan Pokja, Laporan Sekretariat, dan Laporan Dewan Nasional

Ada juga program penjangkauan masyarakat terkait dengan Inklusi Keuangan antara lain:

### **1. Program-program bantuan NonTunai dari Pemerintah ke Masyarakat**

Sejak ditetapkan pertauran Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara Non tunai pada tanggal 12 Juli 2017 pemerintah berkomitmen untuk menyalurkan bantuan bagi masyarakat penerima manfaat secara nontunai. Agar bantuan dapat disalurkan secara efektif, masyarakat penerima manfaat wajib memiliki rekening simpanan di bank milik BUMN yang tergabung dalam HIMBARA. Kementerian yang menyelenggarakan program bekerja sama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan HIMBARA memfasilitasi masyarakat untuk membuka rekening simpanan. Program yang berkontribusi besar terhadap pembukaan rekening simpanan adalah program Bantuan Sosial NonTunai yang telah menjangkau 6 juta peserta program Keluarga Harapan hingga akhir tahun 2017. Keluarga penerima manfaat merupakan keluarga miskin, salah satu kelompok sasaran utama SNKI karena tingkat inklusi penduduk miskin pada tahun 2014 baru mencapai 22%. Program lain yang berkontribusi besar pada penyaluran subsidi pupuk melalui Kartu Tani yang memiliki fitur tabungan dan uang.



Selain program-program di atas, program-program lain yang berkontribusi terhadap pembukaan rekening antara lain:

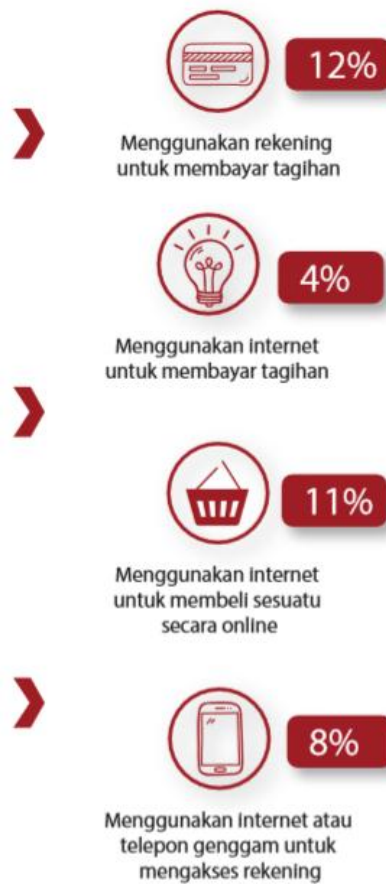
- Simpanan Pelajar dan/atau Kartu Indonesia Pintar
- Bantuan Pangan NonTunai (BPNT)
- Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar)

**2. Upaya bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mendorong pertumbuhan agen bank yang menjadi ujung tombak untuk menjangkau masyarakat pada saat pertumbuhan infrastruktur seperti kantor cabang dan ATM melambat.**

Seperti yang dikemukakan di atas, hingga Desember 2017, jumlah agen layanan Keuangan Digital mencapai 204.960 agen sedangkan jumlah agen Laku Pandai mencapai 740.121 agen. Sejak 2015, lebih dari 1,4 juta uang elektronik terdaftar telah dibuka melalui agen Laku Pandai

**4.1.7 Transaksi Keuangan Secara Digital**

Selain kebijakan-kebijakan di atas OJK dan Bank Indonesia juga mengeluarkan Kebijakan Inklusi keuangan Dengan Teknologi Digital. Indonesia mengalami kemajuan yang pesat dalam transaksi keuangan secara digital dalam kurun waktu tiga tahun. Sebanyak 35% penduduk dewasa telah melakukan atau menerima pembayaran secara digital atau meningkat 13% dibandingkan hasil tahun 2014. Besarnya penduduk dewasa yang menggunakan transaksi digital untuk keperluan tertentu antara lain:



**Gambar 4.4**

### **Penggunaan Transaksi Digital**

#### **1. Berkembangnya *Less Cash Society* (LCS) di Indonesia**

Sejak peluncuran Gerakan Nasional NonTunai pada pertengahan tahun 2014, berbagai instrumen transaksi nontunai tumbuh secara signifikan. Salah satunya adalah alat transaksi pembayaran berupa mesin EDC dan uang elektronik makin tersedia di toko-toko, rumah makan, gerbang tol, dan stasiun/halte transportasi umum. Instrument lain yang tumbuh pesat adalah menjamurnya toko-toko online yang melayani berbagai transaksi ekonomi. Arahkan untuk menciptakan LCS tersebut diperkuat dengan terbitnya instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi

pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan Tahun 2017. Pada butir 18 lampiran Inpres 10/2016 tersebut diinstruksikan aksi percepatan implemementasi transaksi nontunai diseluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Selanjutnya menteri dalam negeri menindaklanjuti intruksi Presiden tersebut dengan mengirimkan surat edaran Nomor 910/1866/SJ tanggal 1 April 2017 tentang implementasi transaksi NonTunai pada pemerintah daerah kepada Gubenur KDH provinsi seluruh, seta SE Nomor 910/1876/SJ kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Pelaksanaan transaksi nontunai pada pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2018 yang meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah.

## **2. Melejitnya Teknologi finansial (tekfin) di Indonesia**

Sejak munculnya transportasi online pada tahun 2015, teknologi finansial berkembang pesat di Indonesia dan melayani berbagai sektor. Masyarakat menyambut baik kehadiran tekfin dan terus meningkatkan transaksi melalui tekfi. Pada tahun 2017, nilai transaksi tekfin diperkirakan mencapai sekitar 250 trilyun rupiah. Melejitnya tekfin memberikan dampak positif terhadap perilaku industry jasa keuangan (PUJK). Pertama, PUJK menciptakan inovasi-inovasi yang meningkatkan daya saing seperti produk-produk inovatif dan melakukan digitalisasi layanan. Kedua, PUJK berinisiatif berkerjasama dengan pelaku tekfin dalam melayani masyarakat. Berkembangnya tekfin tidak terlepas dari peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan kepastian hukum terhadap tekfin. Bank Indonesia telah membuka *Fintech Office*

yang merupakan wadah asesmen, mitigasi risiko, dan evaluasi atas model bisnis dan produk/layanan dari tekfin, serta inisiator riset terkait kegiatan layanan keuangan berbasis teknologi. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang mengatur penyelenggaraan dan tata kelola layanan keuangan oleh tekfin serta pengawasan oleh OJK.

### **3. Pertumbuhan Jaringan Internet Memfasilitasi Digitalisasi Layanan Keuangan**

Menurut Kominfo, layanan jaringan 4G telah menjangkau 55% dari seluruh desa di Indonesia. Artinya, masyarakat di lebih dari 45 ribu desa di Indonesia dapat menikmati layanan 4G. Industri jasa keuangan pun dapat memperluas digitalisasi layanan keuangan hingga wilayah pedesaan. Sebagai contoh, agen-agen laku pandai yang melayani pembayaran tagihan dan transfer dana dan sebagai agen dapat membuka rekening simpanan melalui telepon seluler bagi masyarakat desa.

Sebagai respon untuk mencapai target keuangan inklusif, sekertariat mengusulkan strategi-strategi percepatan keuangan inklusif, sebagai berikut:

#### **1. Menciptakan inovasi dalam layanan keuangan yang menjangkau seluruh masyarakat.**

- Pemanfaatan data biometrik atau pengenalan wajah untuk *Know Your Customer* yang memudahkan dan mempercepat pembukaan rekening tanpa tatap muka, pengajuan kredit, dan verifikasi transaksi yang lebih sederhana,

- Mempermudah proses pembukaan rekening baim secara tatap muka tidak langsung, memanfaatkan informasi nomor seluler teregistrasi, dan memanfaatkan data Nomor Induk Kependudukan

**2. Memperluas layanan keuangan melalui sinergi dengan Telko dan lembaga selain bank.**

- Bekerja sama dengan lembaga selain bank (Pos Indonesia, Pegadaian, Telko, Tekfin) untuk memperluas jaringan layanan keuangan dan mengizinkan lembaga-lembaga tersebut menggunakan agen/retailernya untuk menyediakan layanan keuangan
- Memfasilitasi layanan keuangan melalui pelaku *Fintech*,

**3. Mendorong penguatan peran koperasi (Koperasi Simpan Pinjam dan *Credit Union*) khususnya di pedesaan untuk memperluas jangkauan layanannya.**

- Meningkatkan jumlah KSP/*Credit Union* yang menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat
- Memperkuat pengawasan KSP/*Credit Union* sehingga menjamin keamanan layanan keuangan di KSP/*Credit Union* bagi masyarakat yang menggunakannya

**4. Meningkatkan infrastruktur yang mendukung inklusi keuangan.**

- Layanan keuangan (tabungan dan uang elektronik) yang *inteporable* dan interconnected
- Perluasan jaringan telekomunikasi, informasi, dan listrik

- Perluasan pemanfaatan transaksi keuangan non-tunai (tabungan dan uang elektronik)

**5. Meningkatkan kesadaran dan literasi keuangan**

- Kampanye nasional tentang kesadaran membuka rekening simpanan di lembaga keuangan formal atau uang elektronik di penyelenggara uang elektronik
- Kampanye wajib membuka/menggunakan rekening bagi kelompok sasaran tertentu,

**6. Mempercepat sertifikasi hak properti masyarakat**

- Mempercepat sertifikasi tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,
- Sertifikasi aset-aset produktif lainnya yang dimiliki oleh masyarakat

**Tabel 4.1**

**Data Transaksi Keuangan Digital**

TKD	IKE	PDB	FIN	PI
137900779	1385012	81564978	25	712
203369990	2110834	85648666	40	881
535579528	2938864	89825171	60	1102
683133352	3866701	94346134	90	1327
943319933	5634184	99127036	165	14326

## 4.2 Analisa Model Ekonometrika

### 4.2.1 Statistik Deskriptif

Stat

istik deskriptif bertujuan untuk melihat frekuensi data independen dan data dependen, serta sebaran data dan peningkatan maksimum dan minimum dari data.

Adapun hasil dari pengujian berikut:

**Tabel 4.2**  
**Statistik Deskriptif Model**

Date: 03/12/19 Time: 18:29					
Sample: 2013 2017					
	TKD	PDB	FIN	IKE	PI
Mean	5.01E+08	90102397	76.00000	3187119.	3669.600
Median	5.36E+08	89825171	60.00000	2938864.	1102.000
Maximum	9.43E+08	99127036	165.0000	5634184.	14326.00
Minimum	1.38E+08	81564978	25.00000	1385012.	712.0000
Std. Dev.	3.36E+08	6932776.	55.38502	1652087.	5961.604
Skewness	0.139379	0.084550	0.862594	0.486756	1.494359
Kurtosis	1.592788	1.713075	2.367640	2.012003	3.242453
Jarque-Bera	0.428740	0.350994	0.703365	0.400805	1.873170
Probability	0.807050	0.839040	0.703504	0.818401	0.391964
Sum	2.50E+09	4.51E+08	380.0000	15935595	18348.00
Sum Sq. Dev.	4.50E+17	1.92E+14	12270.00	1.09E+13	1.42E+08
Observations	5	5	5	5	5

Dari hasil statistik deskriptif di atas, menunjukkan bahwasannya dalam rentang tahun 2013-2017, nilai mean dari TKD di Indonesia sebesar 5,01 Milyar

Rupiah, artinya bahwa dalam pertahun nilai transaksi keuangan digital di indonesia sebesar 5,01 Milyar Rupiah, sementara nilai mean dari variabel PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 90,1 Triliun Rupiah ini berarti dalam kurun waktu 5 tahun PDB yang diterima indonesia adalah sebesar 90,1 Triliun Rupiah, sementara nilai mean dari variabel FIN (Fintech) sebesar 76 unit perusahaan penyelenggara fintech berarti dalam kurun waktu 5 tahun penyelenggara perusahaan fintech bertumbuh sebanyak 76 unit perusahaan penyelenggara fintech.

Adapun mean variabel IKE (Infrastruktur Keuangan Elektronik) adalah sebesar 318 juta unit infrastruktur yang tersedia rata-rata pertahun untuk infrastruktur keuangan elektronik per tahun sebanyak 318 juta unit. Sementara nilai mean dari variabel PI (Pengguna Internet) 3669.6 juta orang ini menunjukkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pengguna internet bertumbuh sebanyak, rata-rata 3669.6 juta orang.



#### 4.2.2 Analisis Hasil Regresi

Tabel 4.3

Model: Pengaruh PDB, Fintech, Infrastruktur Keuangan Elektronik dan Pengguna Internet Terhadap Transaksi Keuangan

Digital

VARIABEL	OLS (ORDINARY LEAST SQUARE)			OLS (SETELAH DI INTERPOLASI) 4Q	
	Model 1	Model 2 Dengan (Ln)	Model 3 dengan Autoregressive	Model 1 4Q	Model 2 4Q dengan (Ln)
PDB	-3.248316*	0.092667*	0.939605*	-1180.70*	-3.717991*
	(-0.731048)	(0.022441)	(6.640886)	(-4.359385)	(-0.486984)
FIN	-1647646*	0.486073*	-	-60895740*	-2.393368*
	(-0.080043)	(0.102817)	-	(-5.387184)	(-0.316472)
IKE	300.9060*	1.181090*	-	7950.953*	6.607691*
	(0.546727)	(0.190284)	-	(4.870672)	(0.604802)
PI	11035.11*	-0.196424*	-	-275461.7*	-0.254291*
	(-0.209861)	(-0.433682)	-	(-3.952952)	(-0.484295)
Konstanta	-	-	-	2.1800	-
Num. of Observation	5	5	5	16	16
Adj R-Square	0.908054	0.856391	0.445916	0.974431	0.533502
R (Correlation)	0.977014	0.964098	0.261221	0.981249	0.626801
Uji F	-	-	-	143.9124*	-
	-	-	-	(0.000000)	-
D-W (Durbin Watson)	3.338280	3.396827	0.464164	2.964961	2.0522713
Prob>chiq	0	0	0	0	

Keterangan: Level of Signifikan,\*\*\*1%, \*\*5% dan \*10%

Sumber: Eviews dan diolah

Dari hasil regresi pertama di atas, ditemukan masalah autokorelasi dan variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Sehingga diduga perlu dilakukan treatment agar mencapai BLUE. Metode yang digunakan dalam menentukan autokorelasi dalam hal ini adalah dengan menggunakan statistik Durbin Watson. Untuk mengatasi autokorelasi maka dilakukan uji *autoregressive*. Namun sebelum uji *autoregressive*, perlu dilakukan uji logaritma natural karena ditemukannya nilai probability yang melebihi derajat kesalahan.

Dalam hasil uji logaritma natural di atas didapat hasil bahwasannya semua variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Tetapi dalam regres data logaritma ini masih ditemukan masalah auto korelasi sehingga dilanjutkan dengan test *autoregressive*.

Hasil uji *autoregressive*, maka didapat hasil bahwasannya variabel terikat memiliki pada tahun sebelumnya memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Namun dalam model tersebut masih terdapat masalah autokorelasi. Untuk mengatasi ini maka akan dilakukan perbaikan data berupa interpolasi data, yang akan membagi data menjadi tiwulan atau 4 kuartal.

Setelah dilakukannya interpolasi data hasil nilai  $R^2$  adalah 98.12% dan nilai dari Adjusted- $R^2$  97.4% namun masih didapati masalah *autokorelasi*, maka dari itu dilakukan perbaikan dengan logaritma natural. Setelah dilakukan logaritma natural didapati nilai durbin watson D-W sebesar 2.0522, dengan nilai itu dapat dikatakan bahwa. Model sudah terbebas dari masalah *autokorelasi*.

### 4.2.3 Penafsiran

#### 4.2.3.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) berarti proporsi presentase variabel total dalam menjelaskan variabel terikat (dependen) yang dijelaskan oleh variabel bebas (independen) secara bersama-sama. berdasarkan model estimasi yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi Transaksi Keuangan Digital Indonesia setelah dilakukan uji regresi dapat dilihat bahwa  $R^2$  adalah sebesar 97.70%, artinya secara bersama-sama variabel PDB, FIN, IKE, PI memberikan variasi penjelasan terhadap transaksi keuangan digital. Sedangkan nilai 2.30% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model estimasi atau berada pada *disturbance error term*.

#### 4.2.3.2 Korelasi (R)

Dari hasil regress pada model estimasi variabel-variabel yang mempengaruhi TKD Indonesia diperoleh nilai R sebesar 0,908054 atau 90,80% artinya variabel FIN, IKE, PI, PDB dapat menjelaskan variabel terikat TKD secara signifikan.

Suatu variabelbebas dikatakan memiliki kekuatan hubungan yang positif terhadap variabel terikat apabila memiliki nilai koefisien bertanda positif dan bernilai 0,10 ( $\alpha = 10\%$ ) dan dikatakan signifikan apabila nilai *probability* dari variabel bebas tersebut lebih kecil atau tingkat kesalahan  $\alpha$  10%.

#### 4.2.4 Interpretasi Hasil

Dari data yang telah diperoleh maka persamaan regresi berikut dan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan hasil regresi *Ordinary Least Square* sebagai berikut:

$$TKD_t = (-1.647) FIN_t + 300.90 IKE_t + (-1.1035) PI_t + (-3.248) PDB_t + \varepsilon_t$$

Dari hasil estimasi yang diperoleh dapat dibuat sebuah interpretasi model atau hipotesa yang diambil melalui hasil regresi ini, yaitu:

- a. Bahwa variabel FIN (Fintech) mempunyai pengaruh yang positif terhadap Transaksi Keuangan Digital (TKD), sebab nilai koefisien variabel FIN lebih kecil (<) dari  $\alpha$  10% yaitu 0.486073 %. Artinya, apabila nilai TKD dinaikkan sebesar 1 Milyar, maka akan menaikkan Transaksi Keuangan Digital sebesar 0.486073 Milyar Rupiah. (*ceteris paribus*)
- b. Bahwa Variabel Infrastruktur Keuangan Elektronik (IKE) mempunyai pengaruh positif terhadap Transaksi Keuangan Digital (TKD), sebab nilai koefisien variabel IKE lebih besar (>) dari  $\alpha$  10% yaitu 1.18%. Artinya, apabila nilai IKE (jutaan unit) dinaikkan sebesar 1 juta unit maka akan meningkatkan nilai TKD sebesar 1.18 Juta Unit (*ceteris paribus*)
- c. Bahwa variabel Pengguna Internet (PI) mempunyai pengaruh negatif terhadap Transaksi Keuangan Digital (TKD), sebab nilai koefisien variabel PI lebih kecil (<) dari  $\alpha$  10% yaitu 0.196%. artinya, apabila nilai PI (Jutaan Orang) dinaikkan sebesar 1 juta orang, maka akan mengurangi nilai TKD sebesar 0.196 (*ceteris paribus*).
- d. Bahwa variabel produk Domestik Bruto (PDB) mempunyai pengaruh negatif terhadap Transaksi Keuangan Digital (TKD), sebab nilai koefisien

variabel PDB lebih kecil ( $<$ ) dari  $\alpha$  10% yaitu 0.0926%. artinya, apabila nilai PDB (Triliun Rupiah) dinaikkan sebesar 1 triliun rupiah, maka akan mengurangi nilai TKD sebesar 0.0926% (*ceteris paribus*).

#### **4.2.5 Uji statistik**

##### **1) Pengujian Signifikan Simultan (Uji-F)**

Uji-f statistik bertujuan untuk pengujian signifikan semua variabel independen secara bersama-sama terhadap nilai variabel dependen. Dari hasil regresi dengan menggunakan *Ordinary Least Square*. Pada regresi pertama tidak muncul nilai f statistik maka dari itu diteruskan dengan menginterpolasi data. Pada model pertama setelah interpolasi data dengan model Transaksi Keuangan Digital (TKD) dengan variabel bebas Fintech (FIN), PDB, Pengguna Internet (PI) dan Infrastruktur Keuangan Digital (IKE), maka nilai  $F_{\text{tabel}}$  sebesar 0.00000 (dibawah 10%), sedangkan nilai  $F_{\text{hitung}}$  adalah sebesar 143.91. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

##### **2) Uji Signifikan Parameter Individual (Uji-t)**

Uji-t statistik dilakukan bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual menjelaskan variasi variabel independen. Regresi pengaruh TKD, IKE, PI, PDB, FIN pada model dengan uji interpolasi data adapaun dalam penelitian ini untuk melihat  $t_{\text{tabel}}$  yaitu: 10% atau 3.078.

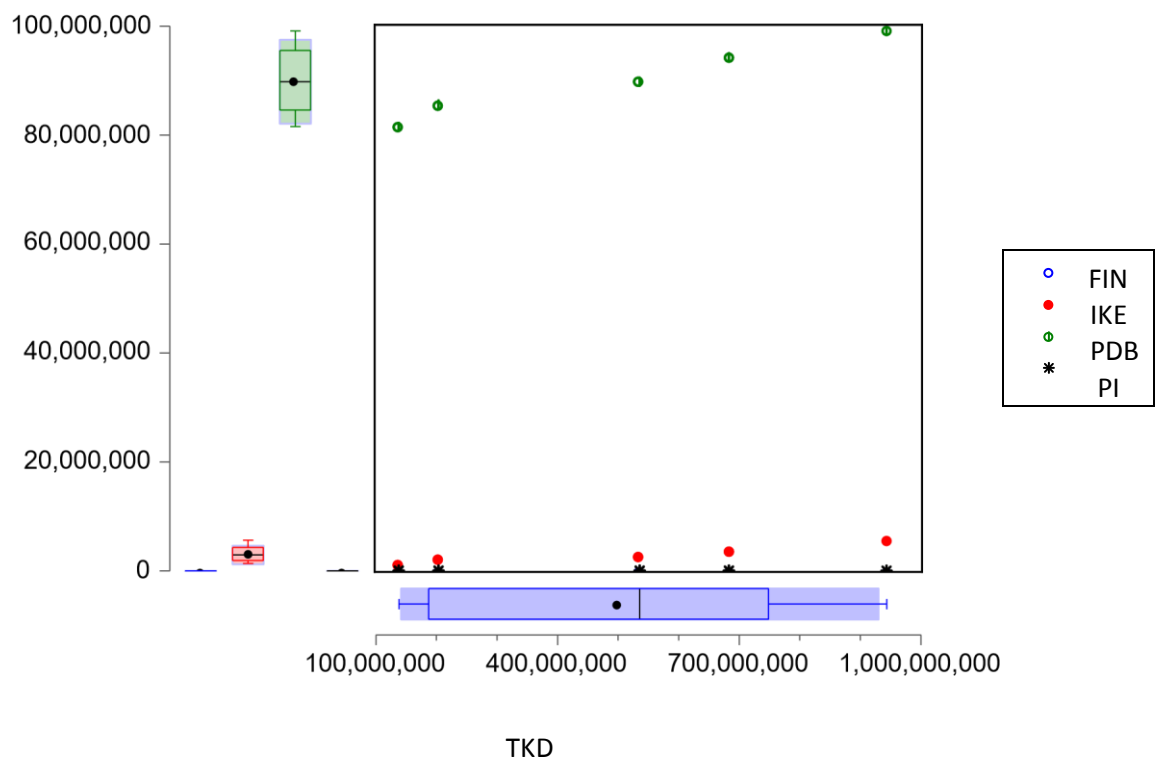
## 4.2.6 Uji Asumsi Klasik

### 4.2.6.1 Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan terdapat adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Syarat model regresi yang baik adalah seharusnya terbebas dari multikolinieritas, karena tidak ada tanda koefisien yang berubah (sesuai dengan hipotesa). Ada beberapa variabel dependen yang tidak signifikan terhadap variabel terikat dalam uji parsial.

### 4.2.5.2 Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual sama pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut terjadi heterokedastisitas. Untuk melihat ada atau tidak heterokedastisitas, dapat dilakukan dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya. Dasar analisa heterokedastisitas sebagai berikut:



### **Gambar 4.5**

#### **Scatter Plot Model TKD**

Gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak membentuk pola garis lurus walaupun tak sejajar serta tersebar ke atas,dan samping dengan demikian tidak terjadi heterokedastisitas.

#### **4.2.5.3 Autokorelasi**

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$ (sebelumnya). Untuk menguji apakah suatu mode terdapat autokorelasi dalam penelitian ini maka digunakan uji statistik Durbin Watson yaitu dengan melihat nilai (D-W) yang diperoleh. Pada model autoregressive pertama diperoleh Durbin-Watson sebesar 3.338 yang artinya pada model terdapat autokorelasi positif dan membutuhkan teratment agar tidak terjadi bias. Kesalahan terjadi ada pada data sehingga dilakukan beberapa teratment perbaikan agar terbebas dari auto korelasi tidak menghasilkan hal yang diharapkan. Maka data yang di regress selanjutnya akan di interpolasi, yaitu membagi data menjadi triwulan atau 4 kuartal. Setetalh di interpolasi, data yang tersedia sudah tidak mengalami maslah autokorelasi dengan diperbaiki dengan logaritma natural (Ln) didapat nilai durbin watson (D-W) 2.0522 setelah dilakukan uji logaritma natural.

### 4.3 Analisis Tipologi Klassen

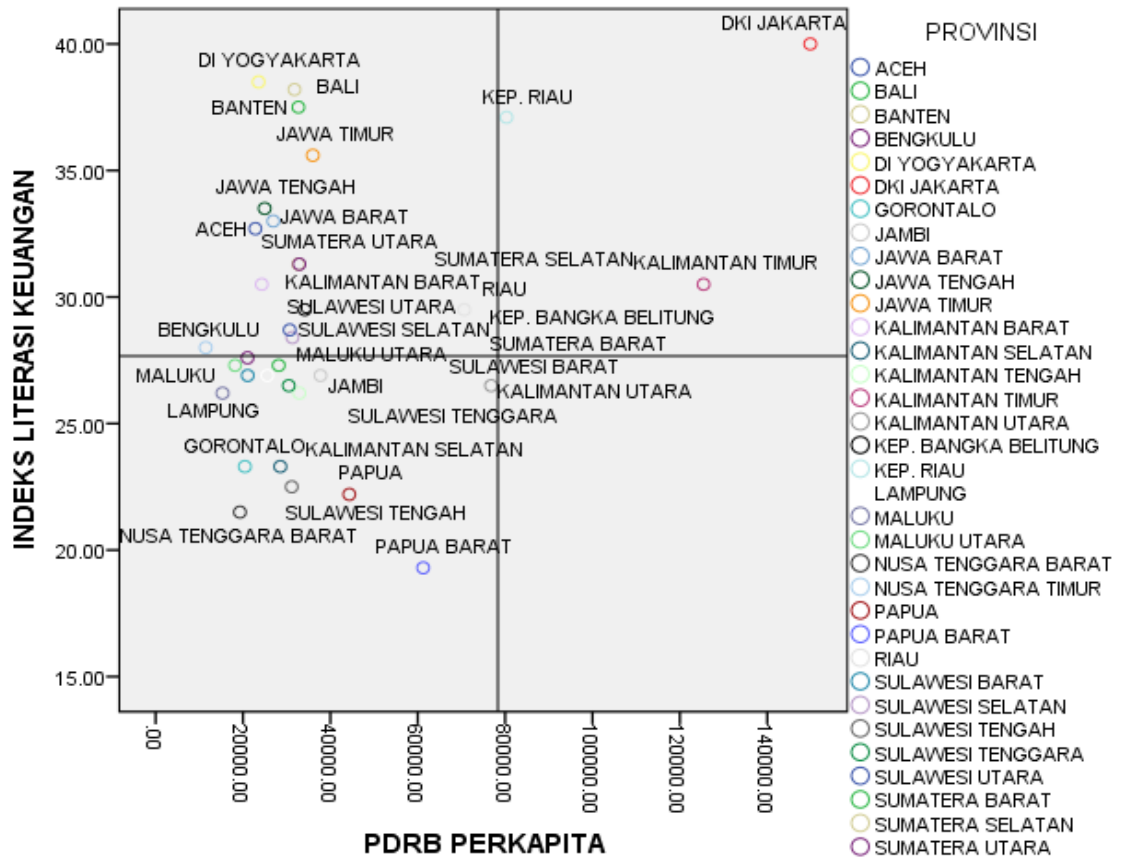
Tip

ologi *klassen* yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor, sub sektor, usaha atau komoditi prioritas berdasarkan 3 indikator utama yaitu Indeks Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan dan PDRB Perkapita. Guna memetakan inklusi keuangan dan literasi keuangan seluruh provinsi di Indonesia,

#### 4.3.1. Analisis Tipologi Klassen Literasi Keuangan dan PDRB Perkapita tahun 2016

Untuk mengetahui klasifikasi daerah didasarkan pada dua indikator utama yaitu Literasi Keuangan dan PDRB Perkapita. Dengan menentukan Indeks Literasi keuangan per provinsi di Indonesia sebagai vertikal dan PDRB Perkapita per provinsi sebagai horizontal, sedangkan pembagian provinsi dibagi menjadi empat golongan. Yaitu provinsi yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), Provinsi maju tapi tertekan (*high income but low growth*), Provinsi yang berkembang cepat namun tertekan (*high growth but low income*) dan Provinsi yang relatif tertinggal (*low growth and low income*). Daerah yang diamati dalam penelitian ini merupakan provinsi yang terdapat di Indonesia dengan pengklasifikasian menjadi empat kuadran provinsi yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), Provinsi maju tapi tertekan (*high income but low growth*), Provinsi yang berkembang cepat namun tertekan (*high growth but low income*) dan Provinsi yang relatif tertinggal (*low growth and low income*). Penerapan ini dilakukan dengan melihat Indeks Literasi keuangan Per Provinsi di Indonesia dan PDRB Perkapita di setiap provinsi di Indonesia





**Gambar 4.6**

**Tipologi Klassen Literasi Keuangan dan PDRB Perkapita**

*Sumber: SPSS dan diolah*

Berdasarkan hasil analisis tipologi klassen yang tertera pada gambar diatas Indonesia terdiri dari 34 Provinsi dibagi dalam 4 kuadran berdasarkan total Inklusi Keuangan dengan PDRB Perkapita. Hasil per provinsi pada tahun 2016 diperoleh sebagai berikut.

**Tabel 4.6**

**Tipologi Daerah Berdasarkan Literasi Keuangan dengan PDRB Perkapita  
Tahun 2016**

PDRB per kapita (y) Literasi Keuangan (r)	$(y_i < y)$	$(y_i > y)$
$(r_i > r)$	<p><b>Kuadran II:</b> DI Yogyakarta, Bali, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Kep Bangka, Sumatera Barat</p>	<p><b>Kuadran I:</b> DKI Jakarta, Kep Riau, Kalimantan Timur</p>
$(r_i < r)$	<p><b>Kuadran III:</b> Maluku, Maluku Utara, Jambi, Sulawesi barat, Kalimantan Utara, Lampung, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Selatan Papua, NTB, Sulawesi Tengah, Papua Barat</p>	<p><b>Kuadran IV:</b></p>

*Sumber: SPSS dan diolah*

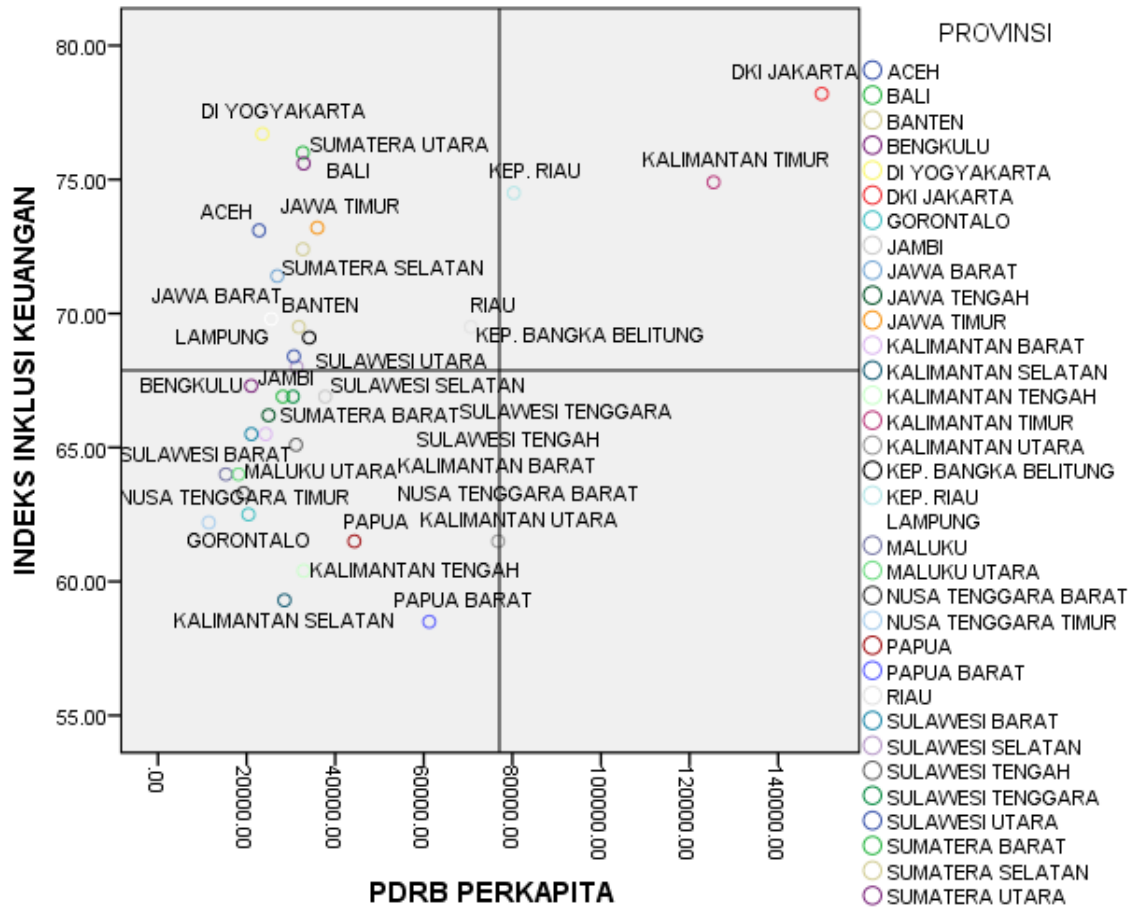
Kuadran I terdiri dari Provinsi yang tinggi tingkat Literasi keuangan dan PDRB perkapitanya, untuk itu ada provinsi DKI Jakarta, Kep Riau, Kalimantan Timur. Untuk di Kuadran II dengan PDRB Perkapita yang tinggi tetapi tingkat Inklusi keuangan yang rendah ada Provinsi DI Yogyakarta, Bali, Banten, Jawa

Timur, Jawa Tengah, Aceh, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat. Sedangkan untuk Kuadran III ada provinsi Maluku, Maluku Utara, Jambi, Sulawesi barat, Kalimantan Utara, Lampung, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Selatan Papua, NTB, Sulawesi Tengah, Papua Barat. Sedangkan dalam kuadran IV yang artinya daerah tertinggal tidak ada provinsi yang termasuk ke dalamnya.

#### **4.3.2 Analisis Tipologi Klassen PDRB Perkapita Dengan Indeks Inklusi Keuangan**

Untuk mengetahui klasifikasi daerah didasarkan pada dua indikator utama yaitu Inklusi Keuangan dan PDRB Perkapita. Dengan menentukan Indeks Inklusi keuangan per provinsi di Indonesia sebagai vertikal dan PDRB Perkapita per provinsi sebagai horizontal, sedangkan pembagian provinsi dibagi menjadi empat golongan. Yaitu provinsi yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), Provinsi maju tapi tertekan (*high income but low growth*), Provinsi yang berkembang cepat namun tertekan (*high growth but low income*) dan Provinsi yang relatif tertinggal (*low growth and low income*). Daerah yang diamati dalam penelitian ini merupakan provinsi yang terdapat di Indonesia dengan pengklasifikasian menjadi empat kuadran provinsi yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), Provinsi maju tapi tertekan (*high income but low growth*), Provinsi yang berkembang cepat namun tertekan (*high growth but low income*) dan Provinsi yang relatif tertinggal (*low growth and low income*). Penerapan ini dilakukan dengan melihat Indeks Inklusi keuangan Per

Provinsi di Indonesia dan PDRB Perkapita di setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2016.



Gambar 4.7

**Tipologi Klassen Inklusi Keuangan Dengan PDRB Perkapita**

Berdasarkan hasil analisis tipologi klassen yang tertera pada gambar di atas Indonesia terdiri dari 34 provinsi dibagi dalam 4 kuadran berdasarkan total Inklusi Keuangan dengan PDRB Perkapita. Hasil per Provinsi pada tahun 2016 Diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 4.7**

**Tipologi Daerah Berdasarkan Inklusi Keuangan dengan PDRB Tahun 2016**

PDRB per kapita (y) Literasi Keuangan (r)	( $y_i < y$ )	( $y_i > y$ )
( $r_i > r$ )	Kuadran II: DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Bali, Aceh, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sulawesi Utara, Riau, Kep Bangka Belitung	Kuadran I: DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kep Riau
( $r_i < r$ )	Kuadran III: Bengkulu, Jambi, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat, NTT, NTB, Papua, Kalimantan Utara, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Papua Barat, Kalimantan Selatan	Kuadran IV

*Sumber: SPSS dan data diolah*

Kuadran I terdiri dari Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kep Riau yang memiliki nilai pertumbuhan Inklusi Keuangan dan PDRB Perkapita yang

tinggi. Untuk Kuadran II, provinsi yang nilai inklusi keuangannya bertumbuh dan PDRB Perkapita adalah DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Bali, Aceh, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sulawesi Utara, Riau, Kep Bangka Belitung. Sedangkan untuk provinsi yang PDRB nya bertumbuh tetapi tingkat inklusi keuangannya termasuk rendah adalah Bengkulu, Jambi, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat, NTT, NTB, Papua, Kalimantan Utara, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Papua Barat, Kalimantan Selatan. Serta yang berada dalam kuadran IV merupakan daerah Provinsi yang tertinggal, tetapi dalam hal ini tidak ada daerah yang tertinggal tingkat inklusi dan PDRB perkapita nya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 KESIMPULAN

Dari penelitian mengenai Implementasi *Financial Inclusion Strategic* Di Era Ekonomi Digital Terhadap Literasi Keuangan Di Indoensia dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan Inklusifitas dan Literasi keuangan masyarakat saat ini sudah banyak di jalankan antara lain dengan mempermudah pembukaan rekening, memperbanyak Agen Laku Pandai, menggerakkan masyarakat LCS atau *less cash society* memperbanyak transaksi nontunai dengan menggunakan layanan digital keuangan seperti Fintech dan e-money serta penyaluran bantuan PKH menggunakan non tunai melalui bank BUMN yang tergabung dalam HIMBARA. Bukan hanya itu saja pertumbuhan jaringan internet juga berguna untuk memfasilitasi layanan keuangan digital khususnya pedesaan sehingga mempermudah masyarakat jika ingin melakukan transfer dana hanya dengan melalui telepon genggamnya masing masing. Peningkatan infrastruktur jaringan telekomunikasi, informasi dan listrik juga dapat mendukung inklusi keuangan.
2. Berdasarkan model yang mempengaruhi Transaksi Keuangan Digital (TKD) dengan variabel-variabel bebas Fintech (FIN), PDB, Pengguna Internet (PI), Infrastruktur Keuangan Elektronik (IKE) diperoleh nilai R korelasi 97.7% yang artinya variabel bebas memiliki korelasi positif yang sangat kuat terhadap variabel terikat dan dapat menjelaskan variabel TKD

secara signifikan. Dengan nilai (D-W) sebesar 3.33 masih ditemukan masalah autokorelasi pada model setelah dilakukan treatment dengan autoregressive ataupun dengan logaritma natural.

3. Pada analisis tipologi klassen dengan 3 variabel utama yaitu Inklusi Keuangan, Literasi, dan PDRB perkapita dapat terlihat bahwa daerah dengan *high growth high income* adalah DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kep Riau. Sedangkan yang ada di kuadran II atau *high income but low growth* yaitu DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Bali, Aceh, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sulawesi Utara, Riau, Kep Bangka Belitung. Di kuadran III atau *high growth but low income* yaitu Provinsi Bengkulu, Jambi, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat, NTT, NTB, Papua, Kalimantan Utara, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Papua Barat, Kalimantan Selatan. Untuk kuadran IV Kedua Model tidak memiliki Provinsi yang masuk ke dalam kategori tersebut.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini baik kepada pemerintah, masyarakat maupun kepada peneliti selanjutnya untuk pengembangan penelitian yang lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah selaku pembuat kebijakan diharapkan mampu mengawasi peraturan yang telah dibuat terkhusus untuk inklusi dan literasi keuangan masyarakat. Dalam hal Literasi keuangan pemerintah harus lebih gencar



lagi melakukan sosialisasi dan pelatihan guna mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilihan produk layanan keuangan khususnya bagi masyarakat pedesaan. Dalam hal Inklusifitas keuangan pemerintah lebih gencar lagi mensosialisasikan tentang kesadaran membuka rekening simpanan di lembaga keuangan bank dan penyelenggara keuangan elektronik meningkatkan Layanan Keuangan Digital serta Memperbanyak lagi Agen Laku Pandai dan peningkatan infrastruktur jaringan internet, sehingga terciptanya masyarakat yang *interporable* dan *interconnected*. Inklusifitas keuangan sangat penting karena dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

2. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan lebih memperhatikan variabel pengguna internet terhadap perkembangan transaksi keuangan digital di Indonesia, yang berhubungan negatif dengan transaksi digital
3. Dari pemetaan tipologi klassen dapat diketahui daerah mana saja yang tingkat Literasi dan Inklusi Keuangannya rendah terhadap PDRB perkapita provinsi masing-masing. Diharapkan pemerintah daerah dapat memperhatikan tentang Literasi keuangan masyarakatnya guna mendukung program pemerintah yang menjadikan masyarakat yang *well literate* dan tingkat Inklusi Keuangan mencapai 75% pada tahun 2019.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anon., n.d. *Bank Indonesia*. [Online]  
Available at: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)
- Choirunnisa, A., 2018. Pengaruh Financial Inklusion Terhadap Perkembangan UMKM. pp. 1-18.
- Dz, A. S., 2018. Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Digital-Banking: Optimisasi san Tantangan. *Al-Amwal*, Volume 10, p. 18.
- Hasibuan, N. A. A. Z., 2018. Analisis Dampak Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). pp. 36-52.
- Hestin Mulya Sari, T. T. B. D. B. M. W., 2014. Analisis Jenis pembayaran Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia. *SENTIKA 2014*, pp. 1-8.
- I made Sanjaya, N., 2016. Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif: Analisis antar Provinsi Di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* , Volume 18, pp. 1-26.
- Indonesia, B., 2017. Digital Financial Inclusion Indonesia. pp. 1-25.
- Indonesia, B. P. S., 2017. *Badan Pusat Statistik Republik indonesia*. [Online]  
Available at: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)  
[Accessed Desember 2018].
- Indonesia, S. N. I. K., 2017. Laporan Tahunan Keuangan Inklusif. 2017, pp. 1-35.
- Keuangan, O. J., n.d. [Online]  
Available at: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- Leora Klapper, D. S. S. A. J. H., 2017. Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution. *The Global Findex Database*, pp. 1-151.
- Lusardi, A. & M. O., 2007. The roles Of Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth. *Journal Of monetary Economics* , Volume 54, pp. 205-224.
- Manurung, M. & Rahardja, P., 2007. *Pengantar Ekonomi Mikro Makro*. s.l.:Universitas Indonesia.
- OJK, P., 2006. Peningkatan Literasi dan Inkusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan untuk Konsumen dan atau masyarakat. p. 3.
- Samma, M., 2009. *Index Of financial Inclusion*. 3 ed. s.l.:Indian Council for International Research Economic Relation.
- Sari, P. B. H. D., 2017. Prospek Financial Technology (Fintech) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Financial Inclusion and Poverty. pp. 1-10.

Segara, T., 2017. SNLKI (Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia). Issue Inklusi dan Literasi Keuangan, p. 2017.

Untoro, R. A. T. K. D., 2013. *Pemetaan Produk dan Risiko Pembayaran Bergerak (Mobile Payment) Dalam Sistem Pembayaran Di Indonesia*. s.l., Bank Indonesia.

Yushita, A. N., 2017. pentingnya literasi keuangan bagi pengelola keuangan pribadi. *jurnal nominal*, Volume IV, pp. 1-16.

LAMPIRAN

**Data Transaksi Keuangan Digital**

TKD	IKE	PDB	FIN	PI
137900779	1385012	81564978	25	712
203369990	2110834	85648666	40	881
535579528	2938864	89825171	60	1102
683133352	3866701	94346134	90	1327
943319933	5634184	99127036	165	14326

**STATISTIC DESKRIPTIF**

Date: 03/12/19 Time: 18:29 Sample: 2013 2017					
	TKD	PDB	FIN	IKE	PI
Mean	5.01E+08	90102397	76.00000	3187119.	3669.600
Median	5.36E+08	89825171	60.00000	2938864.	1102.000
Maximum	9.43E+08	99127036	165.0000	5634184.	14326.00
Minimum	1.38E+08	81564978	25.00000	1385012.	712.0000
Std. Dev.	3.36E+08	6932776.	55.38502	1652087.	5961.604
Skewness	0.139379	0.084550	0.862594	0.486756	1.494359
Kurtosis	1.592788	1.713075	2.367640	2.012003	3.242453
Jarque-Bera	0.428740	0.350994	0.703365	0.400805	1.873170
Probability	0.807050	0.839040	0.703504	0.818401	0.391964
Sum	2.50E+09	4.51E+08	380.0000	15935595	18348.00
Sum Sq. Dev.	4.50E+17	1.92E+14	12270.00	1.09E+13	1.42E+08
Observations	5	5	5	5	5

## HASIL REGRESI MODEL LINIER BERGANDA

Dependent Variable: TKD Method: Least Squares Date: 03/12/19 Time: 18:23 Sample: 2013 2017 Included observations: 5				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDB	-3.248316	4.443367	-0.731048	0.5981
FIN	-1647646.	20584539	-0.080043	0.9492
IKE	300.9060	550.3767	0.546727	0.6815
PI	-11035.11	52583.04	-0.209861	0.8683
R-squared	0.977014	Mean dependent var		5.01E+08
Adjusted R-squared	0.908054	S.D. dependent var		3.36E+08
S.E. of regression	1.02E+08	Akaike info criterion		39.70459
Sum squared resid	1.04E+16	Schwarz criterion		39.39214
Log likelihood	-95.26147	Hannan-Quinn criter.		38.86600
Durbin-Watson stat	3.338280			

## HASIL REGRESI MODEL (LOGARITMA NATURAL)

Dependent Variable: LOG(TKD) Method: Least Squares Date: 03/14/19 Time: 16:25 Sample: 2013 2017 Included observations: 5				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(FIN)	0.486073	4.727557	0.102817	0.9348
LOG(IKE)	1.181090	6.206990	0.190284	0.8803
LOG(PDB)	0.092667	4.129293	0.022441	0.9857
LOG(PI)	-0.196424	0.452923	-0.433682	0.7395
R-squared	0.964098	Mean dependent var		19.79571
Adjusted R-squared	0.856391	S.D. dependent var		0.821391
S.E. of regression	0.311273	Akaike info criterion		0.494267
Sum squared resid	0.096891	Schwarz criterion		0.181817
Log likelihood	2.764334	Hannan-Quinn criter.		-0.344317
Durbin-Watson stat	3.396827			

## HASIL REGRESI LINIER (*AUTOREGRESSIVE*)

Dependent Variable: TKD Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH) Date: 03/15/19 Time: 10:12 Sample: 2013 2017 Included observations: 5 Convergence achieved after 8 iterations Coefficient covariance computed using outer product of gradients				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
AR(1)	0.939605	0.141488	6.640886	0.0070
SIGMASQ	4.99E+16	6.08E+16	0.821263	0.4717
R-squared	0.445916	Mean dependent var	5.01E+08	
Adjusted R-squared	0.261221	S.D. dependent var	3.36E+08	
S.E. of regression	2.88E+08	Akaike info criterion	42.51587	
Sum squared resid	2.50E+17	Schwarz criterion	42.35965	
Log likelihood	-104.2897	Hannan-Quinn criter.	42.09658	
Durbin-Watson stat	0.464164			
Inverted AR Roots	.94			

**DATA SETELAH DIINTERPOLASI (4Q)**

Kuartal	TKD	IKE	PDB	FIN	PI
Q1	44704758.97	459662.6875	21029320.75	8.59375	204.40625
Q2	48796584.66	505026.5625	21284551.25	9.53125	214.96875
Q3	5288410.34	550390.4375	21539781.75	10.46875	225.53125
Q4	56980236.03	595754.3152	21795012.25	11.40625	236.09375
Q1	102750237.8	657088.1875	22064745.41	13.125	254.78125
Q2	123513333.9	708840.0625	22325776.97	14.375	268.59375
Q3	144276430.1	760591.9375	22586808.53	15.625	282.40625
Q4	165039526.2	812343.8125	22847840.09	16.875	296.21875
Q1	156950167	879690.5313	23162693.22	19.6875	310.65625
Q2	166172281	937680.3438	23445253.41	21.5625	324.71875
Q3	175394395	995670.1563	23727813.59	23.4375	338.78125
Q4	184616509	1053659.969	24010373.78	25.3125	352.84375
Q1	211437491.3	1242844.469	24333549.44	34.21875	2362.84375
Q2	227699152.6	1353312.156	24632355.81	38.90625	3175.28125
Q3	243960813	1463779.844	24931162.19	43.59375	3987.71875
Q4	260222475.2	1574247.531	25229968.56	48.28125	4800.15625

### REGRESI LINIER BERGANDA OLS (INTERPOLASI)

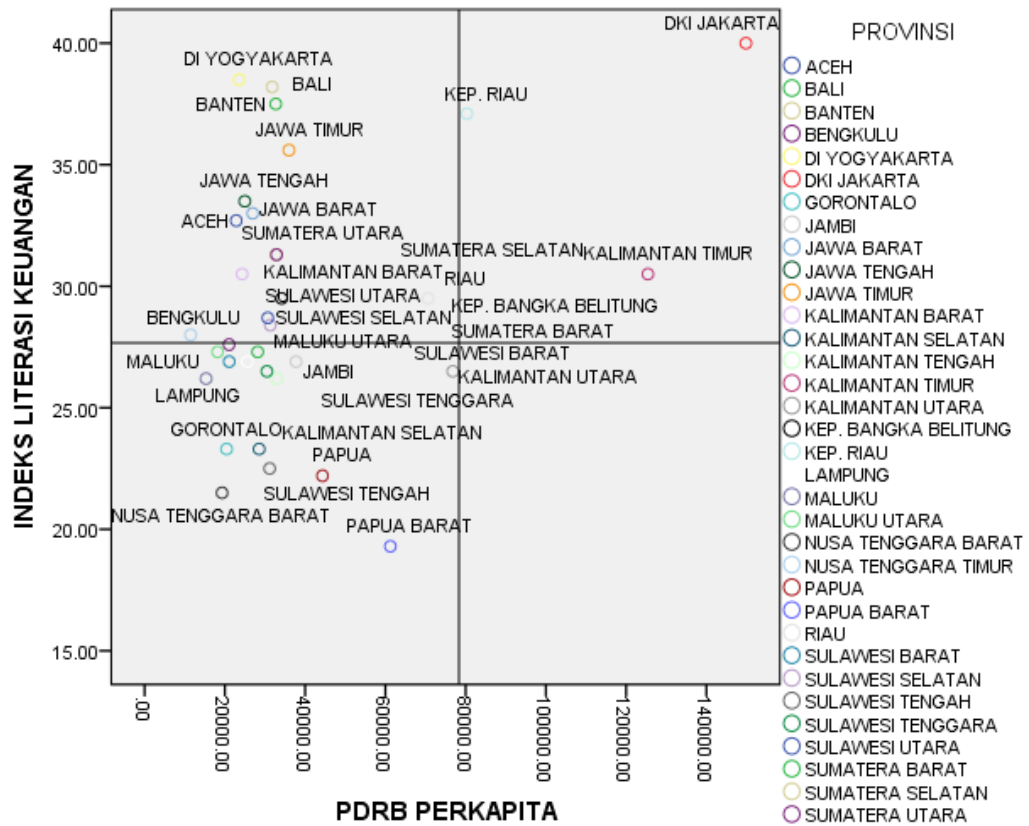
Dependent Variable: TKD Method: Least Squares Date: 03/23/19 Time: 07:59 Sample: 2014Q1 2017Q4 Included observations: 16				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.18E+10	5.05E+09	4.317271	0.0012
PDB	-1180.717	270.8448	-4.359385	0.0011
IKE	7950.953	1632.414	4.870672	0.0005
FIN	-60895740	11303817	-5.387184	0.0002
PI	-275461.7	69685.08	-3.952952	0.0023
R-squared	0.981249	Mean dependent var		1.45E+08
Adjusted R-squared	0.974431	S.D. dependent var		75998453
S.E. of regression	12152368	Akaike info criterion		35.71425
Sum squared resid	1.62E+15	Schwarz criterion		35.95569
Log likelihood	-280.7140	Hannan-Quinn criter.		35.72662
F-statistic	143.9124	Durbin-Watson stat		2.964961
Prob(F-statistic)	0.000000			

### REGRESI LINIER DENGAN LOGARITMA NATURAL (INTERPOLASI)

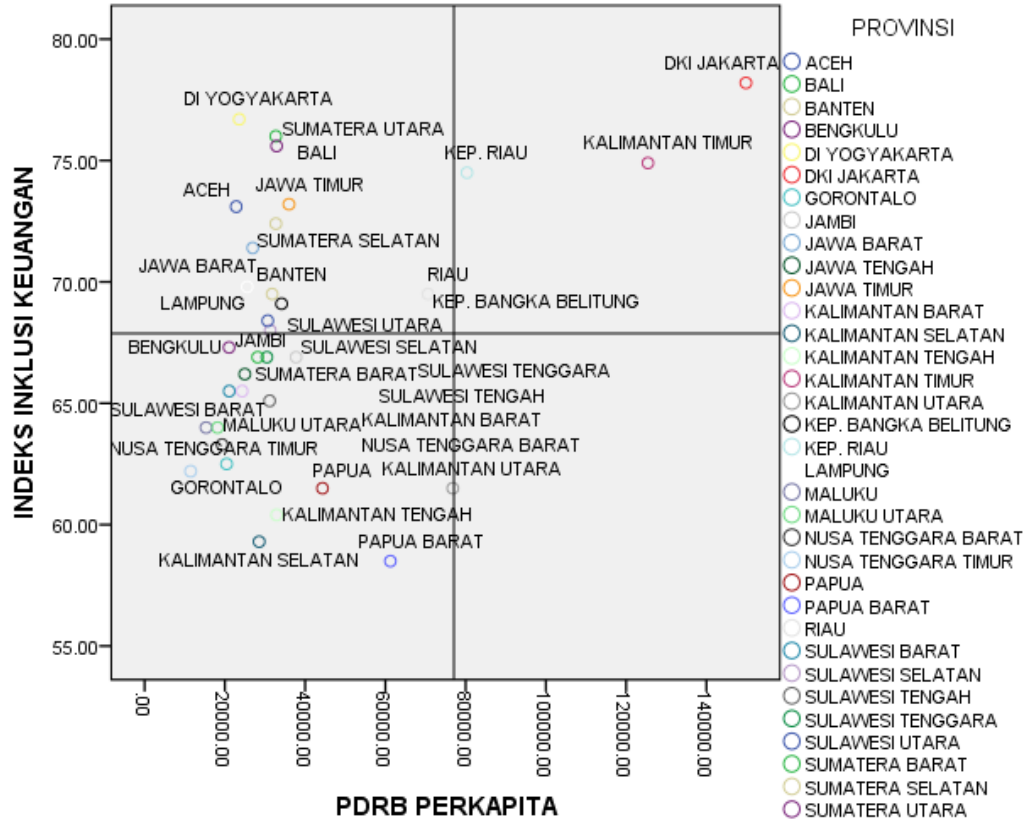
Dependent Variable: LOG(TKD) Method: Least Squares Date: 03/23/19 Time: 08:07 Sample: 2014Q1 2017Q4 Included observations: 16				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDB)	-3.717991	7.634729	-0.486984	0.6350
LOG(IKE)	6.607691	10.92538	0.604802	0.5566
LOG(FIN)	-2.393368	7.562654	-0.316472	0.7571
LOG(PI)	-0.254291	0.525075	-0.484295	0.6369
R-squared	0.626801	Mean dependent var		18.52284
Adjusted R-squared	0.533502	S.D. dependent var		0.982686
S.E. of regression	0.671181	Akaike info criterion		2.252763
Sum squared resid	5.405814	Schwarz criterion		2.445911
Log likelihood	-14.02211	Hannan-Quinn criter.		2.262654
Durbin-Watson stat	2.052713			



## TIPOLOGI KLASSEN MODEL LITERASI KEUANGAN DAN PDRB



## TIPOLOGI KLASSEN MODEL INKLUSI KEUANGAN DAN PDRB



**DATA PDRB PERKAPITA DENGAN INDEKS INKLUSI KEUANGAN**

PROVINSI	PDRB PERKAPITA	INDEKS INKLUSI KEUANGAN
ACEH	22837.27	73.1
SUMATERA UTARA	32885.09	75.6
SUMATERA BARAT	28164.93	66.9
RIAU	70604.43	69.5
JAMBI	37728.8	66.9
SUMATERA SELATAN	32699.05	72.4
BENGKULU	21041.59	67.3
LAMPUNG	25571.04	69.8
KEP. BANGKA BELITUNG	34134.61	69.1
KEP. RIAU	80330.54	74.5
DKI JAKARTA	149847.63	78.2
JAWA BARAT	26921.57	71.4
JAWA TENGAH	24965.78	66.2
DI YOGYAKARTA	23566.32	76.7
JAWA TIMUR	35970.71	73.2
BANTEN	31780.68	69.5
BALI	32686.68	76
NUSA TENGGARA BARAT	19308.54	63.3
NUSA TENGGARA TIMUR	11474.04	62.2
KALIMANTAN BARAT	24310.94	65.5
KALIMANTAN TENGAH	32903.2	60.4
KALIMANTAN SELATAN	28538.56	59.3
KALIMANTAN TIMUR	125409.43	74.9
KALIMANTAN UTARA	76785.54	61.5
SULAWESI UTARA	30682.6	68.4
SULAWESI TENGAH	31164.25	65.1
SULAWESI SELATAN	31305.06	68
SULAWESI TENGGARA	30477.19	66.9
GORONTALO	20427.82	62.5
SULAWESI BARAT	21067.91	65.5
MALUKU	15321.09	64
MALUKU UTARA	18177.3	64
PAPUA BARAT	61242.01	58.5
PAPUA	44340.94	61.5

**DATA PDRB PERKAPITA DENGAN INDEKS INKLUSI KEUANGAN**

PROVINSI	PDRB PERKAPITA	INDEKS LITERASI KEUANGAN
ACEH	22837.27	32.7
SUMATERA UTARA	32885.09	31.3
SUMATERA BARAT	28164.93	27.3
RIAU	70604.43	29.5
JAMBI	37728.8	26.9
SUMATERA SELATAN	32699.05	31.3
BENGKULU	21041.59	27.6
LAMPUNG	25571.04	26.9
KEP. BANGKA BELITUNG	34134.61	29.5
KEP. RIAU	80330.54	37.1
DKI JAKARTA	149847.63	40
JAWA BARAT	26921.57	33
JAWA TENGAH	24965.78	33.5
DI YOGYAKARTA	23566.32	38.5
JAWA TIMUR	35970.71	35.6
BANTEN	31780.68	38.2
BALI	32686.68	37.5
NUSA TENGGARA BARAT	19308.54	21.5
NUSA TENGGARA TIMUR	11474.04	28
KALIMANTAN BARAT	24310.94	30.5
KALIMANTAN TENGAH	32903.2	26.2
KALIMANTAN SELATAN	28538.56	23.3
KALIMANTAN TIMUR	125409.43	30.5
KALIMANTAN UTARA	76785.54	26.5
SULAWESI UTARA	30682.6	28.7
SULAWESI TENGAH	31164.25	22.5
SULAWESI SELATAN	31305.06	28.4
SULAWESI TENGGARA	30477.19	26.5
GORONTALO	20427.82	23.3
SULAWESI BARAT	21067.91	26.9
MALUKU	15321.09	26.2
MALUKU UTARA	18177.3	27.3
PAPUA BARAT	61242.01	19.3
PAPUA	44340.94	22.2



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 27/JDL/SKR/EP/FED/UMSU/8/11/2018

Medan, 8/11/2018

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Ilham  
NPM : 1505180037  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : -

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : -  
Rencana Judul : 1. Implementasi Financial Inclusion Strategic di Era Ekonomi Digital Terhadap Literasi  
Keuangan di Indonesia  
2. -  
3. -

Objek/Lokasi Penelitian : Indonesia

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Muhammad Ilham)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 27/IDL/SKR/EP/FEB/UMSU/8/11/2018

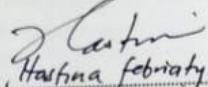
Nama Mahasiswa	: Muhammad Ilham
NPM	: 1505180037
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi	: -
Tanggal Pengajuan Judul	: 8/11/2018
Judul yang disetujui Program Studi	: Nomor ..... atau; Alternatif judul lainnya..... (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Nama Dosen pembimbing	: <u>HASTINA FEBRIYANI</u> (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing	: ..... (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

  
(Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan, 15 november 2018

Dosen Pembimbing

  
(Hastina febrity)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Pada hari ini MUHAMMAD ILHAM tanggal Selasa, 08 Januari 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan MUHAMMAD ILHAM menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD ILHAM  
N.P.M. : 1505180037  
Tempat / Tgl.Lahir : Lubuk Pakam, 22 Januari 1998  
Alamat Rumah : Dusun VIII Pantai Cermin  
Judul/Proposal : IMPLEMENTASI FINANCIAL INCLUSION STRATEGIC DI ERA EKONOMI DIGITAL TERHADAP LITERASI KEUANGA DI INDONESIA

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	.....
Bab I	Rumusan Masalah ke 3 dan tujuan penelitiannya disesuaikan dgn ..Tempat / Provinsu.....
Bab II	.....
Bab III	Referensi operasional ditambah dengan jumlah pengguna ..internet.....
Lainnya	.....
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, Selasa, 08 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS., S.E., M.Si.

Pembimbing

HASTINA FEBRIATY, SE., M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.

Pemanding

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS, SE., M.Si.





MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext. 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari Selasa, 08 Januari 2019 menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD ILHAM  
N.P.M. : 1505180037  
Tempat / Tgl.Lahir : Lubuk Pakam, 22 Januari 1998  
Alamat Rumah : Dusun VIII Pantai Cermin  
JudulProposal :IMPLEMENTASI FINANCIAL INCLUSION STRATEGIC DI ERA EKONOMI DIGITAL TERHADAP LITERASI KEUANGA DI INDONESIA

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan

pembimbing : *HASTINA FEBRIATY,SE.,M.Si.*

Medan,Selasa, 08 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS,SE., M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.

Pembimbing

HASTINA FEBRIATY,SE.,M.Si.

Pemanding

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS,SE.,M.Si.

Diketahui / Disetujui

A.n. Dekan  
Wakil Dekan - I

ADE GUNAWAN S.E., M.Si.





SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Muhammad Ilham  
NPM : 1505180037  
Konsentrasi : Ekonomi Pembangunan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi  
Pembangunan)  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
  - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
  - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU. Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan 28 Desember 2018

Pembuat Pernyataan



*Muhammad Ilham*

Muhammad Ilham

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mochtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : MUHAMMAD ILHAM  
NPM : 1505180037  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI *FINANCIAL INCLUSION STRATEGIC* DI ERA EKONOMI DIGITAL TERHADAP LITERASI KEUANGAN DI INDONESIA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan		
16/2019	- Perbaiki daftar pustaka	}			
03	- tambahkan teori di bab II				
	- Perbaiki cover				
	- tambahkan hipotesis				
	- tambahkan identifikasi	}			
	- Mslh				
16/2019	- Perbaiki cover			}	
03	- tambahkan teori di bab II				
	- tambahkan rumusan mslh	}			
	- tambahkan identifikasi				
	- mslh	}			
16/2019	- tambahkan daftar pustaka				
03	- tambahkan bab II				
	- Perbaiki kerangka konseptual				
	- Perbaiki tujuan penelitian	}			
16/2019	- tambahkan daftar pustaka				
03	- Perbaiki pendahuluan				
	- Perbaiki pembahasan				
	ACC Sidang	}			

Pembimbing Skripsi

HASTINA FEBRIATY SE, M.Si

Medan, Maret 2019  
Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS